



Prof. Dr. Syahlan, S.H., M.H.

Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H.,M.H.



# **CRIMINAL ACT, CRIMINAL LIABILITY & PUNISHMENT**

**TERHADAP KORPORASI DALAM KUHP BARU  
DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS  
SERTA TANTANGAN PENEGAKAN HUKUMNYA**



# CRIMINAL ACT, CRIMINAL LIABILITY & PUNISHMENT

TERHADAP KORPORASI DALAM KUHP BARU DAN UNDANG-  
UNDANG KHUSUS, SERTA TANTANGAN PENEGAKAN  
HUKUMNYA

Prof. Dr. Syahlan, S.H., M.H.  
Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H.,M.H.



# **CRIMINAL ACT, CRIMINAL LIABILITY & PUNISHMENT TERHADAP KORPORASI DALAM KUHP BARU DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS, SERTA TANTANGAN PENEGAKAN HUKUMNYA**

---

Ditulis oleh:

Prof. Dr. Syahlan, S.H., M.H.  
Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H.,M.H.

Editor:  
Shinta Asih, S.E., S.H.

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-623-8702-66-4  
IV + 219 hlm; 18,2 x 25,7 cm.  
Cetakan I, September 2024

**Desain Cover dan Tata Letak:**  
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Media Penerbit Indonesia**  
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata  
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131  
Telp: 081362150605  
Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)  
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>  
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



# KATA PENGANTAR

---

Korporasi berperan penting dalam perekonomian modern, baik di tingkat nasional maupun global. Namun, dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha dan bisnis yang dilakukan oleh korporasi, muncul berbagai tantangan dalam hal regulasi dan penegakan hukum, terutama dalam konteks hukum pidana. Kejahatan korporasi (*corporate crime*) mencakup berbagai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi atau atas nama korporasi, yang tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga masyarakat luas dan negara.

Buku referensi ini membahas berbagai konsep dasar tentang tindakan pidana, tanggung jawab pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dibahas secara mendalam. Buku referensi ini membahas secara detail bagaimana KUHP baru dan berbagai undang-undang khusus di Indonesia mengatur tindak pidana korporasi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Buku referensi ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga memberikan analisis kasus nyata yang memperkaya pemahaman tentang dinamika penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia.

Semoga buku referensi ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan siapa saja yang tertarik untuk mendalami aspek-aspek hukum pidana korporasi di Indonesia.

Salam Hangat,

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penulisan .....	9
<b>BAB II KONSEP DASAR TINDAK PIDANA KORPORASI. 13</b>	
A. Definisi dan Ciri-Ciri Korporasi .....	13
B. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Korporasi.....	19
C. Teori-Teori Pertanggungjawaban Korporasi .....	25
D. Aspek Hukum dan Etika dalam Tindak Pidana Korporasi	29
<b>BAB III TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU.....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian Tindak Pidana dalam KUHP Baru.....	33
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam KUHP Baru .....	37
C. Sanksi dan Hukuman dalam KUHP Baru.....	42
<b>BAB IV UNDANG-UNDANG KHUSUS YANG MENGATUR KORPORASI.....</b>	<b>47</b>
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Undang-Undang Khusus .....	47
B. Contoh-Contoh Undang-Undang Khusus.....	54
C. Implementasi Undang-Undang Khusus dalam Penegakan Hukum .....	61
<b>BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.....</b>	<b>67</b>
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	67
B. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	72
C. Peran Direksi dan Manajemen dalam Pertanggungjawaban.....	78

<b>BAB VI</b>	<b>HUKUMAN TERHADAP KORPORASI.....</b>	<b>83</b>
	A. Jenis-Jenis Hukuman terhadap Korporasi .....	83
	B. Penerapan Hukuman dalam Praktik.....	90
	C. Pengaruh Hukuman terhadap Operasional Korporasi .....	96
	D. Kasus-Kasus Penting terkait Hukuman terhadap Korporasi .....	99
<b>BAB VII</b>	<b>TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI.....</b>	<b>105</b>
	A. Hambatan dalam Penegakan Hukum.....	105
	B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum .....	112
	C. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mengatasi Tantangan .....	118
	D. Solusi dan Strategi Penegakan Hukum yang Efektif.....	123
<b>BAB VIII</b>	<b>PERBANDINGAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>129</b>
	A. Hukum Pidana Korporasi di Negara-Negara Lain.....	129
	B. Studi Kasus dari Beberapa Negara .....	135
	C. Pembelajaran dari Praktik Internasional .....	141
	D. Implementasi Pembelajaran Internasional di Indonesia ..	149
<b>BAB IX</b>	<b>REFORMASI HUKUM PIDANA KORPORASI DI INDONESIA.....</b>	<b>155</b>
	A. Sejarah Reformasi Hukum Pidana Korporasi.....	155
	B. Kebijakan Pemerintah dalam Reformasi Hukum .....	161
	C. Evaluasi Terhadap Reformasi yang Telah Dilakukan .....	169
<b>BAB X</b>	<b>PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI.....</b>	<b>175</b>
	A. Peran Pemerintah dan Lembaga Negara.....	175
	B. Peran Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat... ..	181
	C. Peran Media dalam Penegakan Hukum .....	187
	D. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan .....	194



<b>BAB XI KESIMPULAN .....</b>	<b>199</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>203</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>211</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>213</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>217</b>
<b>SINOPSIS .....</b>	<b>219</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

Pada era modern ini, korporasi berperan yang sangat penting dalam perekonomian global, namun juga berpotensi menjadi aktor utama dalam berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat luas. Dalam upaya untuk menegakkan hukum dan memastikan korporasi bertanggung jawab atas perbuatannya, Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tahun 2023 yang mencakup pembaruan signifikan terkait tindak pidana korporasi. KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang definisi tindak pidana, jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, serta sanksi dan hukuman yang dapat dikenakan. Selain itu, terdapat berbagai undang-undang khusus yang juga mengatur tentang tindak pidana korporasi, seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kompleksitas struktur korporasi, kekuatan ekonomi dan politik korporasi, serta keterbatasan sumber daya penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan reformasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, yang dapat didukung oleh pembelajaran dari praktik internasional. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif, diharapkan korporasi dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

### **A. Latar Belakang**

Korporasi berperan vital dalam perekonomian modern, berfungsi sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Namun, seiring dengan kontribusi positifnya, korporasi juga dapat menjadi aktor yang terlibat dalam

berbagai tindak pidana, yang sering kali berdampak luas dan merugikan masyarakat, ekonomi, serta lingkungan. Dalam konteks ini, hukum pidana korporasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum (Sutherland, 2017).

## **1. Perkembangan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia**

Perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia mencerminkan upaya negara untuk menghadapi tantangan kompleks dalam menegakkan keadilan terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia telah mengalami berbagai kasus besar yang menguji kemampuan penegakan hukum pidana korporasi. Skandal-skandal seperti kasus Century Bank dan PT Asuransi Jiwasraya mengungkapkan bahwa perusahaan besar dapat terlibat dalam aktivitas ilegal yang merugikan negara dan masyarakat luas. Kejahatan korporasi seperti ini tidak hanya menciptakan kerugian finansial yang signifikan tetapi juga merusak integritas dan stabilitas ekonomi negara (Setiyono & McLeod, 2010). Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korporasi menjadi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan praktik bisnis yang adil dan transparan.

Untuk memperkuat penegakan hukum pidana korporasi, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai regulasi penting. Salah satu regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan kerangka hukum bagi operasi dan manajemen perusahaan. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tanggung jawab korporasi dan manajemennya dalam menjalankan bisnis secara etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bertujuan untuk menangani aktivitas pencucian uang yang sering kali melibatkan perusahaan besar. Undang-Undang ini berfungsi untuk melacak aliran dana ilegal dan memastikan bahwa perusahaan tidak menggunakan sistem keuangan untuk menyembunyikan hasil dari tindak pidana (Winata, 2019).

Meskipun regulasi telah ada, implementasi dan efektivitasnya masih menjadi tantangan yang signifikan. Kompleksitas struktur

korporasi sering kali membuat sulit bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, kekuatan ekonomi dan politik perusahaan besar dapat menghambat upaya penegakan hukum, karena memiliki sumber daya yang cukup untuk mempengaruhi proses hukum dan menghindari sanksi yang berat. Keterbatasan sumber daya penegak hukum juga menjadi hambatan besar, karena investigasi dan penuntutan kasus korporasi membutuhkan keahlian dan dana yang besar.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus memperkuat regulasi dan memastikan bahwa penegak hukum memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Pendidikan dan pelatihan khusus bagi penegak hukum dalam menangani kasus korporasi juga menjadi kebutuhan mendesak. Di sisi lain, masyarakat dan media memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan tekanan publik agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, melalui kombinasi regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang mampu menangani kejahatan korporasi dan menjaga integritas serta stabilitas ekonomi negara.

## **2. Peran KUHP Baru dalam Pengaturan Tindak Pidana Korporasi**

Pada tahun 2023, Indonesia mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang membawa pembaruan signifikan dalam hukum pidana, termasuk pengaturan khusus mengenai tindak pidana korporasi. KUHP baru ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan untuk memperbarui dan memperkuat regulasi hukum pidana di Indonesia agar lebih relevan dengan perkembangan zaman serta dapat menanggapi tantangan-tantangan modern dalam penegakan hukum pidana korporasi (Yuliana, 2023). Pembaruan ini merupakan langkah penting dalam upaya memperbaiki sistem hukum yang mampu menangani kompleksitas kasus-kasus kejahatan korporasi yang semakin canggih dan beragam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas mengenai tanggung jawab pidana korporasi. Salah

satu aspek penting dalam KUHP ini adalah penegasan bahwa korporasi sebagai entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Hal ini mencakup berbagai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi, mulai dari penipuan, pelanggaran lingkungan, hingga korupsi. Dengan demikian, korporasi tidak lagi dapat berlindung di balik status entitas hukum untuk menghindari sanksi pidana. Kejelasan ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak korporasi yang melakukan tindakan melanggar hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi ini mencakup berbagai bentuk hukuman, seperti denda yang signifikan, pembatasan operasional, hingga pencabutan izin usaha. Penegakan sanksi yang tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang kuat bagi korporasi agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman sanksi yang berat, korporasi diharapkan akan lebih berhati-hati dan berupaya untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengakomodasi mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Salah satu mekanisme yang diperkenalkan adalah adanya prosedur yang lebih jelas dalam proses investigasi dan penuntutan kasus-kasus tindak pidana korporasi. Hal ini mencakup panduan mengenai cara pengumpulan bukti, proses pemeriksaan, serta pelaksanaan hukuman. Dengan prosedur yang lebih terstruktur dan terarah, diharapkan penegak hukum dapat bekerja dengan lebih optimal dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korporasi. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam penegakan hukum pidana korporasi. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana dapat ditindak dengan tegas. Partisipasi aktif masyarakat dan peran media juga dianggap penting dalam mengawasi dan memberikan tekanan publik agar penegakan hukum dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.

### **3. Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi**

Penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas struktur korporasi itu sendiri. Korporasi besar sering kali memiliki struktur yang rumit dengan berbagai anak perusahaan dan afiliasi, baik di dalam maupun luar negeri. Struktur yang kompleks ini menyulitkan penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, tindakan ilegal yang dilakukan sering kali tersembunyi di balik praktik bisnis yang sah, membuat pembuktian menjadi lebih sulit dan memerlukan investigasi yang mendalam dan terperinci (Gobert & Punch, 2016).

Kekuatan ekonomi dan politik korporasi juga menjadi hambatan besar dalam proses penegakan hukum pidana. Korporasi besar sering kali memiliki pengaruh yang signifikan terhadap politik dan ekonomi negara, yang dapat digunakan untuk menekan penegak hukum atau mempengaruhi proses hukum. Tekanan ini bisa berbentuk lobi politik, penggunaan media untuk mempengaruhi opini publik, atau bahkan suap dan korupsi untuk menghindari atau memperlambat proses hukum. Akibatnya, penegakan hukum sering kali menjadi tidak efektif atau bahkan terhenti sama sekali, mengakibatkan keadilan tidak tercapai dan korporasi yang bersalah tidak mendapatkan hukuman yang setimpal (Gobert & Punch, 2016).

Keterbatasan sumber daya dan kapasitas penegak hukum juga menjadi tantangan besar dalam menegakkan hukum pidana korporasi di Indonesia. Banyak penegak hukum yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan korporasi. Kasus-kasus tersebut sering kali memerlukan pemahaman mendalam tentang akuntansi, keuangan, dan hukum bisnis, yang tidak selalu dimiliki oleh penegak hukum. Selain itu, sumber daya yang terbatas, seperti anggaran, teknologi, dan personel, juga menghambat kemampuan penegak hukum untuk melakukan investigasi yang efektif dan mendalam. Kondisi ini sering kali mengakibatkan penyelidikan yang kurang menyeluruh dan tidak berhasil mengungkap tindak pidana yang sebenarnya (Winata, 2019).

Terdapat juga masalah dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kasus-kasus tindak pidana korporasi sering kali melibatkan berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas keuangan. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga ini dapat

mengakibatkan tumpang tindih dalam penanganan kasus, serta memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses hukum. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh korporasi untuk menghindari atau memperlambat proses hukum, sehingga penegakan hukum menjadi kurang efektif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Reformasi ini harus mencakup peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pembaharuan regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan terkini. Selain itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Dengan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, diharapkan penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat (Winata, 2019; Gobert & Punch, 2016).

#### **4. Pembelajaran dari Praktik Internasional**

Studi perbandingan dengan negara-negara lain dapat memberikan wawasan berharga dalam memperbaiki penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk menegakkan hukum pidana terhadap korporasi dengan lebih efektif. Amerika Serikat, misalnya, dikenal dengan pendekatan yang sangat ketat dalam menegakkan hukum terhadap korporasi. Pemerintah Amerika Serikat menerapkan denda yang sangat besar dan program kepatuhan yang ketat untuk memastikan bahwa korporasi mematuhi hukum. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memberikan efek jera kepada korporasi yang melanggar hukum dan mendorong praktik bisnis yang lebih etis (Gobert & Punch, 2016).

Di Inggris, penegakan hukum pidana korporasi juga memiliki mekanisme yang kuat. Salah satu instrumen yang digunakan adalah *Deferred Prosecution Agreements* (DPAs), yang memungkinkan penegak hukum untuk menunda penuntutan terhadap korporasi yang bersedia bekerja sama, mengakui kesalahan, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah yang ada. DPAs memberikan kesempatan kepada korporasi untuk memperbaiki diri tanpa harus menghadapi proses peradilan yang panjang dan mahal, sementara tetap

memberikan penegak hukum alat untuk memastikan kepatuhan dan memberikan sanksi yang memadai. Di Inggris terdapat *Serious Fraud Office* (SFO) yang berfokus pada penanganan kasus-kasus penipuan dan korupsi besar. SFO memiliki wewenang untuk melakukan investigasi yang mendalam dan memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan korporasi besar.

Implementasi pembelajaran dari praktik internasional dapat membantu Indonesia dalam mengatasi tantangan dalam penegakan hukum pidana korporasi. Dengan memahami dan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Misalnya, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menerapkan denda yang lebih besar dan program kepatuhan yang ketat seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Pendekatan ini dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dan mendorong korporasi untuk mematuhi hukum dengan lebih serius. Selain itu, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi mekanisme seperti DPAs yang digunakan di Inggris. Dengan memberikan kesempatan kepada korporasi untuk bekerja sama dan memperbaiki kesalahan tanpa harus menghadapi proses peradilan yang panjang, penegak hukum dapat lebih fokus pada pencegahan dan perbaikan daripada sekadar memberikan hukuman. Pendekatan ini juga dapat membantu mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian kasus.

Penting juga bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pidana korporasi. Pembentukan lembaga khusus yang memiliki keahlian dan sumber daya yang memadai, seperti SFO di Inggris, dapat menjadi solusi yang efektif. Lembaga ini harus dilengkapi dengan personel yang memiliki pengetahuan mendalam tentang akuntansi, keuangan, dan hukum bisnis, serta memiliki wewenang yang cukup untuk melakukan investigasi yang mendalam dan kompleks. Selain itu, pembelajaran dari praktik internasional juga mencakup pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Negara-negara yang berhasil menegakkan hukum pidana korporasi dengan efektif sering kali memiliki sistem yang transparan dan akuntabel, yang memungkinkan masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk memantau dan mengevaluasi kinerja penegak hukum. Indonesia dapat mengadopsi praktik ini dengan



meningkatkan transparansi dalam proses investigasi dan penuntutan, serta melibatkan masyarakat dan media dalam upaya pengawasan.

## **5. Pentingnya Reformasi Hukum**

Reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mampu menanggapi perkembangan zaman dan tantangan yang ada. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kompleksitas bisnis, hukum pidana korporasi harus terus diperbarui untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Tanpa reformasi yang tepat, upaya penegakan hukum dapat terhambat oleh ketidakmampuan regulasi yang ada dalam menanggulangi kejahatan korporasi yang semakin canggih dan terorganisir. Pemerintah Indonesia perlu terus mengevaluasi dan memperbarui kebijakan serta regulasi terkait hukum pidana korporasi. Evaluasi ini harus mencakup analisis terhadap efektivitas regulasi yang ada, identifikasi kelemahan-kelemahan, serta penerapan praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah berhasil menegakkan hukum pidana korporasi dengan lebih baik.

Reformasi hukum yang komprehensif juga harus mencakup pembaruan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Ini termasuk peningkatan kapasitas penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kasus-kasus pidana korporasi yang kompleks. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan efektif dan efisien. Selain aspek teknis, reformasi hukum juga harus memperhatikan aspek kultural. Ini termasuk membangun budaya hukum yang kuat di kalangan masyarakat dan korporasi. Kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum dan etika bisnis harus ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun kampanye kesadaran publik.

Pada upaya reformasi ini, peran pemangku kepentingan sangat penting. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses reformasi untuk memberikan masukan berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus-kasus pidana korporasi. Masyarakat juga berperan penting dalam mendukung

reformasi hukum pidana korporasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindak pidana korporasi dapat membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan.

## **B. Tujuan Penulisan**

Penulisan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan hukuman terhadap korporasi dalam KUHP baru dan undang-undang khusus, serta tantangan penegakan hukumnya, memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan-tujuan ini mencakup aspek akademis, praktis, serta kebijakan publik, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum pidana korporasi di Indonesia.

### **1. Memahami Konsep Dasar Tindak Pidana Korporasi**

Memahami konsep dasar tindak pidana korporasi adalah langkah penting dalam membahas dan menganalisis berbagai aspek hukum pidana yang berlaku terhadap entitas bisnis. Pada dasarnya, tindak pidana korporasi mengacu pada tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi bisnis lainnya, di mana perusahaan sebagai entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Konsep ini mencakup beberapa elemen utama yang perlu dipahami secara mendalam untuk memberikan dasar yang kuat dalam penegakan hukum dan pengaturan regulasi korporasi.

### **2. Mengkaji Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dalam KUHP Baru**

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan tindak pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang telah disahkan pada tahun 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini mencakup berbagai pembaruan signifikan dalam hukum pidana Indonesia, salah satunya adalah pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab pidana korporasi. Pembaruan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan regulasi yang lebih efektif dan relevan dalam menghadapi tantangan modern dalam dunia bisnis dan ekonomi.

### **3. Menganalisis Undang-Undang Khusus yang Mengatur Korporasi**

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana korporasi di Indonesia, dengan fokus pada implementasi dan efektivitasnya dalam penegakan hukum. Salah satu undang-undang penting dalam konteks ini adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur berbagai aspek mengenai pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan. UU ini menetapkan kerangka hukum yang jelas bagi korporasi, termasuk tanggung jawab hukum direksi dan komisaris dalam menjalankan perusahaan. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik perusahaan.

### **4. Mengidentifikasi Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi**

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas struktur korporasi itu sendiri. Korporasi sering memiliki struktur yang rumit dengan berbagai anak perusahaan, afiliasi, dan operasi lintas negara. Hal ini membuat identifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana menjadi sulit. Misalnya, keputusan-keputusan penting sering kali diambil oleh dewan direksi atau manajemen puncak, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh staf yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari implikasi hukum dari tindakannya. Selain itu, banyak korporasi yang memanfaatkan celah-celah hukum dan yurisdiksi lintas negara untuk menghindari tanggung jawab hukum (Gobert & Punch, 2016).

### **5. Membandingkan dengan Praktik Internasional**

Studi perbandingan hukum pidana korporasi antara Indonesia dan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris memberikan wawasan yang sangat berharga dalam upaya memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Praktik internasional dapat menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana menangani dan menanggulangi tindak pidana korporasi dengan lebih efektif. Misalnya, di Amerika Serikat, penegakan hukum pidana korporasi telah berkembang pesat dengan diterapkannya

berbagai regulasi dan mekanisme yang ketat. Salah satu contoh utama adalah penerapan denda yang besar untuk korporasi yang terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, AS juga menerapkan program kepatuhan yang komprehensif, yang memaksa perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang memadai dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Undang-Undang Sarbanes-Oxley, yang diperkenalkan setelah skandal Enron, adalah contoh penting dari reformasi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas korporasi melalui pengawasan yang ketat dan pelaporan yang lebih transparan.



## BAB II

# KONSEP DASAR TINDAK PIDANA KORPORASI

---

Di era globalisasi dan industrialisasi yang terus berkembang, tindak pidana korporasi telah menjadi isu penting dalam dunia hukum dan bisnis. Konsep dasar tindak pidana korporasi mencakup pemahaman tentang bagaimana korporasi, sebagai entitas hukum, dapat terlibat dalam kegiatan kriminal dan bagaimana tanggung jawab dapat diatribusikan kepadanya. Tindak pidana korporasi tidak hanya melibatkan pelanggaran yang dilakukan oleh individu dalam korporasi, tetapi juga mencakup pelanggaran yang terjadi sebagai hasil dari kebijakan, budaya, dan sistem internal korporasi itu sendiri. Dengan mengidentifikasi dan memahami ciri-ciri korporasi, sejarah perkembangan hukum pidana korporasi, serta teori-teori pertanggungjawaban, kita dapat lebih baik menangani dan mencegah tindak pidana yang melibatkan entitas korporasi. Selain itu, aspek hukum dan etika juga berperan krusial dalam membentuk praktik korporasi yang tidak hanya patuh hukum tetapi juga beretika, menjadikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar ini esensial bagi penegakan hukum yang adil dan efektif.

### A. Definisi dan Ciri-Ciri Korporasi

Korporasi adalah entitas hukum yang diakui secara sah oleh sistem hukum sebagai entitas yang terpisah dari individu-individu yang mengelolanya. Definisi ini mencakup berbagai jenis organisasi yang dapat berfungsi sebagai badan hukum, seperti perseroan terbatas (PT), perusahaan publik, dan yayasan. Korporasi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bentuk usaha lainnya, seperti kepemilikan individu atau kemitraan (Garner, 2019). Menurut *Black's Law Dictionary*, korporasi didefinisikan sebagai "badan hukum yang terpisah dari individu yang mengelolanya dan memiliki hak-hak hukum seperti

hak untuk memiliki properti, menuntut, dan dituntut" (Garner, 2019). Definisi ini menekankan bahwa korporasi memiliki status hukum yang mandiri, yang memungkinkan korporasi untuk bertindak sebagai entitas hukum dalam transaksi dan litigasi. Di Indonesia, definisi korporasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 1 angka 1 UU PT mendefinisikan perseroan terbatas sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU PT, 2007). Berikut ini Ciri-ciri Korporasi:

### **1. Entitas Hukum Terpisah**

Entitas hukum terpisah merupakan salah satu ciri fundamental dari struktur korporasi, dan prinsip ini berperan krusial dalam dunia hukum bisnis. Pada dasarnya, entitas hukum terpisah berarti bahwa korporasi diakui sebagai entitas yang mandiri secara hukum, terpisah dari individu-individu yang mengelolanya, seperti pemegang saham, direksi, atau manajer. Konsep ini memungkinkan korporasi untuk memiliki hak dan kewajiban hukum atas namanya sendiri, serta menjalankan aktivitas bisnis secara independen dari para individu yang terlibat dalam pengelolaannya (Mayer, 2021). Dengan status entitas hukum terpisah, korporasi memiliki kapasitas untuk berkontrak dan menjalankan bisnis dengan cara yang mirip dengan individu. Artinya, korporasi dapat menandatangani perjanjian, membeli dan menjual aset, serta mengajukan tuntutan hukum atau digugat di pengadilan. Dalam hal ini, korporasi bertanggung jawab secara mandiri terhadap kewajiban hukum dan utangnya. Ini berarti bahwa tanggung jawab keuangan dan hukum perusahaan tidak langsung mencakup kekayaan pribadi pemegang saham atau manajer. Jika korporasi menghadapi tuntutan hukum atau mengalami kerugian finansial, kewajiban tersebut hanya akan ditanggung oleh aset korporasi, bukan oleh aset pribadi individu yang terlibat (Mayer, 2021).

Prinsip entitas terpisah ini memberikan perlindungan signifikan terhadap pemegang saham dan manajer, yang dikenal dengan istilah "*limited liability*" atau tanggung jawab terbatas. Ini artinya, risiko yang dihadapi oleh individu yang memiliki saham di dalam korporasi dibatasi hanya pada jumlah investasi dalam perusahaan tersebut. Perlindungan ini mendorong investasi dan partisipasi dalam bisnis tanpa kekhawatiran

akan kehilangan harta pribadi di luar investasi. Dalam prakteknya, jika sebuah korporasi mengalami kebangkrutan atau terlibat dalam tindakan hukum, pemegang saham tidak akan kehilangan lebih dari jumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan (Mayer, 2021). Namun, meskipun prinsip entitas terpisah memberikan banyak keuntungan, ada juga batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Misalnya, terdapat situasi di mana prinsip ini dapat diabaikan atau "*piercing the corporate veil*" dilakukan. Ini terjadi ketika pengadilan memutuskan untuk menegaj tanggung jawab pribadi para individu di belakang korporasi jika ditemukan bahwa telah menyalahgunakan struktur korporasi untuk tujuan penipuan, penghindaran pajak, atau kegiatan ilegal lainnya. Oleh karena itu, meskipun korporasi memiliki status hukum terpisah, perlindungan yang diberikan oleh prinsip ini tidak mutlak dan dapat dicabut dalam keadaan tertentu (Mayer, 2021).

## **2. Kepemilikan Saham**

Kepemilikan saham adalah salah satu aspek fundamental dalam struktur korporasi yang menentukan bagaimana hak dan kewajiban dalam perusahaan dibagi di antara para pemegang saham. Saham merupakan unit kepemilikan dalam sebuah korporasi, dan kepemilikan saham memberikan hak-hak tertentu kepada individu atau entitas yang memilikinya. Struktur ini memungkinkan korporasi untuk menghimpun modal dari berbagai sumber, baik melalui penawaran saham kepada publik maupun melalui kepemilikan pribadi dalam kasus perusahaan terbatas (Harris, 2020). Dalam korporasi publik, saham diperdagangkan di pasar saham, memberikan kesempatan bagi investor untuk membeli dan menjual kepemilikan di perusahaan secara terbuka. Proses ini memungkinkan korporasi untuk mengakses pasar modal secara luas, memperoleh dana untuk ekspansi atau operasi bisnis, dan memberikan likuiditas bagi investor. Saham-saham ini diperdagangkan berdasarkan harga pasar yang fluktuatif, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, dan sentimen investor. Kepemilikan saham publik memberikan hak kepada pemegang saham untuk berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), di mana dapat memberikan suara pada keputusan penting, seperti pemilihan direksi, persetujuan laporan tahunan, dan keputusan strategis lainnya (Harris, 2020).



Pada kasus perseroan terbatas atau korporasi swasta, saham tidak diperdagangkan di pasar terbuka dan kepemilikannya bersifat lebih tertutup. Saham-saham ini biasanya dimiliki oleh sekelompok individu atau entitas tertentu, dan perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan dari pemilik yang ada. Meskipun tidak ada perdagangan publik, pemegang saham dalam perseroan terbatas juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan dan berbagi keuntungan melalui dividen. Struktur ini sering dipilih oleh perusahaan kecil hingga menengah yang ingin menjaga kendali lebih besar atas kepemilikan dan operasinya tanpa harus memenuhi persyaratan regulasi yang lebih ketat dari pasar publik (Harris, 2020).

Hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham mencakup hak suara, hak atas dividen, dan hak atas aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Hak suara memungkinkan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting perusahaan, termasuk pengangkatan atau pemberhentian anggota dewan direksi, perubahan anggaran dasar, dan keputusan strategis lainnya. Hak atas dividen memberikan pemegang saham hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen. Besaran dividen biasanya ditentukan oleh dewan direksi dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham. Hak atas aset perusahaan berlaku jika perusahaan mengalami likuidasi, di mana pemegang saham akan mendapatkan bagian dari aset yang tersisa setelah kewajiban perusahaan dipenuhi (Harris, 2020).

### **3. Tanggung Jawab Terbatas**

Tanggung jawab terbatas merupakan salah satu keuntungan utama dari struktur korporasi yang signifikan bagi pemegang saham dan pengelola perusahaan. Konsep ini menyatakan bahwa pemegang saham sebuah korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang dan kewajiban perusahaan melebihi nilai saham yang dimiliki (Clark, 2022). Artinya, jika sebuah korporasi mengalami kerugian finansial atau terlibat dalam utang, pemegang saham hanya kehilangan investasi dalam saham perusahaan tersebut dan tidak perlu mengeluarkan dana pribadi untuk menutupi kewajiban perusahaan. Konsep tanggung jawab terbatas memberikan perlindungan finansial yang penting bagi para pemegang saham. Dalam struktur korporasi, risiko finansial yang terkait dengan operasional perusahaan tidak langsung mempengaruhi kekayaan pribadi

pemegang saham. Hal ini berbeda dengan kepemilikan tunggal atau kemitraan, di mana pemilik bisnis bisa bertanggung jawab secara pribadi atas utang dan kewajiban bisnis. Dengan adanya perlindungan ini, pemegang saham merasa lebih aman untuk berinvestasi dalam korporasi karena tahu bahwa potensi kerugiannya terbatas pada jumlah yang telah diinvestasikan dalam saham perusahaan.

Kehadiran tanggung jawab terbatas juga mendorong investasi dalam korporasi dengan cara yang signifikan. Investor yang tertarik untuk menanamkan modal dalam sebuah korporasi dapat melakukannya dengan lebih percaya diri karena tidak harus mengkhawatirkan risiko finansial yang tidak terukur dari utang perusahaan. Perlindungan ini mengurangi kekhawatiran tentang kemungkinan kerugian finansial pribadi yang besar, sehingga mempermudah akses perusahaan ke sumber daya modal yang diperlukan untuk ekspansi dan inovasi. Dengan kata lain, tanggung jawab terbatas berfungsi sebagai insentif bagi investor untuk menyuntikkan modal ke dalam perusahaan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, meskipun tanggung jawab terbatas memberikan perlindungan terhadap risiko finansial, konsep ini tidak sepenuhnya menghilangkan tanggung jawab atau kewajiban lain yang mungkin timbul. Misalnya, dalam kasus di mana ada tindakan penipuan atau pelanggaran hukum yang disengaja oleh direksi atau manajemen, pengadilan dapat mengabaikan perlindungan tanggung jawab terbatas dan menetapkan tanggung jawab pribadi kepada individu tersebut. Ini dikenal sebagai "*piercing the corporate veil*," di mana struktur korporasi dianggap tidak lagi sebagai entitas terpisah untuk melindungi pihak-pihak tertentu dari tanggung jawab.

#### **4. Keberlanjutan**

Keberlanjutan merupakan salah satu ciri fundamental dari struktur korporasi yang membedakannya dari bentuk organisasi bisnis lainnya. Salah satu aspek utama dari keberlanjutan korporasi adalah bahwa eksistensinya tidak bergantung pada kehidupan individu yang terlibat di dalamnya. Artinya, korporasi dapat terus beroperasi secara berkelanjutan meskipun terjadi perubahan dalam kepemilikan, manajemen, atau struktur internalnya (Jensen, 2021). Konsep ini memberikan stabilitas jangka panjang yang penting bagi keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan. Keberlanjutan korporasi menjamin bahwa

perubahan dalam kepemilikan saham, pergantian eksekutif, atau bahkan pergeseran dalam strategi bisnis tidak akan menghentikan aktivitas operasional perusahaan. Sebagai contoh, jika seorang pendiri korporasi pensiun, menjual sahamnya, atau bahkan meninggal dunia, korporasi tetap dapat melanjutkan operasinya tanpa gangguan signifikan. Ini berbeda dengan usaha kecil atau bisnis individu, di mana perubahan signifikan pada pemilik atau manajer sering kali dapat mengakibatkan gangguan operasional atau bahkan penutupan usaha.

Kemampuan korporasi untuk beroperasi secara terus-menerus juga memberikan keunggulan kompetitif dalam hal perencanaan jangka panjang dan investasi. Para investor dan mitra bisnis lebih cenderung untuk terlibat dengan korporasi yang memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas, karena tahu bahwa perusahaan memiliki kapasitas untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Keberlanjutan ini mendukung perencanaan strategis yang lebih ambisius dan implementasi proyek jangka panjang yang mungkin tidak layak dilakukan dalam konteks usaha yang lebih sementara. Selain itu, keberlanjutan korporasi memungkinkan perusahaan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang stabil dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Hubungan ini, yang terbentuk atas dasar kepercayaan dan konsistensi, adalah kunci untuk menciptakan reputasi yang kuat dan loyalitas pelanggan. Dengan kemampuan untuk bertahan dalam waktu yang lama, korporasi dapat mengembangkan keunggulan kompetitif melalui inovasi yang berkelanjutan, pengembangan produk, dan strategi pemasaran yang efektif.

## **5. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi korporasi merupakan aspek penting yang membedakannya dari bentuk organisasi lainnya, dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan dan pengawasan. Di jantung struktur ini terdapat dewan direksi, yang berfungsi sebagai badan pengawas utama. Dewan direksi ini terdiri dari individu yang diangkat oleh pemegang saham, dan memiliki tanggung jawab utama untuk membuat keputusan strategis yang mempengaruhi arah dan kebijakan korporasi (Adams, 2020), memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan tujuan jangka panjang, visi, dan misi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan pemegang saham. Dewan direksi memiliki wewenang untuk mengawasi manajemen eksekutif dan memberikan

arahan strategis, juga bertanggung jawab untuk memilih dan mengevaluasi kinerja eksekutif senior, seperti CEO dan CFO, serta memutuskan remunerasi. Dengan demikian, dewan direksi berperan kunci dalam memastikan bahwa manajemen korporasi menjalankan tugasnya dengan efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur ini memungkinkan pemegang saham untuk memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, meskipun tidak terlibat dalam operasi sehari-hari.

Di bawah dewan direksi, terdapat struktur manajerial yang lebih rinci yang mencakup berbagai tingkat manajemen. Di tingkat teratas, manajer eksekutif, termasuk CEO, CFO, dan COO, bertanggung jawab untuk mengelola operasi sehari-hari dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan direksi, memimpin berbagai departemen dan divisi dalam perusahaan, memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan efisien, dan bahwa tujuan strategis perusahaan tercapai. Manajer eksekutif juga bertanggung jawab untuk melapor kepada dewan direksi mengenai kinerja perusahaan, tantangan yang dihadapi, dan pencapaian yang telah diraih. Di bawah manajer eksekutif, terdapat manajer tingkat menengah dan staf yang memiliki tanggung jawab spesifik dalam berbagai area fungsional, seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Manajer tingkat menengah mengelola tim dan proyek dalam departemen, mengimplementasikan kebijakan perusahaan, dan memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan lancar, juga berperan penting dalam komunikasi antara manajemen eksekutif dan staf operasional, serta dalam pelaksanaan strategi perusahaan.

## **B. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Korporasi**

Hukum pidana korporasi merujuk pada penerapan hukum pidana terhadap entitas bisnis seperti perusahaan dan organisasi, yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pidana yang dilakukan olehnya atau melalui agen. Perkembangan hukum pidana korporasi berakar dari sejarah panjang tentang bagaimana hukum memandang dan menangani tanggung jawab entitas non-individu dalam sistem hukum.

## 1. Perkembangan Awal

Pada awalnya, hukum pidana hampir sepenuhnya berfokus pada tanggung jawab individu. Dalam kerangka hukum pidana tradisional, kejahatan dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, dan hukuman dijatuhkan kepada individu tersebut tanpa mempertimbangkan peran entitas hukum seperti korporasi. Dalam konteks ini, korporasi tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana; sebaliknya, tanggung jawab pidana sepenuhnya dibebankan kepada individu yang terlibat dalam tindakan tersebut (Baker, 2019). Korporasi, sebagai entitas hukum terpisah, tidak memiliki kedudukan dalam sistem hukum pidana pada masa itu, dan tidak ada mekanisme yang dirancang untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh entitas ini. Namun, dengan berkembangnya industri dan kapitalisme pada abad ke-19, situasi ini mulai berubah. Era industri membawa pertumbuhan pesat perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dan masyarakat. Pada periode ini, insiden korupsi, pelanggaran peraturan, dan kejahatan yang melibatkan korporasi semakin sering terjadi. Ketika perusahaan-perusahaan besar ini menjadi pemain utama dalam ekonomi, kebutuhan untuk menegakkan hukum terhadap korporasi juga menjadi lebih mendesak. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun korporasi adalah entitas hukum yang terpisah, tindakannya dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan (Sullivan, 2021).

Perkembangan ini memicu diskusi mengenai bagaimana korporasi, sebagai entitas hukum yang terpisah dari individu yang mengelolanya, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Selama periode ini, konsep tanggung jawab pidana korporasi mulai mendapatkan perhatian. Dalam upaya untuk menanggapi tantangan baru yang dihadapi oleh sistem hukum pidana, para pemikir hukum dan pembuat undang-undang mulai mengembangkan kerangka hukum yang memungkinkan penuntutan terhadap korporasi untuk kejahatan yang dilakukan. Ini termasuk pengenalan mekanisme yang dapat menuntut korporasi sebagai entitas hukum dan menjatuhkan sanksi yang sesuai. Dengan kata lain, meskipun pada awalnya hukum pidana tidak mengakui tanggung jawab korporasi, perkembangan industri dan kapitalisme memunculkan kebutuhan untuk memperluas definisi dan penerapan hukum pidana untuk mencakup entitas-entitas hukum ini. Ini adalah langkah penting dalam evolusi hukum pidana, yang berusaha untuk

menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif dalam menangani kejahatan yang melibatkan korporasi besar.

## **2. Perkembangan di Inggris dan Amerika Serikat**

Di Inggris, perkembangan hukum pidana korporasi dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seiring dengan meningkatnya kompleksitas struktur korporasi dan aktivitas industri. Salah satu undang-undang penting dari periode ini adalah Companies Act 1862, yang mengatur tentang struktur dan operasi korporasi tetapi tidak secara khusus menangani pertanggungjawaban pidana korporasi (Jones, 2020). Meskipun undang-undang ini tidak mencakup tanggung jawab pidana, pengadilan mulai membentuk dasar untuk pertanggungjawaban pidana korporasi melalui berbagai kasus hukum. Salah satu contoh awal adalah kasus *The People v. Chicago, Burlington & Quincy Railroad* pada tahun 1892, di mana pengadilan mulai mempertimbangkan bahwa korporasi sebagai entitas hukum dapat dikenai sanksi pidana. Kasus ini menunjukkan pergeseran dalam pemahaman hukum, di mana pengadilan mengakui bahwa korporasi memiliki tanggung jawab pidana sejalan dengan prinsip bahwa dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Di Amerika Serikat, pengakuan terhadap tanggung jawab pidana korporasi muncul lebih awal dibandingkan di Inggris. Pada tahun 1909, Mahkamah Agung AS dalam kasus *New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States* menetapkan prinsip penting bahwa korporasi dapat dikenai sanksi pidana jika pelanggaran dilakukan dalam konteks operasional perusahaan dan oleh pejabat yang memiliki wewenang dalam korporasi tersebut (Friedman, 2020). Keputusan ini mencerminkan pemahaman bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi entitas hukum yang melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Perkembangan lebih lanjut dalam hukum pidana korporasi di Amerika Serikat terjadi dengan diperkenalkannya Undang-Undang Federal Sentencing Guidelines untuk Korporasi pada tahun 1991. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum pidana korporasi, karena menetapkan pedoman yang jelas untuk penjatuhan hukuman pidana terhadap korporasi di AS (Sullivan, 2021). Pedoman ini mencakup berbagai aspek, seperti denda, pemulihan, dan program kepatuhan, yang dirancang untuk memastikan bahwa korporasi

tidak hanya dikenai sanksi tetapi juga didorong untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Ini adalah langkah penting dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan memberikan panduan yang lebih konkret bagi pengadilan dan otoritas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korporasi.

### **3. Perkembangan di Eropa dan Internasional**

Di Eropa, pendekatan terhadap hukum pidana korporasi menunjukkan keragaman yang signifikan di antara negara-negara anggotanya. Di Jerman, misalnya, sistem hukum pidana korporasi berakar pada prinsip-prinsip hukum pidana umum dan hukum administratif. Jerman mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif terhadap tanggung jawab pidana korporasi, dengan penekanan pada pengaturan melalui hukum administratif dan peraturan khusus. Dalam sistem ini, tanggung jawab pidana korporasi tidak selalu dikelola secara langsung di bawah hukum pidana umum, tetapi seringkali diatur melalui regulasi administratif yang menetapkan kewajiban dan sanksi untuk entitas korporasi (Roth, 2020). Pendekatan ini mencerminkan keyakinan bahwa regulasi administratif dapat lebih efektif dalam menangani pelanggaran oleh korporasi, sementara hukum pidana lebih fokus pada individu yang bertindak dalam kapasitas korporasi.

Secara internasional, perkembangan hukum pidana korporasi telah menunjukkan tren globalisasi yang signifikan. Salah satu tonggak penting dalam pengakuan tanggung jawab pidana korporasi di tingkat internasional adalah Konvensi OECD tentang Pemberantasan Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional yang diadopsi pada tahun 1997. Konvensi ini adalah langkah besar dalam mengarahkan perhatian global terhadap isu korupsi dan penyuapan yang melibatkan korporasi dalam transaksi bisnis internasional (OECD, 1997). Konvensi ini mengatur bahwa negara-negara anggotanya harus mengadopsi undang-undang dan regulasi yang secara tegas menyebutkan pertanggungjawaban pidana untuk perusahaan yang terlibat dalam penyuapan pejabat publik asing. Dengan adanya Konvensi ini, ada dorongan untuk mengimplementasikan standar internasional yang lebih konsisten dan komprehensif mengenai pertanggungjawaban korporasi.

Konvensi OECD ini merupakan contoh bagaimana upaya internasional dapat membentuk kerangka hukum pidana korporasi dengan menetapkan standar dan praktik yang dapat diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia. Melalui pengaturan yang ditetapkan oleh Konvensi, negara-negara diharapkan untuk mengembangkan sistem hukum yang dapat menangani pelanggaran pidana korporasi secara efektif, termasuk mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi penyusutan. Ini juga mencerminkan tren yang lebih luas menuju penegakan hukum yang lebih kooperatif dan terpadu secara global dalam menghadapi tantangan yang timbul dari aktivitas korporasi yang bersifat lintas negara.

#### **4. Perkembangan di Indonesia**

Perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia telah melalui perjalanan yang bertahap, mencerminkan perubahan yang signifikan dalam cara hukum mengatur tanggung jawab entitas bisnis. Pada awalnya, hukum pidana di Indonesia, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya mengatur pertanggungjawaban individu. Konsep tanggung jawab pidana korporasi belum dipertimbangkan secara mendalam dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pada masa itu, banyak kegiatan ekonomi masih dikelola oleh individu atau entitas yang lebih sederhana, sehingga tanggung jawab pidana fokus pada tindakan individu. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan pertumbuhan sektor bisnis di Indonesia, muncul kebutuhan untuk mengatur tanggung jawab korporasi secara lebih spesifik. Pertumbuhan ini membawa tantangan baru yang melibatkan korporasi besar yang berperan penting dalam perekonomian. Menghadapi situasi ini, Indonesia mulai memikirkan reformasi yang diperlukan untuk memasukkan tanggung jawab pidana korporasi dalam kerangka hukum yang ada.

Langkah penting dalam perkembangan ini terjadi pada tahun 2007, dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Undang-undang ini merupakan salah satu upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan hukum korporasi yang berkembang. UU PT mencakup ketentuan-ketentuan yang menyentuh aspek tanggung jawab korporasi, termasuk mekanisme untuk menangani masalah hukum yang melibatkan entitas bisnis. Meskipun demikian, UU PT belum sepenuhnya mengatur secara rinci



tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga seringkali penegakan hukum dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan korporasi masih mengandalkan berbagai undang-undang khusus dan peraturan yang mengatur jenis kejahatan tertentu.

Sebagai contoh, penegakan hukum pidana korporasi sering kali melibatkan undang-undang yang mengatur kejahatan korupsi, lingkungan, dan pasar modal. Kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana korupsi di korporasi, misalnya, akan diatur berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami beberapa amandemen. Sementara itu, masalah lingkungan diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pelanggaran dalam pasar modal diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **5. Perkembangan Kontemporer**

Pada abad ke-21, perkembangan hukum pidana korporasi mengalami transformasi yang signifikan, didorong oleh globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern. Negara-negara di seluruh dunia semakin menyadari perlunya mengatur tanggung jawab pidana korporasi dengan lebih komprehensif, beradaptasi dengan dinamika global yang melibatkan perusahaan multinasional dan praktik bisnis yang semakin rumit. Dalam konteks ini, banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan peraturan baru yang mencakup berbagai aspek penting, seperti peraturan anti-korupsi, anti-trust, dan perlindungan konsumen. Peraturan anti-korupsi, misalnya, dirancang untuk mencegah dan menindak korupsi yang melibatkan korporasi, sementara undang-undang anti-trust bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Perlindungan konsumen juga menjadi fokus utama, memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas keamanan dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan.

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi juga mengalami perubahan signifikan. Pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan dan kepatuhan kini menjadi norma, menggantikan model sanksi yang lebih retributif. Ini berarti bahwa alih-alih hanya menghukum, sistem hukum pidana korporasi sekarang juga berfokus pada mendorong perbaikan internal di dalam korporasi untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Pendekatan ini mencakup penegakan

program kepatuhan yang ketat, di mana korporasi diwajibkan untuk menerapkan prosedur dan kebijakan yang memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Di Indonesia, reformasi hukum pidana korporasi mengikuti tren global dengan berbagai pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pidana korporasi. Revisi ini bertujuan untuk memperjelas dan memperluas cakupan hukum pidana korporasi, menyesuaikan dengan standar internasional, serta memberikan kerangka kerja yang lebih baik untuk menangani pelanggaran yang melibatkan entitas bisnis. Selain itu, peraturan khusus yang mengatur kejahatan korporasi, seperti korupsi, pelanggaran lingkungan, dan pasar modal, juga semakin diperhatikan.

Implementasi standar internasional dalam penegakan hukum menjadi fokus utama, sejalan dengan upaya Indonesia untuk berintegrasi lebih baik dalam komunitas global. Misalnya, Indonesia berusaha untuk memenuhi komitmen internasional dalam hal anti-korupsi dan perlindungan konsumen dengan mengadopsi peraturan yang sesuai dengan konvensi-konvensi internasional yang relevan. Ini termasuk mengadopsi pedoman dari organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan mengikuti praktik terbaik yang diterapkan di negara-negara maju.

## **C. Teori-Teori Pertanggungjawaban Korporasi**

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana adalah konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah entitas hukum seperti perusahaan atau organisasi dapat dikenai sanksi pidana atas tindakan yang melanggar hukum. Berbagai teori telah berkembang untuk memahami dan menjelaskan bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, masing-masing dengan pendekatan dan asumsi yang berbeda. Berikut adalah beberapa teori utama dalam pertanggungjawaban korporasi:

### **1. Teori Tanggung Jawab Kolektif**

Teori tanggung jawab kolektif berargumen bahwa sebuah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang

dilakukan oleh individu di dalamnya, meskipun tindakan tersebut tidak melibatkan persetujuan atau pengetahuan seluruh anggota korporasi. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa korporasi, sebagai entitas hukum, memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka aktivitas bisnisnya. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa tanggung jawab korporasi bukan hanya bergantung pada persetujuan eksplisit atau pengetahuan langsung dari seluruh anggota organisasi, tetapi pada kebijakan, keputusan, dan praktik yang diterapkan dalam struktur korporasi tersebut.

Pada teori tanggung jawab kolektif, tanggung jawab korporasi muncul dari keputusan dan kebijakan yang diterapkan oleh manajemen puncak atau departemen-departemen tertentu dalam korporasi. Misalnya, jika sebuah korporasi menerapkan kebijakan yang mendorong praktik bisnis yang melanggar hukum, atau jika manajer tingkat tinggi mengetahui tetapi tidak menghentikan tindakan ilegal yang dilakukan oleh staf di bawahnya, maka korporasi tersebut bisa dianggap bertanggung jawab secara kolektif atas pelanggaran tersebut. Konsep ini menegaskan bahwa meskipun tidak semua individu dalam korporasi mungkin terlibat langsung dalam tindakan pidana, korporasi sebagai sebuah entitas memiliki tanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam konteks kegiatan bisnisnya dan yang dilakukan oleh individu dengan kekuasaan atau wewenang dalam korporasi (Hess, 2020).

## **2. Teori Tanggung Jawab Manajerial**

Teori tanggung jawab manajerial menggarisbawahi peran penting yang dimainkan oleh manajer dan eksekutif dalam menentukan tanggung jawab pidana korporasi. Menurut teori ini, tanggung jawab pidana korporasi tidak hanya bergantung pada tindakan individu dalam organisasi tetapi lebih pada keputusan dan kelalaian yang dilakukan olehnya yang berada di posisi manajerial. Dengan kata lain, jika tindakan pidana dilakukan dalam konteks keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manajer atau jika manajer gagal untuk mencegah pelanggaran yang jelas, maka korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan tersebut (Adams, 2020).

Prinsip utama dari teori tanggung jawab manajerial adalah bahwa tanggung jawab pidana korporasi terutama berasal dari keputusan yang diambil oleh individu yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi arah dan kebijakan korporasi. Dalam struktur organisasi, manajer atau

eksekutif puncak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur operasional perusahaan dan memastikan bahwa semua aktivitas bisnis mematuhi hukum yang berlaku. Jika tindakan pidana terjadi sebagai hasil langsung dari kebijakan yang diterapkan oleh manajer atau jika gagal untuk mengidentifikasi dan menghentikan pelanggaran yang dilakukan di bawah pengawasan, maka korporasi dapat dikenai tanggung jawab pidana (Adams, 2020). Teori ini menekankan pentingnya peran manajerial dalam pengendalian dan kepatuhan hukum, sehingga kegagalan dalam mengawasi dan mengelola risiko hukum dapat berakibat pada pertanggungjawaban korporasi.

### **3. Teori Tanggung Jawab *Vicarious* (Tanggung Jawab Pengganti)**

Teori tanggung jawab *vicarious*, atau tanggung jawab pengganti, merupakan prinsip yang menyatakan bahwa korporasi dapat dikenai tanggung jawab pidana atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawan atau agen dalam lingkup pekerjaan. Konsep ini mengikuti pola tanggung jawab *vicarious* dalam hukum perdata, tetapi diterapkan dalam konteks pidana. Prinsip dasar teori ini adalah bahwa ketika seorang karyawan atau agen melakukan pelanggaran hukum sambil menjalankan tugas untuk korporasi, maka korporasi juga dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan tersebut, bahkan jika pelanggaran tersebut tidak secara eksplisit disetujui oleh manajemen (Friedman, 2020).

Teori tanggung jawab *vicarious* berargumen bahwa karena karyawan atau agen bertindak dalam kapasitas pekerjaan dan untuk keuntungan korporasi, maka korporasi sebagai entitas hukum dapat dikenai tanggung jawab untuk pelanggaran hukum yang dilakukan olehnya. Dalam hal ini, tanggung jawab korporasi tidak hanya bergantung pada tindakan individu tetapi juga pada hubungan dengan korporasi. Dengan kata lain, korporasi dapat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab karena karyawan atau agen bertindak dalam kapasitas pekerjaan, yang secara langsung menghubungkan tindakan pelanggaran dengan entitas korporasi itu sendiri (Friedman, 2020).

### **4. Teori Tanggung Jawab Korporasi Berdasarkan *Negligence* (Kelalaian)**

Teori tanggung jawab korporasi berdasarkan kelalaian berfokus pada tanggung jawab pidana korporasi yang timbul dari tindakan atau

kelalaian yang menyebabkan pelanggaran hukum, berlandaskan pada tingkat kelalaian yang signifikan. Dalam teori ini, inti dari pertanggungjawaban terletak pada kegagalan korporasi dalam memenuhi standar kewajiban hukum atau regulasi yang berlaku, yang secara langsung berkontribusi pada pelanggaran hukum yang dilakukan. Korporasi dapat dianggap bertanggung jawab jika terbukti bahwa gagal mengambil langkah-langkah pencegahan yang wajar atau tidak mematuhi standar industri yang diharapkan, yang kemudian menyebabkan pelanggaran hukum (Sullivan, 2021).

Menurut teori ini, kelalaian dapat berupa berbagai bentuk kegagalan dalam pengawasan, manajemen, atau kepatuhan terhadap peraturan yang relevan. Misalnya, jika sebuah korporasi tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa operasionalnya mematuhi hukum yang berlaku atau jika gagal memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian yang mengarah pada pelanggaran hukum. Kegagalan dalam memantau kepatuhan internal atau dalam menerapkan prosedur yang sesuai untuk menghindari pelanggaran juga dapat dijadikan dasar untuk tanggung jawab pidana berdasarkan kelalaian (Sullivan, 2021).

## **5. Teori Tanggung Jawab Korporasi Berdasarkan Kewajiban Kepatuhan (*Compliance*)**

Teori tanggung jawab korporasi berdasarkan kewajiban kepatuhan berargumen bahwa korporasi dapat dikenai sanksi pidana jika gagal memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, kewajiban kepatuhan melibatkan penerapan dan pemeliharaan program-program yang dirancang untuk memastikan bahwa korporasi beroperasi sesuai dengan standar hukum yang ditetapkan. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa korporasi harus proaktif dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan memiliki sistem pengawasan internal yang memadai untuk mencegah pelanggaran hukum (Clark, 2022).

Teori ini menekankan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami dan mematuhi hukum yang relevan tetapi juga untuk membuat sistem kepatuhan yang dapat mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran sebelum terjadi. Program kepatuhan ini biasanya mencakup kebijakan dan prosedur yang ditujukan untuk

mengidentifikasi risiko hukum, memberikan pelatihan kepada karyawan, serta melakukan audit dan pemantauan secara teratur. Jika sebuah korporasi tidak memiliki sistem kepatuhan yang memadai atau jika sistem tersebut tidak efektif dalam mencegah pelanggaran, maka korporasi tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang terjadi. Konsep ini menekankan bahwa kepatuhan bukan hanya sekedar mematuhi hukum tetapi juga berusaha untuk mencegah pelanggaran melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis (Clark, 2022).

Contoh penerapan teori tanggung jawab berdasarkan kepatuhan dapat dilihat dalam kasus *In re: Volkswagen Emissions Scandal* (2016). Dalam kasus ini, Volkswagen dikenai sanksi berat karena kegagalan dalam program kepatuhan terhadap regulasi emisi kendaraan. Volkswagen ditemukan telah menggunakan perangkat lunak yang dirancang untuk menghindari deteksi emisi yang melanggar batas standar lingkungan yang ditetapkan oleh hukum. Kasus ini menunjukkan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak menerapkan program kepatuhan yang memadai untuk memenuhi regulasi yang berlaku. Kegagalan Volkswagen untuk memastikan bahwa sistem emisi mematuhi hukum yang berlaku tidak hanya mencerminkan kelalaian dalam kepatuhan tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan (Davis, 2022).

## **D. Aspek Hukum dan Etika dalam Tindak Pidana Korporasi**

Tindak pidana korporasi melibatkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh atau terkait dengan entitas korporasi, seperti perusahaan atau organisasi. Penegakan hukum terhadap korporasi dan evaluasi dari sudut pandang etika memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip hukum dan etika berinteraksi dan mempengaruhi proses pertanggungjawaban korporasi. Bagian ini akan membahas aspek hukum dan etika yang relevan dalam tindak pidana korporasi, termasuk bagaimana keduanya mempengaruhi kebijakan, praktik, dan penegakan hukum.

### **1. Aspek Hukum dalam Tindak Pidana Korporasi**

Aspek hukum dalam tindak pidana korporasi mencakup berbagai elemen penting untuk menentukan dan menerapkan tanggung jawab

pidana terhadap korporasi. Elemen-elemen ini melibatkan definisi dan klasifikasi tindak pidana korporasi, konsep pertanggungjawaban, serta sanksi dan hukuman yang diterapkan.

- a. Definisi tindak pidana korporasi merujuk pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh atau untuk keuntungan korporasi, mencakup pelanggaran terhadap berbagai peraturan, seperti peraturan pemerintah, hukum lingkungan, dan peraturan industri (Baker, 2020). Tindak pidana korporasi sering kali melibatkan identifikasi tindakan individu dalam korporasi yang berkontribusi pada pelanggaran. Definisi ini menekankan bahwa pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat melibatkan tindakan yang diambil untuk keuntungan korporasi secara keseluruhan. Klasifikasi tindak pidana korporasi kemudian membagi pelanggaran ini ke dalam kategori yang berbeda, seperti kejahatan finansial misalnya, penipuan akuntansi pelanggaran regulasi seperti pelanggaran hukum lingkungan, dan kejahatan keselamatan, seperti pelanggaran standar keselamatan kerja (Sullivan, 2021). Klasifikasi ini mempermudah pengidentifikasian dan penanganan pelanggaran berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan.
- b. Pertanggungjawaban pidana korporasi melibatkan konsep-konsep yang rumit, termasuk identifikasi pelaku, tindakan yang melanggar hukum, dan hubungan antara tindakan tersebut dan keuntungan korporasi (Hess, 2020). Konsep ini sering kali mengacu pada teori tanggung jawab kolektif, manajerial, atau *vicarious*. Dalam proses penetapan tanggung jawab, penting untuk menentukan sejauh mana tindakan individu dalam korporasi dapat ditelusuri kembali ke korporasi itu sendiri. Proses hukum untuk menuntut korporasi mencakup beberapa langkah penting, termasuk penyelidikan oleh badan pengawas, pengumpulan bukti, dan proses pengadilan. Pengajuan tuntutan, persidangan, dan akhirnya hukuman adalah bagian integral dari proses ini, yang melibatkan berbagai aspek administrasi hukum (Clark, 2022). Selama proses ini, bukti yang dikumpulkan dan cara tindakan pelanggaran diidentifikasi berperan penting dalam menentukan apakah korporasi dapat dikenakan sanksi pidana.
- c. Sanksi dan hukuman dalam kasus tindak pidana korporasi beragam, mencakup denda, sanksi administratif, atau perintah untuk melakukan perbaikan. Sanksi pidana juga dapat mencakup

pembatasan operasional atau pencabutan izin usaha (Jones, 2020). Penerapan hukuman pidana terhadap korporasi memerlukan penilaian dampak hukuman terhadap operasional dan reputasi korporasi. Dalam banyak kasus, penerapan hukuman juga mencakup mekanisme pemulihan, yang termasuk implementasi program kepatuhan untuk mencegah pelanggaran di masa depan (Roberts, 2020). Program ini sering kali diwajibkan sebagai bagian dari proses pemulihan setelah korporasi dikenai sanksi, dan bertujuan untuk memastikan bahwa korporasi melakukan perubahan yang diperlukan untuk mematuhi hukum dan mencegah pelanggaran di masa yang akan datang.

## **2. Aspek Etika dalam Tindak Pidana Korporasi**

Aspek etika dalam tindak pidana korporasi berfokus pada prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab sosial yang seharusnya membimbing perilaku korporasi. Kepatuhan etika, tanggung jawab sosial korporasi, dan pengaruh etika terhadap kepatuhan hukum adalah tiga elemen penting dalam konteks ini.

- a. Kepatuhan etika mengacu pada penerapan prinsip moral dalam kebijakan dan praktik bisnis sebuah korporasi. Prinsip etika seperti integritas, keadilan, dan transparansi sangat penting dalam pengambilan keputusan dan operasi sehari-hari perusahaan (Adams, 2020). Untuk memastikan bahwa semua karyawan mematuhi standar etika yang ditetapkan, banyak korporasi menerapkan program kepatuhan etika. Program ini biasanya mencakup pelatihan etika, pengembangan kode etik, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Pelatihan etika dirancang untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang prinsip-prinsip moral dan memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi situasi yang menantang secara etis. Kode etik, di sisi lain, adalah dokumen yang menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota organisasi. Mekanisme pelaporan pelanggaran memberikan saluran bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan, yang membantu dalam menjaga kepatuhan dan transparansi (Baker, 2020).
- b. Tanggung jawab sosial korporasi (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. CSR melibatkan upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan bisnis dan



mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara luas (Friedman, 2020). Implementasi CSR dapat mencakup berbagai kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Misalnya, perusahaan dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan, berinvestasi dalam proyek komunitas, atau memastikan bahwa rantai pasokan mematuhi standar etika. Program CSR sering kali diintegrasikan dalam strategi bisnis dan diawasi oleh dewan etik atau komite CSR, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktek CSR dijalankan dengan baik dan memenuhi tujuan sosial dan lingkungan yang telah ditetapkan (Clark, 2022).

- c. Pengaruh etika terhadap kepatuhan hukum juga merupakan aspek krusial. Keterkaitan antara etika dan hukum sering kali tampak jelas, karena kepatuhan etika biasanya mendahului kepatuhan hukum. Korporasi yang mematuhi standar etika tinggi cenderung juga mematuhi regulasi hukum, karena prinsip-prinsip moral sering mencerminkan nilai-nilai hukum yang berlaku (Sullivan, 2021). Dengan kata lain, etika yang kuat dapat berfungsi sebagai landasan untuk kepatuhan hukum yang lebih baik. Kepemimpinan etis berperan penting dalam membentuk budaya perusahaan yang mendukung kepatuhan hukum dan etika. Pemimpin yang menekankan pentingnya etika dalam pengambilan keputusan dan tindakan sehari-hari dapat membantu menciptakan lingkungan di mana tindak pidana lebih jarang terjadi dan perilaku yang sesuai dengan standar hukum dan etika dipromosikan (Jones, 2020). Kepemimpinan etis juga melibatkan penetapan contoh yang baik, di mana para pemimpin bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab, sehingga mempengaruhi perilaku karyawan di seluruh organisasi.

## **BAB III**

# **TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU**

---

---

Di era modern yang terus berkembang, hukum pidana Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru pada tahun 2023. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan sosial dan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. KUHP Baru memperkenalkan konsep-konsep baru serta mengubah definisi dan kategori tindak pidana yang ada, seiring dengan penyesuaian sanksi dan hukuman yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Perubahan ini meliputi penekanan pada prinsip proporsionalitas dan rehabilitasi, serta pengenalan jenis-jenis tindak pidana yang lebih relevan dengan konteks kekinian. Dengan pendekatan ini, KUHP Baru berupaya untuk tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk korban serta masyarakat. Pendahuluan ini akan menggali secara mendalam tentang pengertian, jenis-jenis tindak pidana, dan sanksi yang diatur dalam KUHP Baru, serta implikasinya bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **A. Pengertian Tindak Pidana dalam KUHP Baru**

Pada KUHP Baru yang mulai diberlakukan pada tahun 2023, terdapat pengertian dan definisi yang lebih terperinci tentang tindak pidana, menggantikan kerangka hukum lama dengan pendekatan yang lebih modern dan sistematis. Pengertian tindak pidana dalam KUHP Baru mengacu pada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Pembaharuan ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dari KUHP lama dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum pidana global serta kebutuhan sosial Indonesia.

## 1. Definisi Tindak Pidana

Definisi tindak pidana menurut Pasal 1 KUHP Baru mencakup berbagai elemen kunci yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Definisi ini berfokus pada tiga elemen utama: perbuatan dilarang, sanksi pidana, dan unsur-unsur tindak pidana.

- a. Perbuatan dilarang merupakan elemen pertama dari definisi tindak pidana. Menurut Pasal 1 KUHP Baru, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar larangan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ini mencakup tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam undang-undang khusus lainnya (Nugroho, 2023). Dengan kata lain, tidak setiap tindakan yang dianggap salah secara moral atau sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan hanya yang telah dinyatakan secara hukum sebagai pelanggaran. Penetapan larangan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai tindakan apa yang dianggap melanggar hukum dan berpotensi mendapatkan sanksi pidana.
- b. Elemen kedua dari definisi adalah sanksi pidana. Untuk setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, undang-undang menetapkan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau tindakan pidana tambahan lainnya. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta menegakkan norma-norma hukum yang berlaku (Hadi, 2023). Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Sanksi juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban serta keamanan dalam masyarakat.
- c. Elemen ketiga dalam definisi tindak pidana adalah unsur-unsur yang harus ada untuk menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana. Dalam KUHP Baru, tindak pidana ditentukan oleh unsur-unsur tertentu yang meliputi unsur perbuatan, unsur kesalahan, dan unsur dampak sosial. Unsur perbuatan merujuk pada tindakan konkret yang dilakukan oleh

pelaku yang melanggar hukum. Unsur kesalahan berkaitan dengan niat atau kesalahan dalam melakukan tindakan, yang berarti pelaku harus memiliki kesadaran dan kehendak untuk melanggar hukum. Terakhir, unsur dampak sosial mencakup akibat dari tindakan tersebut terhadap masyarakat atau individu lain, memastikan bahwa tindakan yang dikenakan sanksi pidana memiliki dampak yang cukup signifikan untuk dianggap sebagai tindak pidana (Siregar, 2023). Dengan adanya ketiga unsur ini, hukum pidana dapat memastikan bahwa sanksi pidana hanya diterapkan pada perbuatan yang memenuhi kriteria hukum yang telah ditetapkan, dan tidak digunakan secara sembarangan.

## **2. Pengembangan Definisi dalam KUHP Baru**

Pengembangan definisi tindak pidana dalam KUHP Baru menandai kemajuan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan mengadopsi pendekatan terpadu, menekankan unsur kesalahan, dan memperluas cakupan tindak pidana. Pendekatan terpadu dalam KUHP Baru melampaui pandangan sempit mengenai tindak pidana sebagai pelanggaran hukum semata, dan lebih memperhatikan aspek substansi serta dampak sosial dari perbuatan tersebut. Dengan mempertimbangkan niat jahat (*mens rea*) dan hasil dari perbuatan (*actus reus*), serta dampak terhadap masyarakat dan korban, KUHP Baru bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan relevan. Hal ini berarti bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, bukan hanya perlu diperhatikan apakah perbuatan tersebut melanggar hukum, tetapi juga bagaimana niat pelaku dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Aspek penting dari definisi tindak pidana dalam KUHP Baru adalah penekanan pada unsur kesalahan, yang mencakup niat jahat (*dolo*) atau kelalaian (*culpa*). Pendekatan ini merupakan perubahan signifikan dari KUHP lama yang sebelumnya kurang memberikan perhatian mendetail terhadap aspek kesalahan. Dalam KUHP Baru, kesalahan tidak hanya dilihat dari sudut pandang tindakan yang dilakukan, tetapi juga dari niat dan kesadaran pelaku terhadap tindakan tersebut. Niat jahat mengacu pada kesadaran dan kehendak untuk melakukan pelanggaran, sedangkan kelalaian merujuk pada kurangnya perhatian atau kewaspadaan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran. Penekanan pada unsur kesalahan ini memberikan dimensi tambahan dalam penilaian

tindak pidana, memastikan bahwa hukum pidana dapat diterapkan secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku (Susilo, 2023).

KUHP Baru memperluas cakupan tindak pidana dengan mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang tidak hanya melibatkan individu tetapi juga korporasi atau badan hukum lainnya. Perubahan ini mengakomodasi perkembangan hukum dan dinamika sosial yang melibatkan entitas korporasi. Dalam konteks ini, korporasi dapat dikenai tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja untuknya, termasuk tindakan yang melanggar hukum lingkungan, peraturan keuangan, atau standar keselamatan. Dengan memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, KUHP Baru mencerminkan perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial, serta tantangan baru yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana. Cakupan yang lebih luas ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran dan memastikan bahwa semua entitas yang terlibat dalam aktivitas ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban (Prasetyo, 2023).

### **3. Implikasi dari Definisi Baru**

Definisi baru dalam KUHP membawa implikasi signifikan bagi penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum di Indonesia. Pertama-tama, definisi yang lebih rinci dan terperinci memungkinkan penegakan hukum yang lebih adil dan konsisten. Dengan panduan yang jelas dalam menilai dan mengadili kasus pidana, hakim dan aparat penegak hukum dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terukur. KUHP Baru tidak hanya mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana tetapi juga memperjelas unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana. Hal ini memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya adil bagi pelaku tetapi juga bagi korban, karena semua pihak akan memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum (Arif, 2023).

Definisi tindak pidana yang komprehensif dalam KUHP Baru berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dengan menghindari penerapan hukum yang tidak proporsional. Dengan memastikan bahwa setiap tindakan pidana sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas, KUHP Baru mengurangi risiko penerapan hukuman

yang berlebihan atau tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan tetapi juga konteks dan niat pelaku, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, KUHP Baru mendukung penerapan hukum yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan keadilan (Wahyudi, 2023).

Penerapan definisi yang jelas dalam KUHP Baru juga berkontribusi pada kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi, yang pada gilirannya mendukung kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan adanya definisi yang tegas mengenai tindak pidana dan sanksinya, individu dan organisasi dapat lebih memahami batasan-batasan hukum dan risiko yang mungkin dihadapi jika melanggar hukum. Kepastian hukum ini membantu mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran mengenai penerapan hukum, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dalam konteks pelaku usaha, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak terjebak dalam ketidakpastian hukum yang dapat merugikan secara finansial dan reputasi (Kusnadi, 2023).

## **B. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam KUHP Baru**

Pada KUHP Baru yang diberlakukan pada tahun 2023, jenis-jenis tindak pidana mengalami pembaharuan dan penataan ulang yang signifikan dibandingkan dengan KUHP lama. Pembaharuan ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum pidana kontemporer dan dinamika sosial yang semakin kompleks. Penataan ulang ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan dan ketepatan dalam penerapan hukum pidana.

### **1. Kategori Tindak Pidana**

KUHP Baru membagi tindak pidana ke dalam kategori utama berdasarkan sifat dan dampaknya, yaitu tindak pidana terhadap individu, masyarakat, dan negara. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi, klasifikasi, dan penegakan hukum terhadap berbagai jenis pelanggaran. Kategori pertama, tindak pidana terhadap individu, **Criminal Act, Criminal Liability & Punishment**

mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik seperti penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. KUHP Baru memperinci jenis-jenis kekerasan ini dengan lebih jelas, memberikan panduan mengenai sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan tersebut (Hidayat, 2023). Selain itu, tindak pidana terhadap kesusilaan, seperti perbuatan cabul dan eksploitasi seksual, juga diatur dengan lebih detail. Hal ini bertujuan untuk melindungi norma-norma kesusilaan masyarakat dan memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini ditangani dengan serius (Susanto, 2023).

Kategori kedua adalah tindak pidana terhadap masyarakat, yang mencakup tindak pidana terhadap ketertiban umum dan tindak pidana ekonomi. Tindak pidana terhadap ketertiban umum termasuk kerusuhan, perusakan fasilitas umum, dan pengacauan, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. KUHP Baru menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum dan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran tersebut (Wahyudi, 2023). Sementara itu, tindak pidana ekonomi mencakup kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti penipuan, korupsi, dan pencucian uang. KUHP Baru mengakomodasi perkembangan terbaru dalam praktik ekonomi dan menyesuaikan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi yang semakin kompleks dan canggih (Yuliana, 2023).

Kategori terakhir adalah tindak pidana terhadap negara, yang mencakup tindak pidana terhadap keamanan negara dan tindak pidana administratif. Tindak pidana terhadap keamanan negara melibatkan pelanggaran yang dapat merusak stabilitas dan keamanan nasional, seperti pengkhianatan, spionase, dan terorisme. KUHP Baru memperjelas definisi tindak pidana ini dan menetapkan penanganan yang lebih tegas untuk ancaman yang dapat merusak integritas negara (Halim, 2023). Di sisi lain, tindak pidana administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan administratif negara, seperti pelanggaran terhadap regulasi dan peraturan pemerintah. KUHP Baru mengatur sanksi administratif dengan lebih rinci, mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dalam konteks administratif (Rahayu, 2023).

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam KUHP Baru**

Pada KUHP Baru, tindak pidana dikategorikan secara rinci untuk mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum, dengan penekanan pada karakteristik khusus dan dampak dari setiap jenis pelanggaran. Kategori utama ini meliputi tindak pidana umum, khusus, ekonomi, dan terhadap keamanan negara. Tindak pidana umum mencakup pelanggaran yang berhubungan dengan kekerasan fisik dan ancaman terhadap individu. Pembunuhan, sebagai salah satu tindak pidana umum, melibatkan tindakan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. KUHP Baru membedakan antara pembunuhan dengan niat jahat, seperti pembunuhan berencana, dan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang mungkin mengurangi tingkat kesalahan, seperti pembunuhan dalam keadaan panik atau tekanan (Nugroho, 2023). Sementara itu, penganiayaan mencakup kekerasan fisik yang tidak mengakibatkan kematian tetapi menyebabkan luka atau cedera. KUHP Baru memberikan perhatian pada intensitas kekerasan serta dampaknya, memastikan bahwa tindakan penganiayaan ditangani dengan proporsional sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan (Prasetyo, 2023).

Kategori tindak pidana khusus mencakup kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kejahatan yang berkaitan dengan keuangan. Korupsi adalah salah satu tindak pidana khusus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi. KUHP Baru memperjelas definisi korupsi dan menetapkan hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran terkait korupsi, sebagai upaya untuk memerangi tindakan tersebut secara lebih efektif (Siregar, 2023). Di sisi lain, pencucian uang adalah tindak pidana khusus yang melibatkan proses menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari kejahatan. KUHP Baru mencakup ketentuan yang lebih lengkap mengenai pencucian uang, termasuk sanksi yang terkait, untuk memudahkan penegakan hukum terhadap kejahatan ini (Arif, 2023).

Tindak pidana ekonomi mencakup pelanggaran yang terkait dengan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Penipuan, yang merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi, melibatkan tindakan manipulatif untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dari orang lain. KUHP Baru mengatur dengan rinci mengenai berbagai jenis penipuan dan hukuman yang dikenakan, memberikan panduan yang jelas bagi penegak hukum dan hakim dalam menangani kasus penipuan (Hadi, 2023).



Perdagangan gelap juga termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi, yang mencakup aktivitas perdagangan barang atau jasa ilegal. KUHP Baru memperbarui pengaturan terkait perdagangan gelap dengan memasukkan ketentuan tentang barang-barang yang dilarang, untuk mengatasi tantangan yang berkembang dalam perdagangan ilegal (Budi, 2023).

Kategori tindak pidana terhadap keamanan negara mencakup kejahatan yang dapat merusak stabilitas dan integritas negara. Terorisme, sebagai salah satu tindak pidana dalam kategori ini, melibatkan tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan atau gangguan serius pada keamanan negara. KUHP Baru memberikan definisi yang lebih jelas tentang terorisme dan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori ini, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap ancaman teroris (Kusnadi, 2023). Pengkhianatan juga termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap keamanan negara, melibatkan tindakan yang merugikan negara seperti bekerjasama dengan musuh negara atau merusak kepentingan nasional. KUHP Baru memperjelas bentuk-bentuk pengkhianatan dan sanksinya, untuk memastikan bahwa pelanggaran ini ditangani dengan serius dan sesuai dengan tingkat ancaman yang ditimbulkan (Wahyudi, 2023).

### **3. Perubahan dan Pembaharuan**

KUHP Baru membawa perubahan dan pembaharuan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Salah satu perubahan utama adalah penegasan unsur-unsur tindak pidana yang lebih detail. Dalam KUHP Baru, setiap tindak pidana didefinisikan dengan rinci, menyertakan unsur-unsur yang jelas seperti perbuatan (*actus reus*), niat jahat (*mens rea*), dan dampak sosial dari perbuatan tersebut (Nugroho, 2023). Hal ini bertujuan untuk mengurangi ambiguitas dan meningkatkan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Dengan penegasan yang lebih detail ini, hakim dan aparat penegak hukum memiliki panduan yang lebih jelas dalam menilai dan mengadili kasus-kasus pidana, sehingga dapat meminimalkan interpretasi yang subjektif dan memastikan bahwa setiap tindakan pidana dipertimbangkan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perubahan lain yang signifikan adalah pendekatan terhadap kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. KUHP Baru mengakomodasi kejahatan-kejahatan yang sebelumnya belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang, seperti kejahatan siber dan kejahatan yang terkait dengan penggunaan teknologi digital (Susanto, 2023). Dengan kemajuan teknologi yang pesat, bentuk-bentuk kejahatan baru seperti penipuan online, peretasan, dan penyebaran konten ilegal di internet menjadi semakin umum. KUHP Baru memasukkan ketentuan yang relevan untuk mengatasi jenis kejahatan ini, memberikan otoritas yang lebih besar kepada aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi dan media digital. Ini mencerminkan kebutuhan untuk memperbarui dan menyesuaikan hukum pidana dengan realitas baru yang dihadapi masyarakat modern, memastikan bahwa sistem hukum tetap efektif dan relevan dalam menghadapi tantangan yang muncul dari kemajuan teknologi.

Gambar 1. Penipuan Online



Sumber: *Jogja Polri*

KUHP Baru juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan perlindungan hak korban. Dalam sistem hukum pidana yang lama, fokus sering kali lebih berat pada pelaku tindak pidana, dengan kurangnya perhatian terhadap hak-hak dan kesejahteraan korban. KUHP Baru mengatasi kekurangan ini dengan memberikan hak-hak tertentu kepada korban dan memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban (Halim, 2023). Misalnya, undang-undang baru ini mencakup

ketentuan untuk kompensasi dan rehabilitasi bagi korban kejahatan, serta mekanisme untuk melibatkan korban dalam proses hukum secara lebih aktif. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi tentang proses hukum, hak untuk diwakili oleh penasihat hukum, dan hak untuk terlibat dalam upaya pemulihan. Dengan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak korban, KUHP Baru bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih berimbang dan responsif terhadap dampak kejahatan terhadap individu dan komunitas.

### **C. Sanksi dan Hukuman dalam KUHP Baru**

KUHP Baru yang diberlakukan pada tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam hal sanksi dan hukuman. Pembaharuan ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan perkembangan sosial serta kebutuhan masyarakat modern. Di bawah ini, akan dibahas berbagai aspek terkait sanksi dan hukuman dalam KUHP Baru, termasuk jenis-jenis hukuman, prinsip-prinsip penerapan, dan perbandingan dengan KUHP lama.

#### **1. Jenis-jenis Sanksi dan Hukuman**

Pada KUHP Baru, sistem sanksi dan hukuman dirancang untuk menangani tindak pidana dengan cara yang lebih terstruktur dan adaptif, mencerminkan perubahan dalam pendekatan hukum pidana. Jenis-jenis sanksi dalam undang-undang ini dibagi menjadi tiga kategori utama: hukuman pokok, hukuman tambahan, dan hukuman kewajiban, masing-masing dengan tujuan dan karakteristik yang berbeda.

- a. Hukuman pokok merupakan jenis sanksi yang paling mendasar dalam KUHP Baru, terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara adalah sanksi yang paling umum dan dijatuhkan berdasarkan durasi yang bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga seumur hidup, tergantung pada beratnya tindak pidana. KUHP Baru memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai kriteria penentuan durasi hukuman penjara, mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat jahat, kerugian yang ditimbulkan, dan keadaan pelaku (Halim, 2023). Ini memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan sifat dan dampak dari tindak pidana. Selain itu, pidana denda dikenakan untuk tindak pidana tertentu dan diukur dalam jumlah

uang. KUHP Baru memperkenalkan skema denda yang lebih fleksibel dan proporsional, memungkinkan penyesuaian jumlah denda berdasarkan kemampuan finansial pelaku serta dampak kejahatan yang dilakukan (Wahyudi, 2023). Dengan pendekatan ini, denda tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan keadilan yang lebih adil bagi pelaku dan masyarakat.

- b. KUHP Baru juga mencakup hukuman tambahan yang dirancang untuk melengkapi dan memperkuat sanksi utama. Salah satu hukuman tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, yang dapat mencakup hak untuk menduduki jabatan publik, hak untuk menjalankan profesi tertentu, atau hak-hak lain yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pencabutan hak ini bertujuan untuk mencegah pelaku dari mengulangi tindak pidana dan untuk memastikan perlindungan masyarakat (Susanto, 2023). Hukuman tambahan lainnya adalah pekerjaan sosial, di mana pelaku diwajibkan untuk melakukan kegiatan sosial tertentu sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat. Ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan (Arif, 2023).
- c. KUHP Baru mengatur hukuman kewajiban, termasuk restitusi dan perbaikan serta rehabilitasi. Restitusi mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Restitusi bertujuan untuk memberikan pemulihan kepada korban dan menegakkan keadilan dengan cara yang lebih langsung dan berbasis pada kebutuhan korban (Budi, 2023). Selain itu, KUHP Baru menekankan pentingnya program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, terutama untuk tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika atau perilaku adiktif lainnya. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu pelaku memperbaiki perilakunya dan mengurangi risiko recidivism, sehingga pelaku memiliki peluang yang lebih baik untuk reintegrasi sosial yang sukses setelah menjalani hukuman (Nugroho, 2023).

## 2. Prinsip-prinsip Penerapan Sanksi dan Hukuman

Pada penerapan sanksi dan hukuman menurut KUHP Baru, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana berfungsi secara adil, proporsional, dan efektif. Prinsip-prinsip ini meliputi keadilan, proporsionalitas, rehabilitasi dan reintegrasi, serta perlindungan masyarakat.

- a. Prinsip pertama adalah keadilan, yang menjadi dasar utama dalam penjatuhan hukuman. KUHP Baru menekankan bahwa hukuman harus sebanding dengan beratnya tindak pidana dan keadaan pelaku. Ini berarti bahwa setiap keputusan hukuman harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti niat pelaku, dampak dari kejahatan, dan keadaan yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman (Halim, 2023). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku menerima hukuman yang adil dan sesuai dengan sifat kejahatan yang dilakukan, serta mempertimbangkan kondisi pribadi yang mungkin mempengaruhi tingkat kesalahan. Dengan demikian, sistem hukum berusaha untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat luas.
- b. Prinsip proporsionalitas mengatur bahwa sanksi yang dikenakan harus sebanding dengan keseriusan tindak pidana dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat. KUHP Baru menetapkan kriteria yang lebih jelas untuk menentukan hukuman yang tepat, memastikan bahwa sanksi tidak lebih berat dari yang seharusnya dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan (Prasetyo, 2023). Prinsip ini bertujuan untuk menghindari hukuman yang tidak proporsional, yang dapat terjadi jika sanksi terlalu berat atau terlalu ringan dibandingkan dengan tingkat kesalahan dan dampaknya. Dengan adanya prinsip proporsionalitas, KUHP Baru berusaha untuk memberikan keadilan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi sebagai pengajaran dan *deterrent* yang efektif.
- c. Prinsip ketiga adalah rehabilitasi dan reintegrasi, yang mengedepankan pentingnya program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. KUHP Baru mengakui bahwa selain menghukum, penting juga untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku dan memfasilitasi reintegrasi ke dalam

masyarakat setelah menjalani hukuman (Arif, 2023). Ini termasuk penyediaan program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu pelaku mengatasi masalah yang mungkin menjadi penyebab kejahatan, seperti kecanduan atau gangguan mental. Fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi bertujuan untuk mengurangi risiko recidivism dan memberikan peluang bagi pelaku untuk membangun kembali kehidupan dengan cara yang konstruktif.

- d. Prinsip perlindungan masyarakat menekankan bahwa salah satu tujuan utama hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. KUHP Baru memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mencegahnya dari mengulangi tindak pidana dan menjaga keamanan masyarakat (Budi, 2023). Dengan menerapkan sanksi yang sesuai, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Prinsip ini mendukung tujuan pencegahan dengan memastikan bahwa hukuman tidak hanya bersifat penal tetapi juga berfungsi untuk melindungi masyarakat secara efektif.

### **3. Perbandingan dengan KUHP Lama**

Perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru mencerminkan sejumlah reformasi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang mencakup evolusi dalam jenis hukuman, penekanan pada rehabilitasi, dan fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih modern, humanis, dan adil. Salah satu perubahan paling mencolok adalah penambahan jenis hukuman yang baru. KUHP baru memperkenalkan beberapa jenis hukuman tambahan dan kewajiban yang tidak ada dalam KUHP lama, seperti hukuman pekerjaan sosial dan restitusi. Hukuman pekerjaan sosial mengharuskan pelaku untuk melakukan kegiatan sosial sebagai kompensasi kepada masyarakat, yang mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Halim, 2023). Restitusi, di sisi lain, mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Perubahan ini mencerminkan pendekatan yang lebih modern dan berbasis pada kebutuhan rehabilitasi dan kompensasi, memperlihatkan pergeseran dari fokus yang semata-mata pada hukuman penjara yang bersifat retributif. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya

menghukum pelaku tetapi juga memperbaiki dampak yang ditimbulkan dan membantu korban pulih dari kerugian.

Perubahan juga terlihat dalam penegasan prinsip rehabilitasi yang lebih besar dalam KUHP baru dibandingkan dengan KUHP lama. KUHP lama cenderung lebih fokus pada hukuman penjara sebagai sanksi utama, dengan sedikit perhatian pada aspek rehabilitasi pelaku. Sebaliknya, KUHP baru menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi, dengan menyediakan program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu pelaku mengatasi masalah yang mungkin menyebabkan kejahatan, seperti kecanduan atau gangguan mental (Nugroho, 2023). Ini menunjukkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana menuju pendekatan yang lebih humanis dan preventif, yang berupaya untuk mengurangi risiko recidivism dan membantu pelaku kembali ke masyarakat dengan cara yang konstruktif.

KUHP baru memperkenalkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penjatuhan hukuman, yang tidak terlihat dalam KUHP lama. KUHP baru memungkinkan penyesuaian sanksi berdasarkan berbagai faktor, seperti kemampuan finansial pelaku dan dampak kejahatan (Wahyudi, 2023). Misalnya, dalam hal pidana denda, KUHP baru menawarkan skema yang lebih fleksibel dan proporsional, yang memungkinkan penyesuaian jumlah denda berdasarkan kondisi finansial pelaku. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan proporsional, menghindari sanksi yang terlalu berat atau terlalu ringan dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampaknya. Fleksibilitas ini membantu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban hukumnya.

## **BAB IV**

# **UNDANG-UNDANG KHUSUS YANG MENGATUR KORPORASI**

---

---

Undang-undang khusus yang mengatur korporasi berperan penting dalam memastikan kepatuhan korporasi terhadap standar hukum yang berlaku dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab. Undang-undang ini dirancang untuk menangani berbagai aspek operasional korporasi yang tidak tercakup secara rinci dalam hukum pidana umum, seperti perlindungan lingkungan, pasar modal, dan perlindungan konsumen. Misalnya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi. Selain itu, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur kegiatan di sektor keuangan untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar. Implementasi undang-undang khusus ini melibatkan pengawasan yang ketat, pemberian sanksi bagi pelanggar, dan kerjasama antar lembaga penegak hukum untuk memastikan efektivitas penegakan hukum. Tantangan dalam implementasi ini termasuk koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas kasus, namun dengan pendekatan yang proaktif dan kerjasama yang kuat, tujuan hukum yang adil dan transparan dapat tercapai.

### **A. Pengertian dan Ruang Lingkup Undang-Undang Khusus**

Undang-undang khusus adalah regulasi yang dibuat untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari kegiatan korporasi yang tidak tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini diperlukan untuk menangani kejahatan yang lebih spesifik dan kompleks, yang seringkali melibatkan teknologi baru, ekonomi global, dan berbagai bentuk interaksi korporasi yang tidak



tradisional. Ginting (2023) menyatakan bahwa undang-undang khusus dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUHP yang tidak dapat menjangkau seluruh jenis kejahatan korporasi modern.

Undang-undang khusus mencakup berbagai bidang yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti kejahatan ekonomi, perlindungan konsumen, teknologi informasi, lingkungan hidup, dan kesehatan publik. Tujuan utama dari undang-undang khusus adalah untuk memberikan aturan yang lebih rinci dan spesifik mengenai tanggung jawab dan kewajiban korporasi, serta sanksi yang berlaku jika terjadi pelanggaran (Hidayat, 2023). Dengan demikian, undang-undang khusus bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat KUHP dengan menyediakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terperinci. Ruang lingkup undang-undang khusus mencakup berbagai bidang yang dianggap penting untuk diatur secara spesifik karena karakteristiknya yang unik dan kompleks. Berikut adalah beberapa bidang utama yang diatur oleh undang-undang khusus di Indonesia:

### **1. Kejahatan Ekonomi dan Pasar Modal**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan salah satu contoh undang-undang khusus di Indonesia yang dirancang untuk mengatur dan mengelola kegiatan pasar modal secara komprehensif. Undang-undang ini berperan krusial dalam memastikan integritas dan transparansi pasar modal, yang pada gilirannya melindungi investor dan memastikan keberlangsungan pasar yang efisien. Ruang lingkup undang-undang ini meliputi berbagai aspek penting dari pasar modal. Salah satunya adalah penerbitan saham. Undang-undang ini mengatur proses dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menerbitkan saham kepada publik. Proses ini mencakup pemenuhan persyaratan administratif dan informasi yang harus disampaikan kepada calon investor, memastikan bahwa memiliki akses yang memadai untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tidak ada penyalahgunaan dalam penerbitan saham yang bisa merugikan investor.

Undang-undang ini menetapkan kewajiban pelaporan bagi perusahaan publik. Perusahaan yang terdaftar di bursa saham wajib mengungkapkan informasi keuangan secara transparan dan tepat waktu kepada publik. Ini termasuk laporan tahunan, laporan triwulanan, dan

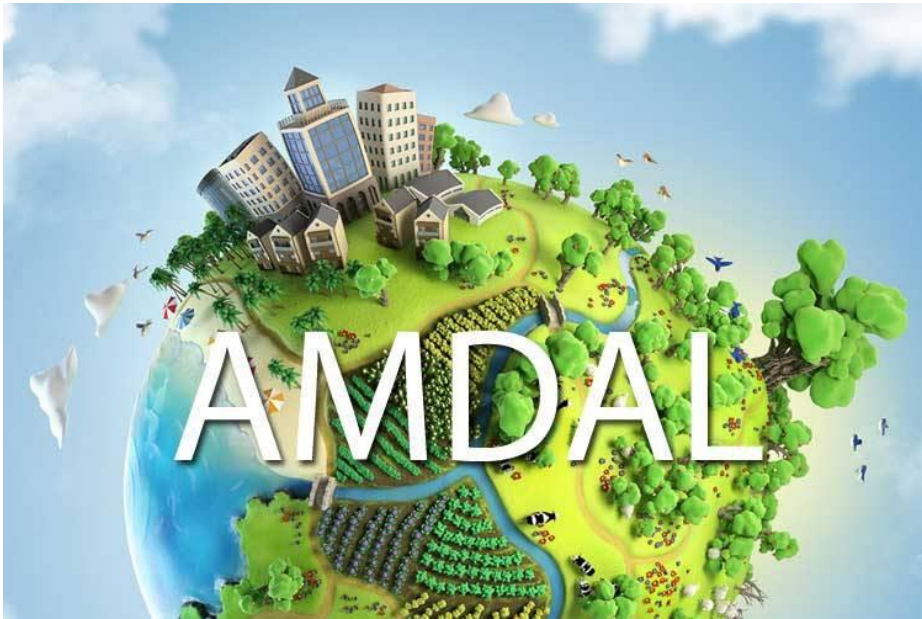
pengungkapan material yang dapat memengaruhi harga saham. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga keterbukaan informasi di pasar modal, memungkinkan investor untuk membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini. Keterbukaan informasi ini adalah elemen kunci dalam mencegah praktik-praktik tidak etis dan manipulasi pasar yang dapat merugikan investor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sentral dalam pengawasan pasar modal. Berdasarkan undang-undang ini, OJK bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh aktivitas di pasar modal untuk memastikan bahwa semua peraturan dan ketentuan dipatuhi. OJK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, menyelidiki pelanggaran, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan peran ini, OJK bertujuan untuk menjaga integritas pasar, melindungi kepentingan investor, dan mencegah terjadinya praktik-praktik curang atau manipulatif yang dapat merusak kepercayaan pasar.

## **2. Perlindungan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan tonggak penting dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi lingkungan dan mengatur tanggung jawab korporasi dalam mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan. Salah satu aspek kunci dari UUPPLH adalah ketentuan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan.

AMDAL adalah instrumen penting dalam UUPPLH yang digunakan untuk mengevaluasi potensi dampak dari suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan sebelum izin diberikan. Proses AMDAL melibatkan identifikasi, prediksi, dan penilaian dampak potensial terhadap lingkungan dari proyek-proyek besar atau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan adanya AMDAL, perusahaan diharapkan dapat mengidentifikasi risiko lingkungan sejak awal dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya. Proses ini memastikan bahwa semua aspek lingkungan diperhitungkan dan dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum proyek dimulai.

Gambar 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan



Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Tasikmalaya*

UUPPLH juga mengatur izin lingkungan, yang merupakan izin resmi yang harus diperoleh oleh perusahaan sebelum memulai kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan. Izin lingkungan ini tidak hanya mencakup pemenuhan persyaratan teknis dan administratif tetapi juga kewajiban untuk mengikuti rekomendasi yang diberikan dalam proses AMDAL. Dengan adanya persyaratan izin ini, UUPPLH bertujuan untuk memastikan bahwa korporasi menjalankan operasinya sesuai dengan standar lingkungan yang ketat dan mematuhi regulasi yang berlaku. Suharto (2023) menjelaskan bahwa tujuan utama dari UUPPLH adalah untuk memastikan bahwa korporasi mematuhi standar lingkungan yang ketat dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan. Undang-undang ini menekankan pentingnya tanggung jawab korporasi dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Dengan memberlakukan ketentuan yang jelas mengenai AMDAL dan izin lingkungan, UUPPLH mengharapkan adanya perubahan perilaku di kalangan pelaku industri sehingga lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan.

### **3. Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum yang penting dalam mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ini dirancang untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung perkembangan teknologi informasi sekaligus melindungi berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Menurut Nugroho (2023), UU ITE mencakup berbagai aspek penting, termasuk tanda tangan elektronik, kontrak elektronik, dan tindak pidana terkait penggunaan teknologi informasi, serta perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Salah satu aspek utama dari UU ITE adalah pengaturan tentang tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik diakui sebagai pengganti tanda tangan fisik dalam dokumen elektronik, sehingga memudahkan proses verifikasi dan otentikasi dalam transaksi digital. UU ITE menetapkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, asalkan memenuhi persyaratan teknis dan legal yang telah ditetapkan. Ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik, memastikan bahwa dokumen elektronik dapat dipertanggungjawabkan secara sah.

UU ITE juga mengatur kontrak elektronik, yang merupakan perjanjian yang dibuat dan disetujui melalui media elektronik. Kontrak elektronik memudahkan transaksi bisnis dan legal secara online, dan UU ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan dan penegakan kontrak yang dilakukan melalui platform digital. Dengan adanya pengaturan ini, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik dapat memiliki keyakinan hukum bahwa perjanjiannya sah dan dapat ditegakkan, sama halnya dengan kontrak yang dibuat secara konvensional. UU ITE juga berfokus pada aspek perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Dalam era digital yang semakin maju, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. UU ITE mengatur kewajiban bagi pengelola data untuk melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah dan penggunaan yang merugikan. Ini termasuk kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pribadi yang dikumpulkan dari individu. Selain itu, UU ini juga menetapkan tindakan hukum bagi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.

#### **4. Ketenagakerjaan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan kerangka hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha di Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban kedua belah pihak serta memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja. Menurut Mulyadi (2023), undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk perjanjian kerja, upah, kondisi kerja, dan penyelesaian perselisihan industrial. Salah satu elemen kunci dari UU Ketenagakerjaan adalah perjanjian kerja, yang merupakan kontrak formal antara pekerja dan pengusaha yang mengatur syarat-syarat pekerjaan. Perjanjian ini dapat bersifat tetap atau sementara dan harus memuat ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. UU ini mengatur dengan rinci tentang elemen-elemen yang harus ada dalam perjanjian kerja, termasuk deskripsi pekerjaan, jangka waktu perjanjian, dan hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan tidak akan terjadi ketidakpastian atau sengketa terkait syarat-syarat kerja di kemudian hari.

Upah adalah aspek penting lain yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Undang-undang ini menetapkan ketentuan mengenai upah minimum yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja. Upah harus sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan pengusaha tidak diperbolehkan membayar upah di bawah standar tersebut. UU ini juga mencakup aturan mengenai tunjangan dan kompensasi tambahan yang mungkin diterima pekerja, seperti tunjangan kesehatan, transportasi, dan lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja menerima imbalan yang layak atas pekerjaan yang dilakukan. Kondisi kerja juga menjadi fokus utama dari UU Ketenagakerjaan. Undang-undang ini menetapkan standar untuk lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta hak pekerja terkait fasilitas dan perlindungan di tempat kerja. Ini termasuk peraturan mengenai jam kerja, istirahat, dan cuti, serta perlindungan terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja. UU ini mengharuskan pengusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan, serta melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan.

## **5. Perbankan dan Keuangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) merupakan regulasi krusial yang mengatur pengawasan sektor perbankan dan keuangan di Indonesia. UU ini dirancang untuk memastikan stabilitas, integritas, dan transparansi sistem keuangan nasional, sehingga dapat mencegah krisis finansial dan melindungi kepentingan masyarakat serta investor. Seperti yang dijelaskan oleh Widodo (2023), undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengawasan bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Salah satu tujuan utama dari UU OJK adalah menjamin stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, OJK memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan untuk memastikan bahwa beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan ini mencakup analisis risiko dan kesehatan keuangan dari bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dengan memantau kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, OJK bertujuan untuk mencegah potensi masalah yang dapat mengancam kestabilan sistem keuangan, seperti kegagalan bank atau ketidakstabilan pasar.

UU OJK juga menekankan pentingnya integritas sistem keuangan. Integritas ini mencakup keandalan dan transparansi dalam operasional lembaga keuangan. OJK diberi wewenang untuk menetapkan aturan dan standar yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga tersebut, termasuk kewajiban pelaporan dan transparansi informasi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan praktik-praktik yang tidak etis atau merugikan dapat dihindari, dan semua pihak yang terlibat dalam sektor keuangan dapat beroperasi dengan cara yang adil dan jujur. UU OJK juga memberikan perhatian khusus pada pengawasan bank. Bank merupakan elemen kunci dalam sistem keuangan, dan pengawasannya penting untuk memastikan bahwa tidak hanya mematuhi peraturan tetapi juga menjalankan praktik yang sehat dan berkelanjutan. OJK bertanggung jawab untuk memantau kinerja bank, termasuk kualitas aset, likuiditas, dan manajemen risiko. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan bank dapat berfungsi secara optimal dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

## B. Contoh-Contoh Undang-Undang Khusus

Undang-undang khusus dibuat untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari kegiatan korporasi yang tidak tercakup dalam KUHP. Berikut ini adalah beberapa contoh undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur berbagai bidang:

### 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah sebuah regulasi penting yang mengatur berbagai aspek pasar modal di Indonesia, dengan tujuan utama melindungi investor dan memastikan keterbukaan informasi. Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan lingkungan pasar modal yang transparan, adil, dan efisien, serta mencegah praktik-praktik penipuan dan manipulasi yang dapat merugikan para investor. Dalam hal ini, UU Pasar Modal mengatur beberapa aspek kunci, termasuk penerbitan saham, kewajiban pelaporan perusahaan publik, dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan.

Salah satu aspek penting dari UU Pasar Modal adalah regulasi penerbitan saham. Penerbitan saham adalah proses di mana perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya, atau yang dikenal sebagai *Initial Public Offering* (IPO). Undang-undang ini menetapkan ketentuan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam proses penerbitan saham, termasuk persyaratan informasi yang harus diungkapkan kepada calon investor. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa investor memiliki akses ke informasi yang memadai untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi. Dengan adanya aturan ini, diharapkan dapat mengurangi risiko informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi investor.

Kewajiban pelaporan perusahaan publik juga diatur secara rinci dalam undang-undang ini. Perusahaan publik, yang sahamnya diperdagangkan di bursa, diwajibkan untuk secara rutin melaporkan kinerja keuangan dan informasi relevan lainnya kepada publik. Laporan ini mencakup laporan tahunan, laporan kuartalan, dan pengungkapan informasi material yang dapat mempengaruhi harga saham. Kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga investor dapat memantau kesehatan keuangan perusahaan dan membuat keputusan investasi yang lebih baik.



Undang-undang ini juga menetapkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas utama di pasar modal. OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur seluruh aktivitas pasar modal, termasuk pendaftaran dan pemantauan kegiatan perusahaan, serta tindakan preventif dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua peserta pasar mematuhi peraturan yang berlaku dan bahwa pasar modal beroperasi dengan cara yang adil dan transparan. Dengan adanya pengawasan dari OJK, diharapkan dapat terwujud pasar modal yang berintegritas tinggi dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.

## **2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah sebuah regulasi yang dirancang untuk mengatur tanggung jawab korporasi dalam melindungi lingkungan dan mencegah pencemaran. UUPPLH mencerminkan komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan industri dan usaha tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah ketentuan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL adalah sebuah proses evaluasi yang wajib dilakukan sebelum memulai proyek-proyek besar yang berpotensi berdampak signifikan terhadap lingkungan. Proses ini melibatkan identifikasi, prediksi, dan evaluasi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari suatu kegiatan, serta penetapan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Dengan adanya AMDAL, diharapkan bahwa setiap proyek dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungannya secara menyeluruh dan meminimalisir kerusakan yang mungkin ditimbulkan.

Izin lingkungan juga merupakan komponen kunci dalam UUPPLH. Undang-undang ini mewajibkan setiap perusahaan atau individu yang akan melakukan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan. Proses perolehan izin ini melibatkan evaluasi mendalam mengenai potensi dampak lingkungan dari kegiatan tersebut dan komitmen untuk mengikuti standar pengelolaan lingkungan yang ditetapkan. Izin lingkungan berfungsi sebagai jaminan bahwa kegiatan usaha yang



dilakukan telah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang ditetapkan dan bahwa perusahaan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas lingkungan.

Suharto (2023) menjelaskan bahwa UUPPLH bertujuan untuk memastikan bahwa korporasi mematuhi standar lingkungan yang ketat. Hal ini mencakup kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan program-program pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran udara dan air, serta konservasi sumber daya alam. Undang-undang ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Korporasi diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga berinovasi dalam mengimplementasikan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

### **3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah regulasi penting yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, undang-undang ini memiliki peran krusial dalam mengatur berbagai aspek terkait dengan teknologi informasi dan perlindungan data pribadi. UU ITE dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik tidak hanya sah dan terjamin keamanannya, tetapi juga melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan teknologi.

Salah satu aspek utama dari UU ITE adalah pengaturan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik diakui sebagai alat untuk otentikasi dan validasi dalam transaksi elektronik, menggantikan tanda tangan manual yang sering digunakan dalam dokumen fisik. Undang-undang ini memastikan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan tradisional, selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini mempermudah proses transaksi dan kontrak secara online, memberikan kepraktisan dan efisiensi dalam berbisnis dan berkomunikasi.

UU ITE juga mengatur tentang kontrak elektronik, yang merupakan kesepakatan yang dibuat dan disetujui secara elektronik. Kontrak elektronik mencakup berbagai transaksi, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga perjanjian kerja dan sewa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk kontrak-kontrak tersebut, memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui media elektronik sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya ketentuan ini, pelaku usaha dan individu dapat melakukan transaksi dengan lebih aman dan nyaman, karena terdapat kepastian hukum mengenai keberlakuan kontrak yang dilakukan secara digital.

Pada perlindungan data pribadi dan keamanan siber, UU ITE memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan informasi pribadi dan keamanan data. Undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna. Ini termasuk pengaturan mengenai bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, serta hak-hak individu untuk mengakses dan mengontrol informasi pribadi. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi individu dari risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan kejahatan siber yang dapat merugikan.

UU ITE juga mencakup tindakan pidana terkait penggunaan teknologi informasi, seperti penipuan elektronik, pencurian data, dan penyebaran konten ilegal. Undang-undang ini menetapkan sanksi bagi pelanggar yang terlibat dalam kejahatan siber, seperti denda dan hukuman penjara. Ini adalah langkah penting dalam menanggulangi ancaman digital dan menjaga keamanan transaksi serta komunikasi elektronik. Dengan adanya ketentuan pidana ini, diharapkan dapat menekan angka kejahatan siber dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Gambar 3. Keamanan Siber



Sumber: *Airlangga*

Nugroho (2023) menekankan bahwa UU ITE adalah alat penting dalam menghadapi tantangan era digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, undang-undang ini bukan hanya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi, tetapi juga memastikan integritas dan keamanan sistem elektronik secara keseluruhan. Dengan melindungi hak-hak individu dan menetapkan standar untuk keamanan siber, UU ITE berkontribusi pada pembentukan lingkungan digital yang lebih aman, transparan, dan terpercaya. Undang-undang ini mencerminkan upaya pemerintah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menjawab kebutuhan serta tantangan yang muncul dalam dunia digital.

#### **4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan regulasi fundamental yang mengatur hubungan industrial di Indonesia antara pekerja dan pengusaha. Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis dengan menetapkan ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Mulyadi (2023) menjelaskan bahwa undang-undang ini berperan penting dalam mengatur berbagai aspek

penting dalam dunia ketenagakerjaan, termasuk perjanjian kerja, upah, kondisi kerja, serta penyelesaian perselisihan industrial.

Salah satu aspek utama dari Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah perjanjian kerja. Undang-undang ini mengatur tentang jenis-jenis perjanjian kerja, seperti perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara, sedangkan PKWTT lebih sesuai untuk hubungan kerja yang bersifat permanen. Undang-undang ini memastikan bahwa perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis dan memuat ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk masa percobaan, jangka waktu perjanjian, dan hak-hak pekerja seperti cuti dan tunjangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari ambiguitas dan sengketa di kemudian hari.

Pada upah, Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pengusaha harus membayar upah pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh kurang dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Upah minimum ini ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan pertimbangan ekonomi lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang struktur dan skala upah, tunjangan, serta pembayaran lembur. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa pekerja menerima kompensasi yang adil atas pekerjaan yang dilakukan dan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi pekerja.

Kondisi kerja juga diatur secara rinci dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai lingkungan kerja yang sehat dan aman, jam kerja, istirahat, dan hak-hak lain yang terkait dengan kesejahteraan pekerja. Pengusaha diwajibkan untuk menyediakan fasilitas dan perlindungan yang memadai untuk memastikan bahwa tempat kerja memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini termasuk kewajiban untuk menyediakan pelatihan keselamatan, peralatan pelindung diri, dan melakukan evaluasi risiko secara berkala. Penyelesaian perselisihan industrial adalah aspek penting lainnya dari undang-undang ini. Undang-undang ini menetapkan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pengusaha melalui mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan hubungan industrial. Tujuannya adalah untuk memberikan jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak dan menjaga stabilitas hubungan kerja. Proses ini dirancang

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik berkepanjangan dan memberikan solusi yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan.

### **5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) adalah regulasi krusial yang dirancang untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan dan keuangan di Indonesia. UU ini dibentuk dengan tujuan utama untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, serta melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Widodo (2023) menekankan bahwa undang-undang ini memiliki cakupan yang luas, meliputi peraturan tentang pengawasan bank, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Salah satu aspek utama dari UU OJK adalah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung atas pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan seluruh lembaga keuangan di Indonesia, mulai dari bank umum hingga lembaga pembiayaan non-bank. Dengan adanya OJK, diharapkan pengawasan terhadap industri keuangan menjadi lebih terintegrasi dan komprehensif, mengurangi potensi risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional.

Pada konteks pengawasan bank, UU OJK menetapkan peraturan yang mengatur berbagai aspek operasional perbankan, termasuk perizinan, kepatuhan terhadap standar prudensial, dan perlindungan terhadap simpanan nasabah. OJK memiliki wewenang untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap bank-bank yang beroperasi di Indonesia, serta memberikan sanksi kepada bank yang melanggar ketentuan yang berlaku. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan prinsip kehati-hatian, sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Selain bank, UU OJK juga mengatur perusahaan asuransi dan lembaga keuangan lainnya. Untuk perusahaan asuransi, OJK bertugas mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan mengenai perlindungan konsumen, termasuk ketentuan tentang transparansi produk asuransi, kewajiban penyampaian informasi yang jelas kepada nasabah, dan pengelolaan dana asuransi. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi

memberikan layanan yang adil dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta melindungi hak-hak pemegang polis.

UU OJK juga mencakup peraturan tentang lembaga keuangan non-bank, seperti lembaga pembiayaan dan pasar modal. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa ia beroperasi secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Misalnya, dalam konteks pasar modal, OJK berwenang untuk mengatur kegiatan transaksi dan perdagangan efek, serta memastikan bahwa pasar modal berfungsi dengan efisien dan adil. Selain pengawasan dan regulasi, UU OJK juga menekankan perlindungan konsumen jasa keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perlindungan hak-hak konsumen, termasuk penyediaan informasi yang akurat dan transparan tentang produk keuangan, serta penanganan pengaduan dari konsumen. Melalui berbagai kebijakan dan regulasi, OJK bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan layanan yang berkualitas dan tidak dirugikan oleh praktik-praktik yang tidak adil atau manipulatif.

### **C. Implementasi Undang-Undang Khusus dalam Penegakan Hukum**

Implementasi undang-undang khusus dalam penegakan hukum terhadap korporasi memerlukan kerangka kerja yang komprehensif dan efektif. Hal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari penegakan peraturan hingga koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan. Implementasi yang baik dapat memastikan bahwa korporasi patuh terhadap peraturan yang ada, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan. Berikut ini adalah beberapa faktor kunci dalam implementasi undang-undang khusus dalam penegakan hukum:

#### **1. Penegakan Peraturan**

Penegakan peraturan merupakan aspek penting dalam memastikan kepatuhan terhadap berbagai undang-undang yang mengatur aktivitas korporasi dan sektor-sektor kritis lainnya. Salah satu elemen kunci dari penegakan peraturan adalah pengawasan dan pengendalian. Undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kegiatan korporasi untuk memastikan bahwa mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan.

Pengawasan ini dilakukan oleh badan-badan yang berwenang sesuai dengan bidangnya. Untuk sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sentral dalam memastikan bahwa kegiatan di pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum. OJK bertugas memantau transaksi, memeriksa laporan keuangan, dan menilai kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Begitu juga dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengawasi produk-produk kesehatan dan makanan untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kepatuhan terhadap standar regulasi. BPOM melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasar, termasuk pemeriksaan kualitas dan keamanan, untuk melindungi konsumen dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa korporasi tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga beroperasi dengan etika yang tinggi. Dengan adanya lembaga pengawas yang aktif, proses pengendalian terhadap kepatuhan hukum menjadi lebih sistematis dan terstruktur, sehingga mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Namun, pengawasan saja tidak cukup untuk memastikan kepatuhan. Implementasi yang efektif juga memerlukan adanya sanksi dan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, misalnya, mencakup ketentuan mengenai sanksi administratif dan pidana bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan. Sanksi administratif dapat berupa denda, pencabutan izin, atau tindakan korektif yang harus diambil oleh pelanggar. Sementara itu, sanksi pidana dapat melibatkan hukuman penjara atau denda yang lebih berat untuk pelanggaran serius.

## **2. Koordinasi Antar Lembaga**

Koordinasi antar lembaga berperan krusial dalam penegakan hukum terhadap korporasi, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan berbagai aspek hukum dan peraturan. Kerjasama antar lembaga penegak hukum adalah salah satu elemen kunci untuk

memastikan efektivitas penegakan hukum. Koordinasi yang baik antara lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting dalam mengatasi kasus-kasus korporasi yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi hukum. Misalnya, dalam kasus kejahatan lingkungan, seperti pencemaran atau pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan, kerjasama yang sinergis antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian, dan Kejaksaan sangat diperlukan. KLHK sebagai lembaga yang mengatur kebijakan lingkungan berperan dalam memberikan data dan laporan terkait pelanggaran lingkungan, sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan menangani aspek penyelidikan dan penuntutan kasus. Kerjasama ini memastikan bahwa setiap lembaga dapat mengoptimalkan fungsi dan wewenangnya untuk mencapai penegakan hukum yang efektif.

Pada praktiknya, koordinasi antar lembaga ini melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari pembagian informasi dan sumber daya hingga penyusunan strategi penanganan kasus. Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan korporasi besar, KPK dapat bekerja sama dengan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, sementara Kejaksaan berperan dalam penuntutan hukum di pengadilan. Tanpa koordinasi yang baik, proses penegakan hukum dapat terhambat, dan kasus-kasus kompleks ini bisa sulit untuk ditangani secara menyeluruh. Koordinasi yang efektif juga dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Pelatihan dan kapasitas lembaga penegak hukum juga sangat penting dalam memastikan implementasi hukum yang efektif. Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai penanganan kejahatan korporasi dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan aparat dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menangani kasus-kasus yang melibatkan korporasi. Pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam tentang aspek-aspek hukum yang relevan, teknik investigasi yang canggih, dan pengetahuan tentang praktik korporasi yang kompleks.

### **3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan**

Keterlibatan pemangku kepentingan berperan krusial dalam memastikan pengawasan dan penegakan hukum terhadap korporasi. Peran masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan



aspek penting dalam sistem pengawasan ini. Masyarakat umum, sebagai pihak yang sering kali langsung terdampak oleh kegiatan korporasi, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa praktik bisnis tidak merugikan lingkungan atau kesehatan publik. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan pelanggaran atau ketidakberesan yang diamati dapat menjadi alat deteksi dini yang berharga bagi pemerintah. LSM, sebagai organisasi non-pemerintah yang sering kali memiliki fokus pada isu-isu tertentu seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, atau keadilan sosial, juga berperan sebagai pengawas independen yang kritis. Tidak hanya memberikan informasi dan data kepada pihak berwenang tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga penegak hukum.

Peran media dalam pengawasan korporasi juga sangat signifikan. Media massa, melalui pelaporan investigatifnya, dapat mengungkap pelanggaran yang mungkin tidak terdeteksi oleh lembaga penegak hukum atau masyarakat luas. Jurnalis yang melakukan investigasi mendalam sering kali memiliki akses ke informasi yang tidak tersedia bagi publik atau pihak berwenang, dan ia dapat mengungkapkan praktik-praktik yang mencurigakan atau ilegal yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian dan laporan yang dipublikasikan oleh media tidak hanya memberikan informasi kepada publik tetapi juga menekan pihak berwenang untuk bertindak cepat dan tegas. Ketika media mengungkap kasus-kasus pelanggaran yang besar, tekanan publik yang muncul dari pemberitaan tersebut sering kali mendorong lembaga penegak hukum untuk meningkatkan tindakannya dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

#### **4. Tantangan dan Solusi**

Penegakan hukum terhadap korporasi sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Kasus-kasus yang melibatkan korporasi, terutama yang berskala besar dan kompleks, sering kali memerlukan alokasi sumber daya yang signifikan, baik dalam hal waktu, tenaga, maupun dana. Keterbatasan ini bisa menghambat efektivitas penegakan hukum, terutama ketika lembaga penegak hukum harus menangani banyak kasus secara bersamaan. Selain itu, kompleksitas kasus korporasi, yang sering melibatkan struktur organisasi yang rumit dan transaksi keuangan yang

berlapis, membuat proses penyelidikan dan pengumpulan bukti menjadi semakin menantang. Kejahatan korporasi sering kali melibatkan teknologi tinggi atau praktik yang melintasi batas negara, menambah tingkat kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang memadai untuk membuktikan kesalahan.

Tantangan lain yang signifikan adalah hambatan hukum, yang mencakup batasan-batasan dalam undang-undang atau peraturan yang ada. Kadang-kadang, undang-undang yang berlaku tidak cukup komprehensif atau tidak sesuai dengan perkembangan terbaru dalam praktik korporasi, sehingga menghambat proses penegakan hukum. Misalnya, peraturan yang tidak memadai dalam mengatasi kejahatan siber atau transaksi lintas negara bisa menjadi penghalang dalam menangani pelanggaran yang melibatkan teknologi mutakhir atau struktur bisnis internasional.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum melalui pelatihan dan pengembangan teknologi sangat penting. Pelatihan khusus dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kompleks, terutama yang melibatkan teknologi tinggi atau aspek internasional. Selain itu, investasi dalam teknologi canggih seperti perangkat lunak analisis data dan forensik digital dapat membantu dalam pengumpulan dan analisis bukti yang lebih efisien. Penggunaan teknologi ini memungkinkan penegak hukum untuk memproses informasi dengan lebih cepat dan akurat, serta mendeteksi pola-pola yang mungkin terlewatkan dalam investigasi manual.

## **5. Studi Kasus Implementasi Undang-Undang Khusus**

Studi kasus mengenai implementasi undang-undang khusus di Indonesia memberikan gambaran nyata tentang bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan dalam situasi yang kompleks dan sering kali melibatkan berbagai lembaga. Salah satu contoh penting adalah kasus korupsi di sektor perbankan, khususnya kasus Bank Century. Kasus ini membahas betapa pentingnya pengawasan ketat dan kerjasama antar lembaga dalam mengatasi kejahatan yang melibatkan sektor keuangan. Bank Century terlibat dalam skandal besar terkait penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada kestabilan sistem keuangan. Dalam kasus ini, implementasi UU OJK

berperan krusial dalam mengawasi dan menilai dampak pelanggaran yang terjadi.

Kerjasama antara KPK, Kepolisian, dan OJK sangat penting dalam mengungkap dan menindak pelanggaran yang terjadi. KPK bertanggung jawab untuk penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi, sementara OJK mengawasi sektor keuangan dan memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi peraturan yang berlaku. Kepolisian juga memiliki peran penting dalam menangani aspek-aspek kriminal dari kasus ini. Koordinasi antara ketiga lembaga ini memastikan bahwa seluruh aspek dari kasus Bank Century ditangani dengan efektif, mulai dari pengumpulan bukti, penyelidikan, hingga penuntutan. Kasus ini menggambarkan tantangan dalam mengatasi korupsi yang melibatkan banyak pihak dan memerlukan sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Contoh lainnya adalah kasus pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tambang di Kalimantan, yang menunjukkan implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kasus ini melibatkan pelanggaran serius terhadap regulasi lingkungan, di mana perusahaan tambang terbukti melakukan pencemaran yang merusak ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat. Dalam situasi ini, pengawasan yang ketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan. Kementerian memiliki peran dalam melakukan pemantauan dan penilaian dampak lingkungan, serta memastikan bahwa perusahaan mendapatkan izin lingkungan yang sesuai.

Penegakan sanksi yang tegas oleh Kepolisian dan Kejaksaan juga merupakan elemen kunci dalam menangani pelanggaran ini. Kepolisian bertugas menangani aspek kriminal dari pelanggaran, sementara Kejaksaan terlibat dalam proses hukum dan penuntutan. Dalam kasus pelanggaran lingkungan ini, koordinasi antara KLHK, Kepolisian, dan Kejaksaan diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggar bertanggung jawab atas kerusakan yang telah ditimbulkan. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif memastikan bahwa perusahaan tidak hanya dikenakan denda, tetapi juga diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan di masa depan.

# **BAB V**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

---

Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi isu penting dalam hukum pidana modern, mengingat peran signifikan yang dimainkan oleh entitas bisnis dalam masyarakat dan ekonomi. Konsep ini menekankan bahwa korporasi, seperti individu, dapat dikenai sanksi hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Seiring dengan perkembangan hukum dan regulasi, tanggung jawab pidana korporasi telah mengalami berbagai transformasi, mulai dari definisi dan pengakuan hukum hingga implementasi dalam penegakan hukum. Direksi dan manajemen perusahaan berperan kunci dalam memastikan bahwa entitas yang dipimpin mematuhi hukum dan etika bisnis, melalui penerapan kebijakan kepatuhan, audit internal, dan pelatihan karyawan. Tantangan dalam penegakan hukum terhadap korporasi, seperti kompleksitas struktur organisasi dan bukti keterlibatan individu, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara regulator, penegak hukum, dan entitas bisnis itu sendiri.

### **A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah konsep hukum yang mengakui bahwa korporasi, sebagai entitas hukum, dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan dalam rangka aktivitas bisnisnya. Menurut French (2022), korporasi dapat dianggap sebagai "subyek hukum" yang memiliki hak dan kewajiban yang serupa dengan individu, termasuk kewajiban untuk mematuhi hukum pidana. Dalam perspektif hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dipahami sebagai bentuk akuntabilitas yang diberikan kepada perusahaan ketika terjadi pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya mencakup tindakan langsung dari para pengurus perusahaan, tetapi juga

mencakup kebijakan dan sistem operasional yang mendorong atau memungkinkan terjadinya tindak pidana.

### **1. Elemen-Elemen Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana korporasi melibatkan beberapa elemen kunci yang harus dipenuhi untuk dapat menetapkan suatu korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pidana. Elemen-elemen ini adalah perbuatan pidana (*actus reus*), niat jahat (*mens rea*), kaitan antara pelaku dan korporasi, dan keuntungan bagi korporasi.

- a. Perbuatan pidana atau *actus reus* merupakan elemen pertama yang harus dipenuhi dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Ini mengacu pada adanya tindakan yang melanggar hukum pidana, yang bisa berupa tindakan aktif maupun kelalaian. Dalam konteks korporasi, tindakan tersebut bisa melibatkan berbagai bentuk pelanggaran, seperti penipuan, penggelapan, atau pencemaran lingkungan. Tindakan tersebut harus jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan bukan sekadar kebijakan internal perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan terlibat dalam praktik manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana.
- b. Niat jahat atau *mens rea* adalah elemen kedua yang penting dalam penetapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Buist (2023), dalam konteks korporasi, niat jahat dapat diidentifikasi melalui kebijakan perusahaan atau pola pelanggaran yang menunjukkan adanya niat kolektif untuk melanggar hukum. Niat jahat tidak selalu harus berbentuk niat individu dari setiap pelaku, tetapi bisa juga berupa keputusan kolektif yang diambil oleh manajemen atau direksi korporasi. Sebagai contoh, jika manajemen perusahaan menginstruksikan karyawan untuk melanggar aturan lingkungan demi mengurangi biaya produksi, ini menunjukkan adanya niat jahat yang terencana dan terkoordinasi di tingkat manajerial.
- c. Elemen ketiga adalah kaitan antara pelaku dan korporasi. Tindakan pidana harus dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan formal dengan korporasi, seperti karyawan, manajer, atau direksi. Penting untuk memastikan bahwa tindakan pidana dilakukan dalam kapasitas sebagai bagian dari korporasi, bukan sebagai individu pribadi. Ini berarti bahwa pelaku harus bertindak dalam ruang

lingkup pekerjaannya atau atas nama korporasi, dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi sendiri. Sebagai contoh, jika seorang direktur perusahaan terlibat dalam penyusunan untuk memperoleh kontrak, tindakan tersebut harus dilihat dalam konteks perannya sebagai direktur, dan bukan hanya sebagai individu.

- d. Keuntungan bagi korporasi adalah elemen terakhir yang perlu dipenuhi. Tindakan pidana harus memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut James (2023), keuntungan ini bisa berupa peningkatan profit, pengurangan biaya, atau manfaat lainnya yang mendorong atau mengakibatkan tindak pidana tersebut. Misalnya, jika sebuah perusahaan melakukan praktik korupsi untuk memenangkan kontrak yang menguntungkan secara finansial, keuntungan dari kontrak tersebut harus dihubungkan dengan tindakan pidana yang dilakukan. Ini penting untuk menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu untuk keuntungan pribadi tetapi juga untuk kepentingan korporasi.

## **2. Prinsip-Prinsip Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Prinsip-prinsip dasar pertanggungjawaban pidana korporasi memberikan landasan penting dalam menentukan bagaimana korporasi dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh individu di dalamnya. Tiga prinsip utama yang mendasari pertanggungjawaban pidana korporasi adalah asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas.

- a. Asas Legalitas merupakan prinsip pertama yang mendasari pertanggungjawaban pidana korporasi. Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan korporasi hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika tindakan tersebut secara jelas dilarang oleh undang-undang. Kelsen (2023) menjelaskan bahwa asas legalitas berfungsi untuk melindungi hak-hak korporasi dengan memastikan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya aturan hukum yang jelas dan eksplisit. Dalam konteks korporasi, ini berarti bahwa sebelum suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, harus ada ketentuan hukum yang secara khusus melarang tindakan tersebut. Asas ini penting untuk menghindari penerapan hukum yang semena-mena dan memastikan bahwa korporasi tidak dapat dipidana atas tindakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana.

- b. Asas Kesalahan adalah prinsip kedua yang penting dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Prinsip ini mengharuskan adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi, harus terbukti bahwa korporasi melakukan tindakan dengan kesadaran tertentu atau setidaknya dengan kelalaian yang dapat dihukum. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa korporasi tidak hanya bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh individu di dalamnya, tetapi juga harus ada bukti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat atau kelalaian yang cukup besar. Buist (2023) menekankan bahwa niat jahat dalam konteks korporasi bisa berupa niat kolektif yang tercermin dalam kebijakan perusahaan atau tindakan berulang yang menunjukkan pola pelanggaran.
- c. Asas Proporsionalitas adalah prinsip ketiga yang mendasari pertanggungjawaban pidana korporasi. Prinsip ini menyatakan bahwa sanksi yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak dari tindakan yang dilakukan. Menurut Smith dan Jones (2023), proporsionalitas memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak berlebihan dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Ini berarti bahwa ketika korporasi dihukum, sanksi yang dijatuhkan harus mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan. Asas ini penting untuk menjaga keadilan dalam penegakan hukum, memastikan bahwa sanksi yang diterapkan adil dan tidak melebihi batas yang wajar mengingat tindakan yang dilakukan oleh korporasi.

### **3. Kerangka Hukum di Indonesia**

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi mencakup beberapa peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani kasus-kasus korporasi yang melanggar hukum. Salah satu elemen utama dari kerangka hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Menurut Siregar (2022), KUHP baru memberikan ketentuan yang lebih jelas dan terperinci mengenai bagaimana korporasi dapat dikenakan sanksi pidana. Ini mencakup definisi dan kriteria yang diperlukan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, memberikan

kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan korporasi.

KUHP baru memperkenalkan konsep-konsep baru dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk ketentuan yang lebih tegas mengenai peran serta tanggung jawab korporasi dalam melakukan tindak pidana. Undang-undang ini menetapkan bahwa korporasi dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti terlibat dalam pelanggaran hukum, baik melalui tindakan langsung maupun melalui tindakan tidak langsung yang dilakukan oleh individu dalam korporasi tersebut. KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menindak korporasi yang melakukan tindak pidana, memastikan bahwa tidak luput dari pertanggungjawaban hukum. Selain KUHP baru, Indonesia juga memiliki sejumlah undang-undang khusus yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tertentu. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu contohnya, yang secara khusus menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi. Undang-undang ini menetapkan bahwa korporasi dapat dikenakan sanksi pidana atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi, baik melalui penyalahgunaan wewenang maupun tindakan-tindakan korupsi lainnya.

#### **4. Pentingnya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana korporasi berperan krusial dalam sistem hukum dan memiliki berbagai tujuan utama yang mendukung integritas dan keadilan di masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencegah tindak pidana. Dengan mengenakan sanksi pidana pada korporasi, diharapkan perusahaan akan lebih berhati-hati dalam operasional untuk menghindari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Anderson (2023) mencatat bahwa ancaman sanksi pidana dapat bertindak sebagai *deterrent* yang efektif, memotivasi korporasi untuk mematuhi hukum dan regulasi demi menghindari konsekuensi yang merugikan. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi juga berfungsi untuk melindungi kepentingan publik. Ketika korporasi melakukan pelanggaran yang merugikan masyarakat, seperti pencemaran lingkungan atau penipuan konsumen, dampaknya bisa sangat luas dan merusak. Misalnya, pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup tidak hanya dapat merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan



menerapkan sanksi pidana, sistem hukum berupaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan umum.

Pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi juga terletak pada kemampuannya untuk menegakkan keadilan. Menurut Black (2023), memberikan sanksi pidana kepada korporasi yang melanggar hukum adalah cara untuk memastikan bahwa tidak ada entitas yang kebal hukum. Prinsip keadilan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang harus mampu bertindak secara adil dan konsisten, tanpa memandang ukuran atau kekuatan suatu entitas. Tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, korporasi besar mungkin merasa dapat mengabaikan hukum tanpa konsekuensi yang berarti. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi juga berfungsi dalam hal reparasi dan pemulihan. Sanksi pidana sering kali mencakup denda yang dapat digunakan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Ini membantu untuk mengembalikan kondisi ke keadaan semula sebelum pelanggaran terjadi.

## **B. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu untuk memastikan bahwa suatu korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi dalam lingkup kegiatannya. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai syarat-syarat pertanggungjawaban pidana korporasi:

### **1. Tindakan Pidana (*Actus Reus*)**

*Actus reus*, atau perbuatan pidana, merupakan elemen fundamental dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep ini merujuk pada tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum yang dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan formal dengan korporasi. Elemen ini penting karena tanpa adanya tindakan yang dapat dianggap melanggar hukum, tidak mungkin bagi sebuah korporasi untuk dianggap bertanggung jawab secara pidana. Tindakan pidana, dalam konteks ini, bisa berbentuk perbuatan aktif maupun kelalaian. Perbuatan aktif mencakup tindakan langsung yang melanggar hukum, seperti penipuan, pencurian, atau penggelapan. Misalnya, jika seorang manajer di sebuah perusahaan secara sengaja melakukan penipuan finansial

untuk memperoleh keuntungan pribadi, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai *actus reus*. Dalam hal ini, tindakan ilegal yang dilakukan secara langsung oleh individu yang memiliki posisi di dalam korporasi merupakan bentuk nyata dari *actus reus*.

*Actus reus* juga mencakup kelalaian, yaitu kegagalan untuk bertindak sesuai dengan standar hukum atau kewajiban yang ada. Contohnya, jika sebuah perusahaan tidak menjaga standar keselamatan kerja yang diatur oleh undang-undang, dan akibatnya menyebabkan kecelakaan kerja yang fatal, maka kelalaian dalam memenuhi standar keselamatan tersebut dapat dianggap sebagai *actus reus*. Dalam kasus ini, meskipun tidak ada tindakan aktif yang melanggar hukum secara langsung, kegagalan untuk mencegah pelanggaran hukum atau menjaga standar yang telah ditetapkan tetap dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Perbuatan pidana dalam konteks korporasi harus dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan formal dengan perusahaan. Ini termasuk karyawan, manajer, atau anggota direksi yang bertanggung jawab atas keputusan dan operasional perusahaan. Untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi, penting untuk menunjukkan bahwa tindakan atau kelalaian yang dilakukan merupakan bagian dari aktivitas yang berkaitan dengan fungsi atau tanggung jawab dalam perusahaan. Dengan kata lain, tindakan pidana harus dilakukan dalam kapasitas sebagai bagian dari korporasi, bukan sebagai individu pribadi.

## 2. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*)

Unsur kesalahan, atau *mens rea*, adalah elemen krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. *Mens rea* mengacu pada niat atau kesalahan yang melekat pada tindakan pidana yang dilakukan oleh individu atau entitas, dalam hal ini, korporasi. Di dalam konteks korporasi, *mens rea* sering kali merupakan konsep yang kompleks karena melibatkan niat kolektif yang dapat diidentifikasi melalui kebijakan perusahaan atau pola pelanggaran yang berulang. Dalam sistem hukum pidana, *mens rea* sering kali dianggap sebagai elemen penting untuk menetapkan apakah tindakan pidana dilakukan dengan kesadaran atau niat jahat. Namun, ketika diterapkan pada korporasi, konsep ini menjadi lebih rumit karena korporasi adalah entitas yang terdiri dari banyak individu dengan berbagai peran dan tanggung jawab. Untuk mengidentifikasi *mens rea* dalam korporasi, biasanya perlu membuktikan bahwa tindakan pidana tersebut merupakan hasil dari

kebijakan perusahaan yang disengaja atau kelalaian yang serius dalam pengawasan operasional.

Salah satu cara untuk menentukan *mens rea* dalam korporasi adalah dengan memeriksa kebijakan perusahaan dan prosedur operasional yang ada. Jika suatu tindakan pidana terjadi sebagai akibat langsung dari kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak atau tindakan yang secara konsisten menunjukkan pola pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa korporasi memiliki niat kolektif dalam melakukan pelanggaran tersebut. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki kebijakan yang memungkinkan atau bahkan mendorong penghindaran pajak, dan tindakan tersebut secara rutin dilakukan oleh karyawan untuk mematuhi kebijakan tersebut, maka niat jahat korporasi dapat diidentifikasi dari kebijakan dan tindakan yang berulang. Selain itu, *mens rea* juga dapat dievaluasi melalui pengawasan dan kepatuhan internal yang ada dalam korporasi. Jika terdapat bukti bahwa perusahaan secara sengaja mengabaikan standar pengawasan atau memfasilitasi praktik ilegal, maka ini dapat menunjukkan adanya kelalaian serius dalam pengawasan operasional. Misalnya, jika sebuah perusahaan tambang gagal untuk menerapkan prosedur keselamatan yang sesuai dan mengabaikan peringatan tentang risiko lingkungan, dan hasilnya terjadi pencemaran yang merusak lingkungan, maka kelalaian dalam pengawasan dan kepatuhan dapat dianggap sebagai *mens rea* dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi.

### **3. Hubungan Formal dengan Korporasi**

Pada sistem hukum pidana, penetapan pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan adanya hubungan formal antara individu yang melakukan tindakan pidana dengan korporasi tempatnya bekerja. Elemen ini, yang dikenal sebagai "hubungan formal dengan korporasi," berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan pidana yang dilakukan adalah bagian dari kegiatan korporasi dan bukan hanya tindakan pribadi individu tersebut. Untuk korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, penting bahwa tindakan pidana dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan formal dengan korporasi, seperti karyawan, manajer, direksi, atau agen yang bertindak atas nama korporasi.

Hubungan formal ini mencakup berbagai peran dalam struktur organisasi korporasi. Karyawan, yang merupakan bagian dari tenaga kerja perusahaan, sering kali memiliki tanggung jawab tertentu yang

dapat memengaruhi operasional sehari-hari. Ketika karyawan melakukan tindakan pidana dalam konteks tugas, seperti melakukan penipuan untuk mencapai target perusahaan, tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan korporasi jika terbukti bahwa tindakan itu sesuai dengan kebijakan atau instruksi dari atasan. Demikian pula, manajer dan direksi yang berada di posisi pengambilan keputusan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan dijalankan dengan benar. Jika manajer atau direksi terlibat dalam tindakan pidana, seperti penggelapan dana atau pelanggaran etika bisnis, tindakan tersebut biasanya dianggap sebagai perpanjangan dari kebijakan perusahaan yang lebih luas.

Tindakan pidana dilakukan dalam kapasitas sebagai bagian dari korporasi, bukan sebagai individu yang bertindak secara pribadi. Ini berarti bahwa tindakan tersebut harus terkait dengan peran resmi dalam struktur perusahaan atau harus dilakukan berdasarkan instruksi atau kebijakan yang ditetapkan oleh korporasi. Misalnya, jika seorang direktur melakukan tindakan korupsi yang menguntungkan perusahaan, tindakan tersebut bisa jadi merupakan bagian dari strategi korporasi atau kebijakan perusahaan, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum. Dalam hal ini, korporasi dapat dianggap bertanggung jawab karena tindakan pidana tersebut dilakukan dalam kapasitas resmi individu tersebut dan untuk keuntungan korporasi.

Hubungan formal juga mencakup agen yang bertindak atas nama korporasi. Agen adalah individu atau entitas yang diberi wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama korporasi. Jika agen tersebut melakukan tindakan pidana yang berkaitan dengan tugas atau instruksi dari korporasi, maka korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengontrak agen untuk melakukan transaksi bisnis dan agen tersebut terlibat dalam tindakan penipuan selama transaksi, korporasi dapat dianggap bertanggung jawab karena tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitas agen yang bertindak atas nama perusahaan.

#### **4. Keuntungan atau Manfaat bagi Korporasi**

Pada konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, salah satu elemen penting adalah adanya keuntungan atau manfaat yang diperoleh oleh korporasi dari tindakan pidana yang dilakukan. Ini berarti bahwa tindakan pidana yang diidentifikasi harus menghasilkan keuntungan baik

secara langsung maupun tidak langsung bagi korporasi. Keberadaan elemen ini penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan berdasarkan tindakan individu, tetapi juga mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh korporasi sebagai hasil dari tindakan tersebut.

Keuntungan atau manfaat bagi korporasi bisa muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, dalam kasus penipuan keuangan, tindakan pidana seperti penggelapan dana atau laporan keuangan yang dimanipulasi dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan secara sementara dengan mengurangi biaya atau meningkatkan pendapatan yang dilaporkan. Jika tindakan penipuan berhasil, korporasi dapat memperoleh keuntungan finansial yang signifikan melalui pengurangan pajak, peningkatan nilai saham, atau keuntungan lain yang diperoleh dari informasi yang tidak akurat atau tidak jujur. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana secara langsung mendorong terjadinya tindak pidana karena ada insentif finansial yang jelas untuk melakukannya.

Manfaat bagi korporasi juga bisa bersifat tidak langsung. Misalnya, dalam kasus pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tambang, pengabaian terhadap standar lingkungan yang ketat mungkin memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya operasional. Dengan tidak mematuhi regulasi lingkungan, perusahaan bisa menghemat biaya dalam pengelolaan limbah atau pemrosesan bahan berbahaya, yang dapat meningkatkan margin keuntungan. Meskipun manfaat ini tidak selalu terlihat secara langsung, penghematan biaya yang dilakukan melalui pelanggaran hukum dapat memberikan dorongan yang signifikan untuk tindakan pidana tersebut.

## **5. Sistem dan Kebijakan Perusahaan**

Sistem dan kebijakan perusahaan berperan penting dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, karena dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kemungkinan terjadinya tindak pidana. Keberadaan kebijakan atau sistem operasional yang memadai, atau sebaliknya, yang cacat atau tidak memadai, sering kali menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah suatu perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, kebijakan dan sistem perusahaan tidak hanya mencerminkan bagaimana

perusahaan beroperasi, tetapi juga bagaimana perusahaan tersebut mungkin telah memfasilitasi atau bahkan mendorong tindakan pidana.

Salah satu bentuk kegagalan sistem atau kebijakan yang memungkinkan tindak pidana adalah kurangnya pengawasan internal. Perusahaan yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang ketat atau tidak memantau dengan baik aktivitas operasionalnya mungkin memberikan celah bagi individu di dalamnya untuk melakukan tindakan pidana. Misalnya, tanpa adanya kontrol internal yang memadai, seperti audit berkala atau prosedur pelaporan yang efektif, ada risiko yang lebih tinggi bahwa karyawan atau manajer dapat terlibat dalam kegiatan yang tidak etis, seperti penipuan atau korupsi, tanpa terdeteksi. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan menangani risiko ini bisa menjadi indikasi bahwa sistem perusahaan secara struktural memungkinkan atau bahkan mendorong tindak pidana.

Kebijakan yang mendorong perilaku tidak etis juga dapat berkontribusi pada terjadinya tindak pidana. Jika perusahaan memiliki kebijakan yang menekankan pencapaian target keuntungan atau kinerja tanpa mempertimbangkan etika atau kepatuhan hukum, hal ini bisa menciptakan lingkungan yang memotivasi karyawan untuk melanggar hukum. Misalnya, target penjualan yang sangat agresif atau tekanan untuk mengurangi biaya tanpa memperhatikan regulasi dapat menyebabkan karyawan mengambil jalan pintas yang melanggar hukum, seperti manipulasi laporan keuangan atau pengabaian standar keselamatan. Dalam kasus seperti ini, kebijakan perusahaan yang mendorong perilaku tidak etis dapat menjadi bukti bahwa perusahaan secara struktural mendukung atau bahkan mendorong tindakan pidana.

Kegagalan dalam menetapkan prosedur kepatuhan yang memadai juga merupakan bentuk kebijakan yang bisa memfasilitasi tindak pidana. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan prosedur kepatuhan yang efektif, seperti pelatihan tentang peraturan hukum, kode etik, dan mekanisme pelaporan pelanggaran, mungkin memberikan kesempatan bagi tindak pidana untuk terjadi tanpa adanya upaya yang memadai untuk mencegahnya. Ketidakmampuan untuk menetapkan atau menegakkan kebijakan kepatuhan yang efektif dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak memberikan perhatian yang cukup pada kepatuhan hukum, dan ini dapat menjadi indikasi bahwa sistem perusahaan berkontribusi pada terjadinya tindak pidana.

## C. Peran Direksi dan Manajemen dalam Pertanggungjawaban

Direksi dan manajemen perusahaan berperan kunci dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada mengelola operasi sehari-hari tetapi juga melibatkan penegakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai peran direksi dan manajemen dalam pertanggungjawaban pidana korporasi:

### 1. Kepemimpinan dan Budaya Etis

Kepemimpinan dan budaya etis di perusahaan berperan krusial dalam memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan integritas dan mematuhi hukum. Direksi dan manajemen puncak memiliki tanggung jawab utama untuk menetapkan nada di puncak, yang berarti harus memproyeksikan dan menegakkan nilai-nilai etis yang mendasari seluruh operasi perusahaan. Komitmen terhadap etika dan kepatuhan hukum dimulai dari puncak organisasi dan harus diterjemahkan menjadi praktik sehari-hari yang mendorong perilaku yang benar di seluruh tingkat perusahaan.

Untuk mencapai hal ini, direksi dan manajemen harus mengembangkan kebijakan etika yang jelas dan komprehensif. Kebijakan ini harus mencakup prinsip-prinsip etika dasar yang harus diikuti oleh seluruh anggota perusahaan, serta pedoman yang spesifik mengenai kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang relevan. Kebijakan etika ini harus diintegrasikan ke dalam semua aspek operasi perusahaan, dari pengambilan keputusan strategis hingga operasional sehari-hari. Dengan adanya kebijakan yang jelas, seluruh karyawan memiliki panduan yang konkret tentang standar etika yang diharapkan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mematuhi hukum.

Pelatihan merupakan komponen penting dalam membangun budaya etis yang efektif. Direksi dan manajemen harus memastikan bahwa semua karyawan, mulai dari level manajerial hingga staf operasional, mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai etika dan kepatuhan hukum. Pelatihan ini harus mencakup tidak hanya teori tetapi juga studi kasus praktis yang menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip etika diterapkan dalam situasi nyata. Dengan memberikan pelatihan yang konsisten dan relevan, perusahaan dapat memastikan bahwa semua

anggota tim memahami pentingnya kepatuhan dan tahu bagaimana mengidentifikasi serta mengatasi potensi pelanggaran.

## **2. Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Kepatuhan**

Pengembangan dan implementasi kebijakan kepatuhan merupakan tanggung jawab vital yang harus dipikul oleh manajemen untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Manajemen bertugas untuk merancang kebijakan dan prosedur kepatuhan yang komprehensif, bertujuan untuk mencegah tindak pidana serta memitigasi risiko pelanggaran yang mungkin terjadi. Proses ini melibatkan identifikasi dan pengawasan terhadap area-area yang rawan pelanggaran, termasuk keuangan, lingkungan, dan keselamatan kerja, yang semuanya memerlukan perhatian khusus untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan yang melanggar hukum.

Kebijakan kepatuhan harus dirancang dengan seksama untuk mengatasi potensi risiko di area-area kritis. Dalam konteks keuangan, kebijakan harus mencakup prosedur untuk pencegahan penipuan, pengelolaan konflik kepentingan, dan pelaporan transaksi yang mencurigakan. Di bidang lingkungan, kebijakan harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi lingkungan dan memiliki prosedur untuk mengelola limbah serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sedangkan dalam hal keselamatan kerja, kebijakan harus mencakup standar keselamatan yang ketat, prosedur pelaporan kecelakaan, dan pelatihan rutin untuk memastikan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh karyawan.

Kebijakan kepatuhan yang baik harus jelas dan terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi ini harus mencakup rincian tentang prosedur operasional standar, tanggung jawab setiap posisi dalam perusahaan terkait dengan kepatuhan, serta mekanisme untuk memantau dan menilai efektivitas kebijakan tersebut. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi karyawan tetapi juga sebagai bukti bahwa perusahaan telah berupaya untuk memenuhi kewajiban kepatuhan hukum jika terjadi audit atau investigasi. Selain itu, untuk memastikan bahwa kebijakan kepatuhan diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan, manajemen perlu melakukan sosialisasi yang efektif. Ini termasuk menyampaikan kebijakan melalui pelatihan rutin, komunikasi internal, dan sesi penyuluhan.



### **3. Pengawasan dan Audit Internal**

Pengawasan dan audit internal merupakan komponen krusial dalam sistem manajemen kepatuhan yang efektif di perusahaan. Direksi dan manajemen memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pengawasan dan audit internal berfungsi dengan baik untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hukum. Sistem ini bertujuan untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan serta mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang mungkin muncul dalam operasional sehari-hari. Penting bagi perusahaan untuk menetapkan struktur pengawasan yang jelas dan efektif. Struktur ini melibatkan penunjukan personel atau tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan dan melakukan audit internal. Tim ini harus memiliki wewenang yang cukup, independensi, dan kompetensi untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif. Pengawasan yang baik meliputi pemantauan rutin terhadap aktivitas operasional, pemeriksaan dokumen, dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur diikuti dengan benar.

Audit internal harus dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana perusahaan mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses audit ini biasanya mencakup penilaian terhadap berbagai area operasional, termasuk keuangan, pengelolaan risiko, keselamatan kerja, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Audit internal yang berkala memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran atau kelemahan dalam sistem kepatuhan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil tindakan korektif lebih awal untuk mencegah pelanggaran hukum. Selama proses audit internal, tim audit harus memeriksa apakah kebijakan dan prosedur perusahaan diimplementasikan secara efektif dan apakah ada ketidakpatuhan yang perlu diatasi. Ini termasuk mengevaluasi apakah prosedur pengendalian internal yang ada memadai untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum. Audit internal juga melibatkan wawancara dengan karyawan, pemeriksaan catatan, dan analisis data untuk mengidentifikasi potensi risiko dan masalah kepatuhan.

#### **4. Pelaporan dan Tindakan Korektif**

Pelaporan dan tindakan korektif merupakan elemen penting dalam memastikan kepatuhan dan integritas perusahaan. Sistem pelaporan yang anonim dan bebas dari rasa takut sangat esensial untuk mendorong karyawan melaporkan pelanggaran atau tindakan yang tidak etis tanpa khawatir akan pembalasan. Direksi dan manajemen harus memastikan bahwa mekanisme pelaporan ini berfungsi dengan baik dan memberikan jaminan bahwa semua laporan akan ditangani secara serius dan profesional. Sistem pelaporan anonim memberikan saluran aman bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran hukum atau kebijakan tanpa mengungkapkan identitas. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman dan aman untuk melaporkan masalah. Sistem ini harus mudah diakses, transparan, dan terjaga kerahasiaannya. Misalnya, perusahaan dapat menyediakan platform online atau hotline yang dikelola oleh pihak ketiga untuk memastikan bahwa pelaporan dapat dilakukan secara anonim dan tanpa risiko pembalasan.

Setelah laporan diterima, direksi dan manajemen harus memastikan bahwa proses penanganan laporan dilakukan secara cepat dan efektif. Proses ini biasanya melibatkan investigasi internal yang menyeluruh untuk mengevaluasi kebenaran laporan dan menentukan tindakan yang perlu diambil. Tim investigasi harus terdiri dari individu yang independen dan memiliki keahlian dalam menangani pelanggaran hukum atau kebijakan, seperti auditor internal atau tim kepatuhan. Selama investigasi, penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas proses untuk menghindari gangguan atau pengaruh yang tidak diinginkan. Jika hasil investigasi mengungkapkan adanya pelanggaran atau kesalahan, tindakan korektif harus diambil untuk mencegah terulangnya masalah yang sama. Tindakan korektif dapat mencakup berbagai langkah, seperti revisi kebijakan dan prosedur perusahaan, peningkatan pelatihan untuk karyawan, atau penerapan kontrol tambahan untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Selain itu, jika pelanggaran melibatkan individu tertentu, tindakan disipliner yang sesuai harus diterapkan, yang bisa termasuk peringatan, penurunan jabatan, atau pemecatan, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran.

## **5. Pelatihan dan Pendidikan Karyawan**

Pelatihan dan pendidikan karyawan adalah komponen kunci dalam menciptakan budaya kepatuhan yang efektif di dalam perusahaan. Direksi dan manajemen memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa setiap karyawan memperoleh pelatihan yang memadai mengenai kepatuhan hukum dan kebijakan perusahaan. Pelatihan ini bukan hanya tentang memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga tentang membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menghindari potensi pelanggaran hukum. Pelatihan harus mencakup berbagai aspek hukum yang relevan dengan operasi perusahaan. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, hukum yang berkaitan dengan anti-korupsi, perlindungan data pribadi, keselamatan kerja, dan peraturan lingkungan. Misalnya, jika perusahaan beroperasi di sektor yang sangat teregulasi, seperti perbankan atau industri kimia, pelatihan harus memberikan pengetahuan mendalam mengenai peraturan spesifik yang berlaku di sektor tersebut. Hal ini memastikan bahwa karyawan memahami betul kewajiban hukum dan bagaimana cara mematuhi dalam praktek sehari-hari.

Pentingnya pelatihan ini terletak pada kemampuannya untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Melalui pelatihan yang efektif, karyawan tidak hanya diajarkan tentang hukum yang berlaku tetapi juga diberi pemahaman tentang konsekuensi dari pelanggaran hukum, baik dari segi hukum maupun dampak terhadap reputasi perusahaan. Dengan pemahaman ini, karyawan lebih cenderung untuk bertindak secara etis dan melaporkan potensi masalah sebelum berkembang menjadi pelanggaran serius. Pelatihan harus dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan organisasi, dari tingkat manajerial hingga karyawan tingkat bawah. Pelatihan bagi manajer dan eksekutif, misalnya, harus lebih mendalam dan mencakup topik-topik seperti tanggung jawab pengawasan, pengambilan keputusan etis, dan penanganan pelaporan pelanggaran. Sementara itu, pelatihan bagi karyawan biasa harus fokus pada praktik operasional sehari-hari dan bagaimana mematuhi kebijakan perusahaan serta peraturan hukum yang relevan.

## BAB VI

# HUKUMAN TERHADAP KORPORASI

Hukuman terhadap korporasi berperan krusial dalam sistem peradilan pidana, sebagai alat untuk menegakkan hukum dan mencegah pelanggaran oleh entitas bisnis. Dengan meningkatnya kompleksitas dan skala operasi korporasi, hukuman tidak hanya mencakup denda finansial tetapi juga melibatkan berbagai bentuk sanksi seperti restrukturisasi operasional, pembatasan kegiatan bisnis, dan pemantauan ketat. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memastikan tanggung jawab korporasi dalam pelanggaran hukum dan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Kasus-kasus besar seperti skandal emisi Volkswagen, tumpahan minyak Deepwater Horizon oleh BP, dan penipuan akuntansi Enron, menunjukkan bagaimana hukuman terhadap korporasi dapat memiliki dampak signifikan, tidak hanya pada perusahaan itu sendiri tetapi juga pada industri dan masyarakat secara keseluruhan. Penegakan hukuman yang efektif memerlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan seringkali memicu reformasi dalam kebijakan dan praktik bisnis untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

### A. Jenis-Jenis Hukuman terhadap Korporasi

Hukuman terhadap korporasi dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Berikut adalah beberapa jenis hukuman yang sering diterapkan terhadap korporasi:

#### 1. Denda (*Fines*)

Denda merupakan salah satu bentuk hukuman yang sering dikenakan terhadap korporasi yang melanggar hukum dan peraturan. Sebagai sanksi pidana, denda melibatkan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada pemerintah atau badan pengawas yang berwenang, dan dirancang untuk menangani pelanggaran hukum dengan cara yang

terukur dan adil. Denda berfungsi ganda: pertama, untuk memberikan efek jera kepada perusahaan dengan menimbulkan dampak finansial yang signifikan, dan kedua, untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah perusahaan dari melakukan pelanggaran serupa di masa depan dengan menempatkan beban finansial yang cukup berat sebagai konsekuensinya.

Denda tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengkompensasi kerugian yang dialami oleh masyarakat atau lingkungan akibat tindakan perusahaan. Dengan menetapkan jumlah denda yang substansial, pengadilan atau badan pengawas berharap agar perusahaan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan dan operasional untuk mematuhi hukum. Efek jera ini penting karena seringkali, denda yang dikenakan dapat mempengaruhi keputusan strategis perusahaan dan memotivasi untuk memperbaiki praktik bisnis agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gambar 4. Hukuman atau Denda



Sumber; *Kumparan*

Contoh nyata dari penerapan denda dalam konteks hukum korporasi dapat ditemukan dalam kasus Johnson & Johnson pada tahun 2020. Perusahaan farmasi tersebut dikenakan denda sebesar \$2.2 miliar karena terlibat dalam praktik pemasaran obat-obatan yang tidak sesuai dengan persetujuan dari FDA (*Food and Drug Administration*). Kasus

ini membahas bagaimana denda dapat menjadi instrumen yang kuat dalam penegakan hukum, terutama ketika korporasi terlibat dalam praktik yang melanggar peraturan yang dirancang untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Denda yang dikenakan kepada Johnson & Johnson tidak hanya mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan kepada perusahaan lain mengenai konsekuensi dari pelanggaran serupa.

Penjatuhan denda pada korporasi sering melibatkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk beratnya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, dan apakah perusahaan tersebut telah melakukan upaya untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran. Denda yang terlalu rendah mungkin tidak cukup memberikan efek jera atau mengkompensasi kerugian yang dialami, sedangkan denda yang terlalu tinggi bisa dianggap tidak adil atau merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Oleh karena itu, penentuan jumlah denda harus mempertimbangkan keseimbangan yang adil antara hukuman dan kemampuan perusahaan untuk mematuhi peraturan di masa depan.

## **2. Pembatasan Kegiatan Bisnis (*Business Restrictions*)**

Pembatasan kegiatan bisnis adalah bentuk sanksi yang dikenakan pada korporasi yang melanggar hukum, dengan tujuan mencegahnya dari menjalankan aktivitas tertentu atau beroperasi dalam sektor tertentu. Bentuk hukuman ini sering kali diterapkan untuk perusahaan yang dianggap menimbulkan risiko serius bagi masyarakat atau lingkungan. Pembatasan ini dapat mencakup larangan sementara atau permanen pada aktivitas bisnis tertentu, seperti penambangan, produksi, atau penyediaan layanan, yang dianggap berpotensi merugikan atau melanggar hukum.

Tujuan utama dari pembatasan kegiatan bisnis adalah untuk mencegah perusahaan yang bersangkutan dari mengulangi pelanggaran yang sama dan untuk melindungi masyarakat serta lingkungan dari potensi bahaya yang mungkin timbul akibat operasi perusahaan tersebut. Dengan memberlakukan pembatasan, pihak berwenang dapat memastikan bahwa korporasi tidak hanya menerima hukuman finansial, tetapi juga menghadapi dampak langsung pada kapasitas operasional. Hal ini juga memberikan sinyal kuat bahwa tindakan tertentu tidak dapat diterima dan harus dihindari oleh perusahaan lain untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sebagai contoh konkret, perusahaan minyak BP menghadapi pembatasan signifikan setelah insiden tumpahan minyak Deepwater Horizon pada tahun 2010. Akibat dari kecelakaan tersebut, BP diberi larangan sementara untuk mengebor di Teluk Meksiko. Kasus ini membahas bagaimana pembatasan kegiatan bisnis dapat diterapkan sebagai respons terhadap pelanggaran besar yang memiliki dampak lingkungan dan sosial yang luas. Larangan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghukum BP tetapi juga untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat mengulang kesalahan yang sama di lokasi yang sama. Pembatasan ini juga memungkinkan pihak berwenang untuk menilai dan memperbaiki prosedur keselamatan serta mengimplementasikan tindakan pencegahan yang lebih ketat sebelum BP diizinkan untuk kembali beroperasi.

Pembatasan kegiatan bisnis sering kali disertai dengan persyaratan yang ketat untuk pemulihan dan pemantauan, di mana perusahaan harus memenuhi standar baru atau melakukan perubahan signifikan dalam operasional sebelum larangan dapat dicabut. Misalnya, BP harus menunjukkan bahwa telah memperbaiki sistem keselamatan dan prosedur operasional agar sesuai dengan regulasi lingkungan yang lebih ketat. Dengan cara ini, pembatasan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai dorongan untuk perubahan positif dan peningkatan dalam praktik operasional perusahaan.

### **3. Pengawasan Eksternal (*External Monitoring*)**

Pengawasan eksternal, atau external monitoring, adalah suatu mekanisme yang diterapkan oleh pengadilan atau regulator dengan menunjuk pengawas independen untuk memantau operasi korporasi. Tujuan utama dari pengawasan eksternal adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang relevan, serta untuk mengawasi pelaksanaan perbaikan dan perubahan yang diharuskan sebagai bagian dari hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Pengawas independen yang ditunjuk biasanya adalah pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dengan korporasi dan memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, seperti auditor, konsultan, atau lembaga pengawasan.

Pengawasan eksternal menjadi krusial ketika sebuah korporasi menghadapi tuduhan pelanggaran serius atau ketika ada kekhawatiran mengenai kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Mekanisme ini

memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengklaim telah mematuhi hukum, tetapi benar-benar melaksanakan perbaikan yang diperlukan dan memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan. Pengawas independen akan melakukan pemeriksaan secara berkala, menilai prosedur dan kebijakan yang diterapkan perusahaan, serta memberikan laporan kepada regulator mengenai tingkat kepatuhan yang dicapai.

Contoh nyata dari pengawasan eksternal dapat dilihat dalam kasus Volkswagen, yang dihadapkan pada skandal emisi pada tahun 2015. Skandal ini mengungkapkan bahwa perusahaan otomotif tersebut telah menggunakan perangkat lunak manipulasi emisi untuk memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan, meskipun emisi sebenarnya melebihi batas yang diizinkan. Sebagai respons terhadap pelanggaran berat ini, Volkswagen diwajibkan untuk menjalani pengawasan eksternal yang ketat. Pengawas independen ditunjuk untuk memantau dan mengevaluasi seluruh operasi perusahaan, memastikan bahwa Volkswagen tidak hanya memperbaiki sistem emisi kendaraan tetapi juga menerapkan prosedur yang lebih transparan dan sesuai dengan hukum.

Pengawasan eksternal dalam kasus Volkswagen tidak hanya melibatkan pemeriksaan teknis dari sistem emisi kendaraan, tetapi juga audit menyeluruh terhadap kebijakan dan prosedur internal perusahaan. Pengawas independen menilai apakah Volkswagen telah memperkenalkan perubahan yang diperlukan dalam operasional, memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi semua regulasi lingkungan yang berlaku dan tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa depan. Laporan dari pengawas ini memberikan bukti kepada regulator bahwa Volkswagen sedang dalam proses memperbaiki dan meningkatkan sistem sesuai dengan persyaratan hukum.

Tujuan dari pengawasan eksternal adalah untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah kemungkinan pelanggaran di masa mendatang. Dengan adanya pengawas independen, perusahaan diharapkan dapat menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan dan transparansi. Selain itu, pengawasan eksternal membantu mencegah kemungkinan manipulasi atau penipuan yang mungkin terjadi jika perusahaan hanya bergantung pada audit internal sendiri. Ini memberikan jaminan tambahan kepada regulator dan masyarakat bahwa perusahaan benar-benar memperbaiki praktiknya sesuai dengan standar yang ditetapkan.



#### **4. Kompensasi dan Restitusi (*Compensation and Restitution*)**

Kompensasi dan restitusi adalah bentuk hukuman yang dikenakan pada korporasi yang telah melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh pihak yang terkena dampak. Konsep ini berfokus pada kewajiban perusahaan untuk membayar ganti rugi kepada individu atau kelompok yang terkena dampak dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kompensasi biasanya melibatkan pembayaran sejumlah uang kepada korban untuk mengimbangi kerugian yang dialami, sedangkan restitusi bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebanyak mungkin. Tujuan utama dari kompensasi dan restitusi adalah untuk memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran hukum. Dengan cara ini, korporasi tidak hanya dikenakan hukuman dalam bentuk denda atau sanksi administratif, tetapi juga diminta untuk bertanggung jawab secara finansial terhadap kerugian yang ditimbulkan. Ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kondisi dan perbaikan kerugian bagi pihak yang dirugikan, daripada sekadar menghukum pelaku.

Sebagai contoh, pada tahun 2021, perusahaan kimia DuPont diwajibkan untuk membayar kompensasi sebesar \$671 juta kepada penduduk yang terdampak oleh pencemaran bahan kimia PFOA (asam perfluorooctanoic), yang digunakan dalam proses produksi perusahaan tersebut. Kasus ini melibatkan pencemaran lingkungan yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar pabrik DuPont. Kompensasi yang dibayar oleh DuPont bertujuan untuk menutupi biaya medis, kerugian ekonomi, serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh paparan bahan kimia tersebut. Pembayaran kompensasi ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas tindakannya yang merugikan masyarakat.

Proses kompensasi dan restitusi biasanya melibatkan penilaian mendalam terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pidana. Ini melibatkan evaluasi kerugian yang diderita oleh korban, seperti biaya perawatan medis, kehilangan pendapatan, atau kerusakan properti. Selain itu, proses ini juga mencakup penetapan jumlah kompensasi yang sesuai untuk memastikan bahwa kerugian yang dialami dapat dipulihkan secara adil. Pengadilan atau badan yang berwenang akan menentukan besaran kompensasi berdasarkan bukti yang diajukan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran.

## 5. Pembubaran Korporasi (*Corporate Dissolution*)

Pembubaran korporasi adalah salah satu bentuk hukuman paling drastis yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hukum serius. Langkah ini memaksa perusahaan untuk menghentikan semua operasinya secara permanen dan dibubarkan secara hukum. Pembubaran korporasi tidak hanya mengakhiri aktivitas bisnis perusahaan, tetapi juga menghapus keberadaan hukum dari entitas tersebut. Ini merupakan upaya terakhir untuk menanggapi pelanggaran yang dianggap terlalu berat atau sistematis, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat lagi beroperasi secara etis atau sesuai dengan hukum.

Tujuan utama dari pembubaran korporasi adalah untuk menghentikan operasional perusahaan yang telah melakukan pelanggaran serius dan sistematis. Tindakan ini biasanya diambil ketika pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat diperbaiki melalui langkah-langkah lain, seperti denda atau pembatasan kegiatan bisnis. Pembubaran bertujuan untuk mencegah perusahaan tersebut melanjutkan praktik-praktik buruk yang dapat merugikan publik, merusak lingkungan, atau menciptakan ketidakadilan. Dengan menghentikan operasionalnya, pembubaran memastikan bahwa perusahaan tidak lagi dapat melakukan pelanggaran di masa depan.

Contoh yang jelas dari pembubaran korporasi adalah kasus Drexel Burnham Lambert, sebuah perusahaan investasi yang dibubarkan pada tahun 1990 setelah terlibat dalam berbagai pelanggaran keuangan besar. Drexel Burnham Lambert terlibat dalam skandal keuangan yang melibatkan praktik perdagangan yang tidak etis, penghindaran pajak, dan pelanggaran sekuritas. Meskipun perusahaan ini sebelumnya merupakan pemain utama di industri keuangan, pelanggaran serius yang dilakukannya menyebabkan penurunan reputasi yang drastis dan ketidakmampuan untuk memulihkan kepercayaan publik. Sebagai hasilnya, pembubaran korporasi menjadi langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi dampak dari tindak pidana yang dilakukan.

Proses pembubaran korporasi melibatkan beberapa langkah hukum, termasuk penyelesaian semua kewajiban finansial perusahaan, distribusi aset yang tersisa, dan pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku. Biasanya, pengadilan atau badan regulasi akan memimpin proses ini untuk memastikan bahwa semua langkah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembubaran juga melibatkan pemeriksaan

mendalam terhadap dampak pelanggaran yang dilakukan, termasuk bagaimana cara perusahaan menyelesaikan klaim terhadapnya dan memastikan bahwa semua kewajiban hukum dipenuhi. Meskipun pembubaran merupakan langkah terakhir, langkah ini sering kali memunculkan tantangan signifikan baik bagi karyawan, kreditor, maupun pihak-pihak yang terlibat. Karyawan perusahaan yang dibubarkan mungkin kehilangan pekerjaannya tanpa adanya kesempatan untuk mendapatkan kompensasi yang memadai. Kreditor mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembayaran dari perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Selain itu, pembubaran juga dapat berdampak pada pasar atau industri tempat perusahaan beroperasi, terutama jika perusahaan tersebut merupakan pemain kunci dalam sektor tersebut.

## **B. Penerapan Hukuman dalam Praktik**

Penerapan hukuman terhadap korporasi melibatkan sejumlah langkah dan proses yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas. Proses ini biasanya melibatkan penilaian oleh lembaga pengawas, pengadilan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai penerapan hukuman terhadap korporasi dalam praktik:

### **1. Proses Penjatuhan Hukuman**

Proses penjatuhan hukuman terhadap korporasi dimulai dengan tahap investigasi dan pengumpulan bukti yang mendalam. Pada tahap ini, otoritas hukum atau regulator melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti terkait pelanggaran yang diduga dilakukan oleh perusahaan. Proses investigasi ini dapat melibatkan berbagai metode, seperti audit menyeluruh, wawancara dengan saksi atau karyawan, dan analisis dokumen-dokumen perusahaan. Contohnya, kasus Volkswagen, yang terkenal karena manipulasi data emisi, memerlukan investigasi komprehensif yang melibatkan berbagai otoritas lingkungan dan regulator kendaraan di beberapa negara. Investigasi ini tidak hanya penting untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung tuduhan, tetapi juga untuk memahami skala dan dampak pelanggaran yang terjadi.

Setelah bukti yang memadai terkumpul, pihak berwenang melanjutkan dengan mengajukan tuntutan hukum terhadap korporasi.

Tuntutan ini merupakan langkah resmi yang melibatkan penetapan tuduhan spesifik terkait pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam tahap ini, pemerintah atau lembaga pengawas mengajukan gugatan yang merinci jenis pelanggaran dan tuntutan hukum yang diajukan terhadap perusahaan. Misalnya, pada tahun 2021, perusahaan farmasi Purdue Pharma menghadapi tuntutan hukum besar terkait krisis opioid. Tuntutan ini diwakili oleh pemerintah dan berbagai negara bagian yang mengklaim bahwa Purdue Pharma bertanggung jawab atas penyebaran obat opioid dan dampak buruk yang ditimbulkan. Tuntutan hukum ini merupakan tahap kritis yang menentukan arah dari proses hukum selanjutnya.

Setelah tuntutan diajukan, kasus kemudian dilanjutkan ke pengadilan, di mana proses hukum berlangsung secara formal. Di pengadilan, bukti-bukti yang dikumpulkan dipresentasikan, dan argumen hukum dari kedua belah pihak dipertimbangkan. Pengadilan berperan dalam mengevaluasi bukti dan argumen untuk menentukan jenis hukuman yang sesuai berdasarkan pelanggaran yang dilakukan dan dampaknya terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kasus HSBC pada tahun 2012 melibatkan pengadilan yang mengadili bank tersebut atas tuduhan pencucian uang. Setelah memeriksa bukti dan argumen yang ada, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan denda besar sebagai hukuman. Proses pengadilan ini merupakan tahap di mana pertimbangan hukum dan fakta-fakta kasus dipertimbangkan secara menyeluruh.

Setelah keputusan pengadilan ditetapkan, hukuman dijatuhkan dan korporasi diwajibkan untuk mematuhi sanksi yang telah ditetapkan. Hukuman ini bisa berupa berbagai bentuk sanksi, seperti denda, pembatasan kegiatan bisnis, atau bahkan pembubaran perusahaan dalam kasus-kasus yang sangat serius. Sebagai contoh, setelah insiden tumpahan minyak Deepwater Horizon pada tahun 2010, perusahaan BP dikenakan denda besar yang mencapai miliaran dolar. Denda ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman finansial tetapi juga sebagai bentuk kompensasi terhadap kerugian yang ditimbulkan dan dorongan bagi perusahaan lain untuk mematuhi regulasi dan standar keselamatan. Penjatuhan hukuman ini merupakan langkah akhir dalam proses hukum, memastikan bahwa korporasi yang melanggar hukum menerima konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

## **2. Jenis-Jenis Hukuman dan Implementasinya**

Jenis-jenis hukuman terhadap korporasi, serta implementasinya, berperan penting dalam memastikan kepatuhan hukum dan memberikan efek jera. Denda, salah satu bentuk hukuman yang paling umum, dikenakan untuk memberikan efek jera dan mengkompensasi kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran. Jumlah denda biasanya ditentukan berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran dan dampaknya terhadap masyarakat atau individu. Proses implementasi denda melibatkan penetapan jumlah yang harus dibayar, penjadwalan pembayaran, dan pemantauan untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan. Sebagai contoh, Volkswagen dikenakan denda besar yang dibayar dalam beberapa tahap sebagai hasil dari skandal emisi. Denda ini dirancang untuk menutupi kerugian dan memberikan efek jera bagi perusahaan serta industri secara keseluruhan (Harris, 2022).

Pembatasan kegiatan adalah bentuk hukuman yang mencakup larangan terhadap korporasi untuk melakukan aktivitas tertentu atau memasuki pasar baru. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah perusahaan dari melanjutkan atau memperluas kegiatan yang dapat menimbulkan risiko atau bahaya lebih lanjut. Implementasi pembatasan ini melibatkan pengawasan ketat terhadap kegiatan perusahaan untuk memastikan bahwa mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Contoh implementasi ini dapat dilihat dalam kasus BP, yang menghadapi pembatasan terhadap kegiatan eksplorasi minyak setelah tumpahan minyak Deepwater Horizon. Pemerintah dan regulator memastikan bahwa BP tidak melanggar ketentuan pembatasan yang diberlakukan selama periode tersebut (Green, 2023).

Pengawasan eksternal adalah bentuk hukuman di mana pengawas independen ditunjuk untuk memantau kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan regulasi. Pengawas eksternal bertanggung jawab untuk memantau operasi perusahaan dan melaporkan hasil pengawasan kepada pihak berwenang. Implementasi pengawasan eksternal melibatkan penunjukan pengawas yang kompeten, serta penetapan jadwal laporan dan tindak lanjut berdasarkan temuan pengawasan. Misalnya, Volkswagen diwajibkan untuk melaporkan kepatuhan secara berkala setelah skandal emisi. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar mematuhi standar dan regulasi yang telah ditetapkan serta untuk mendeteksi potensi pelanggaran di masa mendatang (Taylor, 2023).

Kompensasi dan restitusi melibatkan pembayaran kepada pihak yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan. Bentuk hukuman ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dengan mengkompensasi kerugian yang dialami oleh individu atau kelompok yang terdampak. Implementasi kompensasi dan restitusi melibatkan proses verifikasi pembayaran dan distribusi kompensasi kepada pihak yang berhak. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan keputusan pengadilan, yang kemudian dipantau untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan benar. Contohnya, DuPont diwajibkan untuk membayar kompensasi besar kepada penduduk yang terdampak pencemaran bahan kimia PFOA, dan proses ini melibatkan verifikasi yang cermat serta distribusi kompensasi yang adil (Roberts, 2022).

Pembubaran korporasi adalah hukuman yang paling berat, di mana perusahaan dipaksa untuk menghentikan semua operasinya dan dibubarkan secara hukum. Pembubaran ini biasanya diterapkan jika pelanggaran dianggap sangat serius dan sistematis. Implementasi pembubaran melibatkan penutupan operasi perusahaan, penyelesaian kewajiban hukum yang tersisa, dan pengaturan pembagian aset perusahaan. Sebagai contoh, Drexel Burnham Lambert dibubarkan pada tahun 1990 setelah terlibat dalam berbagai pelanggaran keuangan besar. Proses pembubaran ini melibatkan langkah-langkah untuk menutup semua kegiatan perusahaan dan menyelesaikan kewajiban finansial dan hukum yang ada (Adams, 2023).

### **3. Pengaruh Hukuman terhadap Operasional Korporasi**

Hukuman yang dikenakan pada korporasi memiliki berbagai dampak signifikan yang mempengaruhi operasional perusahaan secara menyeluruh. Salah satu dampak utama adalah pada aspek finansial. Denda besar, seperti yang dikenakan pada perusahaan BP setelah tumpahan minyak Deepwater Horizon, dapat berdampak berat pada kesehatan finansial perusahaan. Denda yang mencapai miliaran dolar ini tidak hanya menyebabkan kerugian langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Biaya denda yang besar dapat mengurangi likuiditas perusahaan, mempengaruhi arus kas, dan memaksa perusahaan untuk melakukan pemotongan biaya atau restrukturisasi finansial. Hal ini sering kali

memengaruhi keputusan investasi dan kemampuan perusahaan untuk membiayai proyek-proyek baru (Miller, 2023).

Hukuman juga dapat merusak reputasi perusahaan secara signifikan. Reputasi adalah aset penting bagi perusahaan, dan kerusakan pada citra perusahaan dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Contohnya, skandal emisi Volkswagen menyebabkan kerusakan reputasi yang besar. Manipulasi data emisi yang terungkap tidak hanya menurunkan penjualan kendaraan tetapi juga merusak citra perusahaan di mata publik dan investor. Kepercayaan yang hilang sulit untuk dipulihkan dan dapat berdampak pada hubungan bisnis dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang (Hoffman, 2022).

Pengaruh hukuman terhadap kebijakan dan proses internal perusahaan juga sangat signifikan. Setelah menghadapi tindakan hukum atau denda, perusahaan sering kali diharuskan untuk menilai dan mengubah kebijakan serta prosedur internal. Ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan hukum yang baru dan untuk menghindari pelanggaran di masa depan. Misalnya, setelah skandal emisi, Volkswagen harus melakukan perubahan besar dalam kebijakan dan proses internalnya. Perusahaan ini mengimplementasikan langkah-langkah baru untuk meningkatkan transparansi, kepatuhan, dan pengawasan internal. Perubahan ini termasuk pembenahan dalam sistem pengujian emisi dan pengembangan kebijakan yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran hukum di masa mendatang (Taylor, 2023).

Dampak hukuman pada karyawan juga perlu diperhatikan. Ketika perusahaan menghadapi krisis finansial akibat denda atau pembatasan, sering kali terjadi pengurangan pekerjaan, perubahan dalam struktur organisasi, atau bahkan pemotongan gaji. Dampak ini dapat menurunkan moral karyawan dan menyebabkan ketidakstabilan tenaga kerja. Sebagai contoh, BP mengalami pemotongan pekerjaan dan restrukturisasi setelah menghadapi denda besar dan pembatasan kegiatan. Karyawan yang terdampak mungkin merasa tidak aman mengenai masa depan, yang dapat mempengaruhi produktivitas dan motivasi. Selain itu, perubahan struktural dalam organisasi sering kali mengakibatkan redistribusi tanggung jawab dan perubahan dalam dinamika kerja, yang dapat menambah tantangan dalam menjaga stabilitas operasional (Green, 2023).

#### **4. Kasus-Kasus Penting terkait Hukuman terhadap Korporasi**

Kasus-kasus hukum terhadap korporasi sering kali memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana pelanggaran hukum dapat mengakibatkan hukuman yang signifikan dan perubahan besar dalam operasional perusahaan. Salah satu kasus penting adalah skandal Volkswagen pada tahun 2015. Volkswagen terkena hukuman berat setelah terungkap bahwa perusahaan tersebut telah melakukan manipulasi data emisi kendaraan untuk memenuhi standar lingkungan yang ketat. Manipulasi ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang secara ilegal mengubah hasil tes emisi untuk kendaraan diesel. Sebagai akibat dari pelanggaran ini, Volkswagen dikenakan denda miliaran dolar yang mencerminkan beratnya pelanggaran dan dampaknya terhadap konsumen serta lingkungan. Selain denda, perusahaan juga menghadapi pembatasan pada aktivitas eksplorasi dan pengawasan eksternal yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan di masa mendatang. Pengawasan eksternal ini dirancang untuk mencegah pelanggaran serupa dan memastikan bahwa Volkswagen mematuhi semua peraturan yang berlaku (Hoffman, 2022).

Kasus kedua yang signifikan adalah bencana tumpahan minyak Deepwater Horizon yang melibatkan perusahaan BP pada tahun 2010. Tumpahan minyak ini adalah salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarah modern, yang disebabkan oleh kegagalan mekanis dan operasional pada sumur minyak BP di Teluk Meksiko. Akibat dari insiden ini, BP dikenakan denda yang sangat besar dan diwajibkan untuk membayar kompensasi kepada korban serta memperbaiki kerusakan lingkungan. Selain denda dan kompensasi, BP juga menghadapi pembatasan ketat terhadap kegiatan eksplorasi minyaknya. Perusahaan harus menjalani proses pemantauan ketat untuk memastikan bahwa mematuhi semua standar keselamatan dan lingkungan yang baru. Pemantauan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut dan untuk memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan yang diperlukan diterapkan secara efektif (Miller, 2023).

Kasus ketiga adalah krisis opioid yang melibatkan Purdue Pharma pada tahun 2021. Purdue Pharma, produsen obat opioid OxyContin, menghadapi tuntutan hukum besar terkait kontribusinya terhadap krisis opioid yang telah menyebabkan krisis kesehatan masyarakat di Amerika Serikat. Tuntutan ini mencakup denda besar dan pembayaran kompensasi kepada negara bagian serta individu yang



terdampak oleh krisis opioid. Selain denda dan kompensasi, Purdue Pharma juga mengalami perubahan besar dalam operasional, termasuk pembubaran sebagian perusahaan dan restrukturisasi yang signifikan. Penyelesaian ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh produk dan untuk mendukung upaya pemulihan bagi korban. Proses pembubaran dan restrukturisasi ini mencerminkan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan serta upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi (Jones, 2023).

### **C. Pengaruh Hukuman terhadap Operasional Korporasi**

Hukuman terhadap korporasi tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan finansial, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas terhadap operasional perusahaan. Pengaruh hukuman ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari dampak finansial, reputasi, hingga perubahan internal yang signifikan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai berbagai pengaruh hukuman terhadap operasional korporasi:

#### **1. Dampak Finansial**

Hukuman yang dikenakan terhadap korporasi sebagai akibat dari pelanggaran hukum dapat menimbulkan dampak finansial yang mendalam dan luas. Salah satu dampak finansial yang paling langsung adalah biaya langsung yang terkait dengan hukuman, seperti denda dan kompensasi. Misalnya, dalam kasus Volkswagen setelah skandal emisi yang terungkap pada tahun 2015, perusahaan tersebut dikenakan denda miliaran dolar. Denda besar ini tidak hanya mencerminkan beratnya pelanggaran, tetapi juga memberikan dampak langsung yang signifikan pada neraca keuangan perusahaan. Selain denda, Volkswagen juga harus menanggung biaya pengacara untuk menyelesaikan litigasi serta biaya terkait dengan pemulihan reputasi dan peningkatan kepatuhan. Semua ini berkontribusi pada beban finansial yang berat bagi perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk berinvestasi dan beroperasi secara efektif di masa depan (Hoffman, 2022).

Skandal atau pelanggaran hukum yang mendasari hukuman sering kali menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan. Ketika pelanggan kehilangan kepercayaan terhadap sebuah perusahaan akibat pelanggaran, dampak langsungnya sering terlihat dalam penurunan

penjualan produk atau layanan. Sebagai contoh, setelah skandal emisi, Volkswagen mengalami penurunan tajam dalam penjualan kendaraan. Pelanggan yang sebelumnya loyal mungkin memilih untuk berpindah ke merek lain yang dianggap lebih etis dan dapat dipercaya. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada pendapatan langsung perusahaan, tetapi juga dapat merusak posisi pasar dalam jangka panjang, memperburuk dampak finansial dari skandal tersebut (Harris, 2022).

## **2. Dampak Reputasi**

Dampak reputasi akibat hukuman yang dikenakan pada perusahaan sering kali memiliki efek yang mendalam dan meluas, mempengaruhi berbagai aspek operasional dan hubungan bisnis. Salah satu dampak utama adalah kerugian citra perusahaan. Ketika sebuah perusahaan terlibat dalam skandal atau pelanggaran hukum, citra di mata publik, pelanggan, dan mitra bisnis dapat hancur. Reputasi yang buruk ini tidak hanya mengurangi kepercayaan konsumen tetapi juga dapat menghalangi peluang bisnis baru. Sebagai contoh, skandal emisi yang melibatkan Volkswagen pada tahun 2015 menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan. Praktik manipulasi data emisi yang terungkap membuat konsumen merasa dikhianati dan meragukan integritas perusahaan. Akibatnya, kepercayaan konsumen terhadap Volkswagen menurun, mempengaruhi penjualan dan hubungan bisnis secara keseluruhan (Hoffman, 2022).

Hukuman juga dapat mengakibatkan penurunan hubungan dengan pemangku kepentingan seperti investor, regulator, dan mitra bisnis. Perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hukum sering kali menghadapi penurunan hubungan strategis dan kepercayaan dari pihak-pihak ini. Sebagai contoh, setelah tumpahan minyak Deepwater Horizon pada tahun 2010, BP mengalami penurunan hubungan yang signifikan dengan investor dan mitra bisnis. Kerusakan lingkungan yang luas dan biaya terkait dengan pemulihan serta hukuman yang dijatuhkan mengakibatkan ketidakstabilan finansial dan reputasi BP. Hal ini berdampak pada hubungan dengan investor yang mulai meragukan keamanan investasi dan mitra bisnis yang mungkin tidak lagi ingin terlibat dengan perusahaan yang reputasinya tercemar (Green, 2023).

### **3. Perubahan Kebijakan dan Proses Internal**

Perubahan kebijakan dan proses internal sering kali menjadi langkah penting yang harus diambil oleh perusahaan setelah menghadapi hukuman berat atau skandal besar. Penyesuaian kebijakan internal adalah langkah pertama yang krusial dalam proses pemulihan. Setelah skandal emisi yang melibatkan Volkswagen terungkap, perusahaan tersebut menyadari perlunya perubahan signifikan dalam kebijakan dan prosedur internal. Penyesuaian ini termasuk revisi mendalam terhadap kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko untuk memastikan bahwa praktik-praktik sebelumnya yang menyebabkan pelanggaran tidak akan terulang. Volkswagen mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan, termasuk peningkatan pelaporan internal dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, guna memulihkan kepercayaan publik dan regulator (Taylor, 2023).

Implementasi kontrol internal baru juga menjadi bagian integral dari proses reformasi. Setelah tumpahan minyak Deepwater Horizon, BP menghadapi tekanan untuk memperkenalkan kontrol internal yang lebih ketat untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang diperbarui dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Perusahaan ini memperkenalkan sistem audit dan kontrol kepatuhan yang lebih mendalam, serta prosedur baru untuk pengawasan risiko dan pemantauan kepatuhan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa semua operasi perusahaan mematuhi standar lingkungan dan keamanan yang ketat, serta untuk mengurangi kemungkinan kejadian serupa di masa depan (Miller, 2023).

### **4. Dampak pada Karyawan**

Hukuman yang dijatuhkan kepada perusahaan sering kali memiliki dampak signifikan terhadap karyawan, memengaruhi berbagai aspek dari pekerjaan dan kondisi kerja secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling langsung adalah pengurangan pekerjaan dan restrukturisasi organisasi. Ketika perusahaan menghadapi denda besar atau penurunan pendapatan yang signifikan, seperti yang dialami BP setelah tumpahan minyak Deepwater Horizon, perusahaan sering kali harus mengurangi jumlah karyawan sebagai bagian dari proses restrukturisasi. Ini dilakukan untuk mengurangi biaya operasional dan memastikan kelangsungan finansial perusahaan. Restrukturisasi ini tidak hanya melibatkan pengurangan tenaga kerja, tetapi juga perubahan

dalam struktur organisasi dan strategi bisnis, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpastian di kalangan karyawan (Green, 2023).

Moral dan motivasi karyawan sering kali terpengaruh secara signifikan. Ketika perusahaan terlibat dalam skandal atau menghadapi tekanan finansial, karyawan mungkin merasa tidak aman dan kurang termotivasi. Kasus Volkswagen yang melibatkan skandal emisi adalah contoh di mana moral karyawan terdampak serius. Restrukturisasi yang menyusul skandal ini, termasuk pemotongan biaya dan perubahan kebijakan internal, membuat banyak karyawan merasa tidak stabil dan kurang termotivasi. Perusahaan harus menghadapi tantangan tambahan untuk memulihkan moral dan motivasi karyawan. Ini melibatkan komunikasi yang transparan dan upaya untuk meningkatkan rasa keterlibatan dan dukungan di tempat kerja (Harris, 2022).

#### **D. Kasus-Kasus Penting terkait Hukuman terhadap Korporasi**

Kasus-kasus hukum yang melibatkan hukuman terhadap korporasi sering kali memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sistem peradilan menangani pelanggaran hukum oleh entitas bisnis. Kasus-kasus ini sering kali mencakup denda yang besar, pengaturan kembali operasi perusahaan, dan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap reputasi dan keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa kasus penting terkait hukuman terhadap korporasi yang memberikan gambaran mengenai bagaimana hukuman dapat memengaruhi operasi dan strategi perusahaan:

##### **1. *Volkswagen Emissions Scandal (2015)***

Skandal emisi Volkswagen, yang terungkap pada tahun 2015, merupakan salah satu contoh paling mencolok dari pelanggaran lingkungan yang melibatkan teknologi tinggi. Kasus ini berawal ketika ditemukan bahwa Volkswagen (VW) telah menggunakan perangkat lunak ilegal untuk memanipulasi hasil tes emisi kendaraan diesel. Perangkat ini dirancang untuk mendeteksi saat kendaraan sedang diuji dan mengubah kinerja mesin agar memenuhi standar emisi, padahal dalam kondisi normal, emisi jauh melebihi batas yang diizinkan. Penipuan ini secara sistematis melanggar regulasi lingkungan di berbagai negara, mengungkapkan bahwa VW telah melakukan

kecurangan besar-besaran terhadap konsumen dan regulator (Hoffman, 2022).

Hukuman yang dijatuhkan terhadap VW setelah skandal ini sangat berat. Perusahaan menghadapi denda yang sangat besar, termasuk denda kriminal sebesar \$2,8 miliar di Amerika Serikat. Selain itu, VW juga diwajibkan untuk membayar lebih dari \$25 miliar dalam bentuk denda dan kompensasi di seluruh dunia. Denda ini mencakup pembayaran kompensasi kepada konsumen yang terkena dampak, serta biaya untuk memperbaiki kendaraan yang terpengaruh dan investasi dalam teknologi bersih. Skandal ini tidak hanya menguras kas perusahaan tetapi juga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, termasuk penurunan pendapatan dan penurunan tajam dalam nilai saham VW. Pasar saham merespons secara negatif terhadap berita ini, yang mencerminkan kepercayaan investor yang menurun terhadap perusahaan (Harris, 2022).

Skandal ini memaksa Volkswagen untuk melakukan perubahan besar dalam kebijakan dan proses internalnya. Perusahaan menjalani restrukturisasi besar-besaran untuk memperbaiki kesalahan dan menghindari pelanggaran serupa di masa depan. Salah satu langkah penting yang diambil VW adalah memperkenalkan kebijakan baru yang berfokus pada transparansi dan kepatuhan. Ini termasuk penerapan kontrol internal yang lebih ketat, peningkatan pelatihan untuk karyawan, dan perubahan dalam manajemen risiko untuk memastikan bahwa seluruh proses dan produk perusahaan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan dan etika yang lebih baik di masa depan (Taylor, 2023).

## **2. BP Deepwater Horizon Oil Spill (2010)**

Tumpahan minyak Deepwater Horizon, yang terjadi pada 20 April 2010, merupakan salah satu bencana lingkungan paling parah dalam sejarah modern. Bencana ini terjadi di Teluk Meksiko ketika rig pengeboran minyak Deepwater Horizon, yang dioperasikan oleh BP, mengalami ledakan dan kebakaran yang mengakibatkan tumpahan minyak besar-besaran ke laut. Kejadian ini mengakibatkan pencemaran luas di perairan, merusak ekosistem laut, dan menimbulkan kerugian besar bagi industri perikanan dan komunitas pesisir. BP, sebagai operator rig, mendapat kritik tajam karena manajemen keselamatan yang buruk

dan respons bencana yang tidak memadai, yang memperparah dampak dari kecelakaan tersebut (Miller, 2023).

Sebagai hasil dari skandal ini, BP menghadapi hukuman dan konsekuensi yang sangat berat. Perusahaan setuju untuk membayar denda pidana sebesar \$4,5 miliar sebagai bagian dari penyelesaian hukum yang melibatkan tuntutan dari pemerintah Amerika Serikat. Selain denda, BP juga menghadapi biaya ganti rugi yang totalnya lebih dari \$20 miliar. Biaya ini mencakup perbaikan lingkungan yang diperlukan untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan kompensasi kepada individu serta komunitas yang terkena dampak langsung dari bencana tersebut. Pembayaran ganti rugi ini melibatkan pengelolaan dana besar untuk membersihkan pencemaran, memulihkan habitat yang rusak, dan mendukung ekonomi lokal yang terdampak (Green, 2023).

Tumpahan minyak ini juga memaksa BP untuk melakukan restrukturisasi besar dalam organisasi. Perusahaan memperkenalkan perubahan signifikan dalam kebijakan keselamatan dan manajemen risiko untuk memenuhi standar regulasi yang lebih ketat. Restrukturisasi ini termasuk peninjauan kembali prosedur operasional standar, peningkatan pelatihan keselamatan untuk karyawan, dan penguatan kontrol internal untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan praktik keselamatan dan mengurangi risiko di seluruh operasi perusahaan (Miller, 2023).

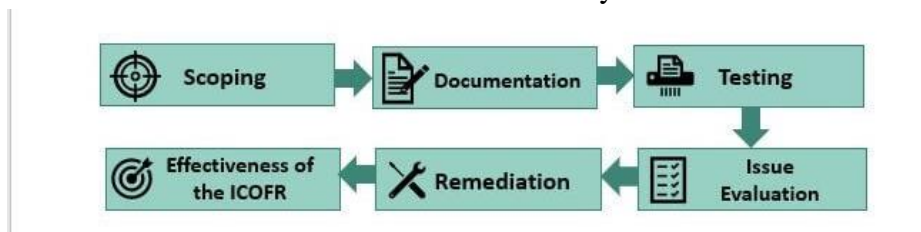
### **3. Enron Scandal (2001)**

Skandal Enron, yang terungkap pada tahun 2001, adalah salah satu krisis korporasi paling merusak dalam sejarah bisnis Amerika Serikat. Enron Corporation, yang dulunya merupakan salah satu perusahaan energi terbesar dan paling berharga di dunia, terlibat dalam skandal akuntansi besar yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan penipuan terhadap investor. Perusahaan ini menggunakan teknik akuntansi kreatif untuk menyembunyikan utang besar dan mempercantik laporan keuangan, sehingga menciptakan gambaran yang menyesatkan tentang kesehatan finansial perusahaan. Manipulasi ini melibatkan penggunaan entitas spekulatif yang tidak dicantumkan dalam neraca perusahaan dan strategi akuntansi yang kompleks untuk mengalihkan utang dan kerugian dari laporan keuangan resmi (Smith, 2021).

Akibat skandal ini, Enron mengalami kebangkrutan pada akhir 2001, yang merupakan salah satu kebangkrutan terbesar dalam sejarah AS. Banyak eksekutif tinggi Enron, termasuk CEO Jeffrey Skilling dan pendiri Kenneth Lay, menghadapi tuntutan pidana dan dijatuhi hukuman penjara, dihukum karena terlibat dalam penipuan dan manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan kerugian besar bagi investor dan pemegang saham. Meskipun Enron sudah bangkrut, perusahaan tersebut setuju untuk membayar ganti rugi kepada investor yang terdampak oleh penipuan. Proses ini melibatkan pengembalian uang kepada investor dan upaya untuk mengurangi dampak finansial dari kebangkrutan perusahaan (Johnson, 2021).

Skandal Enron juga memicu reformasi besar dalam regulasi akuntansi di Amerika Serikat. Salah satu hasil langsung dari kasus ini adalah penerapan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002, yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Undang-undang ini menetapkan standar yang lebih ketat untuk pelaporan keuangan, pengawasan internal, dan auditor independen, serta meningkatkan hukuman untuk pelanggaran akuntansi. Sarbanes-Oxley Act bertujuan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dengan memastikan bahwa perusahaan lebih transparan dalam laporan keuangan dan bahwa praktik akuntansi diawasi dengan lebih ketat (Smith, 2021).

Gambar 5. Sarbanes-Oxley Act



Sumber: *Wall Street Mojo*

Dampak reputasi dari skandal Enron tidak hanya terbatas pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga merusak reputasi industri akuntansi secara keseluruhan. Kasus ini menyebabkan penurunan besar dalam kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan, serta terhadap integritas dan profesionalisme akuntan. Banyak perusahaan dan individu mulai meragukan keakuratan dan keandalan laporan keuangan,

yang berdampak pada cara investor dan regulator memandang laporan keuangan dan akuntansi secara umum (Johnson, 2021).

#### **4. Purdue Pharma dan Krisis Opioid (2019)**

Kasus Purdue Pharma dan krisis opioid merupakan salah satu skandal kesehatan masyarakat terbesar di era modern. Purdue Pharma, perusahaan farmasi yang dikenal sebagai pembuat OxyContin, dituduh terlibat dalam praktik pemasaran yang menyesatkan dan menyembunyikan risiko ketergantungan obat yang serius dari produk. Sejak diperkenalkan pada tahun 1996, OxyContin menjadi salah satu obat penghilang rasa sakit yang paling banyak diresepkan, namun, ternyata perusahaan tersebut secara aktif mempromosikan obat tersebut dengan cara yang mengabaikan potensi risiko kecanduan. Purdue Pharma dituduh memanfaatkan kekuatan pemasaran untuk memperluas penggunaan OxyContin, mengklaim bahwa obat tersebut aman dan tidak menimbulkan risiko kecanduan yang signifikan, meskipun bukti menunjukkan sebaliknya (Jones, 2023).

Sebagai hasil dari tuduhan ini, Purdue Pharma menghadapi hukuman yang sangat berat. Pada tahun 2019, perusahaan setuju untuk membayar lebih dari \$8,3 miliar sebagai bagian dari penyelesaian hukum yang mencakup denda, kompensasi kepada korban, dan biaya lainnya. Penyelesaian ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah hukum Amerika Serikat dan mencerminkan dampak besar dari krisis opioid terhadap masyarakat dan sistem kesehatan. Selain denda yang besar, Purdue Pharma juga menghadapi perubahan mendalam dalam caranya memasarkan produknya. Perusahaan harus menghentikan praktik pemasaran yang menyesatkan dan menerapkan kebijakan baru untuk memastikan bahwa produk dipasarkan secara etis dan transparan (Jones, 2023).

Purdue Pharma juga mengalami restrukturisasi besar-besaran sebagai bagian dari penyelesaian. Restrukturisasi ini mencakup pengawasan ketat terhadap operasi bisnis untuk memastikan bahwa mematuhi regulasi yang lebih ketat dan tidak terlibat dalam praktik yang dapat merugikan masyarakat. Proses ini melibatkan perubahan signifikan dalam struktur organisasi perusahaan, termasuk pengawasan lebih ketat dari pihak ketiga dan penyesuaian dalam operasi bisnis untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi (Jones, 2023). Pengaruh sosial dari kasus Purdue Pharma sangat besar dan



meluas. Skandal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya ketergantungan obat opioid, tetapi juga memicu perubahan dalam kebijakan pemerintah dan regulasi terkait obat-obatan. Kasus ini membahas kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam cara obat-obatan dikendalikan dan dipasarkan, serta memperkuat upaya untuk mengatasi krisis ketergantungan yang telah mempengaruhi jutaan orang di seluruh Amerika Serikat. Pemerintah dan lembaga kesehatan kini lebih fokus pada upaya pencegahan dan pengobatan ketergantungan opioid, serta meningkatkan regulasi terhadap produsen obat untuk mencegah krisis serupa di masa depan (Jones, 2023).

# **BAB VII**

## **TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI**

---

Penegakan hukum terhadap korporasi menghadirkan tantangan yang kompleks dan multidimensi. Di satu sisi, korporasi memiliki sumber daya yang besar dan jaringan yang luas, yang sering kali membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dan rumit. Hambatan utama dalam penegakan hukum ini termasuk kekurangan regulasi yang memadai, keterbatasan kapasitas dan keahlian aparat penegak hukum, serta perbedaan yurisdiksi internasional yang sering kali menghambat proses investigasi dan penuntutan. Selain itu, adanya faktor internal seperti lemahnya pengawasan internal dan budaya perusahaan yang tidak mendukung kepatuhan hukum juga memperburuk situasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk revisi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, penerapan teknologi canggih, serta kolaborasi internasional yang lebih erat. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dapat ditingkatkan, sehingga mampu menciptakan iklim bisnis yang lebih transparan dan adil.

### **A. Hambatan dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap korporasi menghadapi sejumlah hambatan yang dapat mengurangi efektivitas upaya untuk menegakkan aturan dan regulasi. Hambatan-hambatan ini mencakup kompleksitas struktur korporasi, ketidakseimbangan sumber daya antara korporasi dan aparat penegak hukum, serta masalah sistemik seperti korupsi dan birokrasi yang lambat.

#### **1. Kompleksitas Struktur Korporasi**

Kompleksitas struktur korporasi menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap entitas bisnis besar. Korporasi

yang memiliki jaringan luas sering kali terdiri dari berbagai anak perusahaan, afiliasi, dan unit operasional yang tersebar di banyak yurisdiksi. Struktur yang rumit ini tidak hanya menciptakan tantangan dalam hal koordinasi dan manajemen internal tetapi juga dalam hal penegakan hukum. Sebagai contoh, sebuah perusahaan multinasional mungkin memiliki beberapa anak perusahaan yang terdaftar di berbagai negara, dengan masing-masing memiliki struktur hukum dan operasional yang berbeda. Dalam kasus pelanggaran hukum, kompleksitas ini memungkinkan perusahaan untuk memindahkan aset, tanggung jawab, atau kegiatan yang bermasalah di antara entitas yang berbeda, sehingga mempersulit upaya penegakan hukum untuk mengidentifikasi siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dan di mana sanksi harus diterapkan.

Menurut Coffee (2020), salah satu implikasi dari struktur korporasi yang kompleks adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan jaringan entitasnya untuk memindahkan risiko dan tanggung jawab hukum. Misalnya, jika sebuah anak perusahaan terlibat dalam praktik ilegal atau tidak etis, korporasi induk dapat mencoba untuk memisahkan diri dari masalah tersebut dengan menyatakan bahwa anak perusahaan tersebut beroperasi secara independen. Dalam hal ini, perusahaan besar dapat mencoba menghindari tanggung jawab hukum atau finansial dengan menggunakan teknik seperti transfer harga, pembentukan entitas baru, atau penempatan aset di luar jangkauan yurisdiksi yang relevan.

Struktur korporasi yang rumit dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam hal kepemilikan dan kontrol, yang dapat memperparah kesulitan dalam penegakan hukum. Penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam melacak siapa yang memiliki kekuasaan akhir untuk membuat keputusan atau siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tertentu. Ketika ada banyak lapisan manajemen dan struktur organisasi yang berbeda, menemukan titik tanggung jawab yang jelas menjadi semakin sulit. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan atau korupsi, memahami siapa yang mengambil keputusan atau bertanggung jawab dalam berbagai tingkatan organisasi sering kali memerlukan investigasi yang mendalam dan kompleks.

Korporasi besar sering kali beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan sistem hukum dan peraturan yang berbeda. Setiap negara mungkin memiliki aturan dan persyaratan yang berbeda mengenai kepatuhan, pelaporan, dan sanksi. Struktur ini memungkinkan

perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan hukum antar negara untuk menghindari atau meminimalkan dampak hukum. Sebagai contoh, korporasi multinasional mungkin memindahkan operasinya ke negara dengan regulasi yang lebih longgar untuk mengurangi risiko hukum atau biaya kepatuhan. Ini menambah lapisan kompleksitas dalam penegakan hukum lintas batas.

## **2. Ketidakseimbangan Sumber Daya**

Ketidakseimbangan sumber daya antara korporasi besar dan lembaga penegak hukum sering kali menciptakan tantangan signifikan dalam upaya penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi. Korporasi besar, terutama yang terlibat dalam skandal atau pelanggaran hukum, biasanya memiliki akses ke tim hukum yang kuat dan sumber daya finansial yang melimpah, dapat mengerahkan kekuatan finansial ini untuk mengelola dan menghadapi tuduhan hukum dengan cara yang sangat terstruktur dan strategis. Hal ini termasuk mengontrak firma hukum besar yang memiliki keahlian khusus, serta menginvestasikan uang dalam litigasi yang panjang dan kompleks.

Lembaga penegak hukum sering kali beroperasi dengan anggaran yang terbatas dan sumber daya yang tidak memadai, mungkin kekurangan staf, teknologi, dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan berkelanjutan. Menurut Wells (2019), kekurangan sumber daya ini dapat menghambat kemampuan lembaga penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang cukup, melakukan analisis yang mendalam, dan menyusun kasus yang kuat melawan korporasi besar. Dalam banyak kasus, lembaga penegak hukum harus beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, yang memaksa untuk memprioritaskan kasus-kasus tertentu dan sering kali mengabaikan kasus lain yang tidak memiliki sumber daya yang memadai.

Ketidakseimbangan ini menciptakan situasi di mana korporasi besar dapat memanfaatkan kekuatan finansial untuk menunda proses hukum secara strategis, dapat menggunakan berbagai teknik hukum, seperti penundaan proses, pengajuan banding yang berulang, atau bahkan mencari kesepakatan penyelesaian yang menguntungkan. Dengan cara ini, dapat menghindari pengadilan atau mengurangi dampak dari hukuman yang mungkin dikenakan. Selain itu, korporasi besar dapat memanfaatkan kapasitas finansial untuk melakukan negosiasi

penyelesaian yang lebih menguntungkan, yang sering kali melibatkan pembayaran kompensasi yang lebih rendah atau persetujuan untuk kebijakan kepatuhan yang kurang ketat daripada yang seharusnya.

### **3. Korupsi dan Birokrasi yang Lambat**

Korupsi dan ketidakefisienan birokrasi merupakan hambatan signifikan dalam penegakan hukum terhadap korporasi, sering kali mengakibatkan proses hukum yang lambat dan berbelit-belit. Sistem peradilan yang tidak efisien, yang ditandai dengan prosedur yang kompleks dan birokrasi yang berlebihan, sering kali menyebabkan penundaan yang signifikan dalam penyelesaian kasus. Proses hukum yang memakan waktu lama ini dapat mengurangi efek jera dari hukuman yang mungkin dikenakan kepada korporasi, mengurangi keefektifan sanksi sebagai alat pencegahan pelanggaran hukum.

Menurut Transparency International (2021), korupsi dalam sistem peradilan dapat memperburuk masalah ini dengan mempengaruhi hasil kasus. Dalam lingkungan yang terpapar korupsi, korporasi besar atau individu dengan kekuatan finansial mungkin dapat memengaruhi keputusan hukum melalui penyuapan atau tekanan politik. Korupsi di sistem peradilan tidak hanya menghambat kecepatan proses hukum, tetapi juga dapat merusak integritas dan keadilan dari hasil yang dicapai. Misalnya, dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang memiliki kepentingan finansial dapat menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi hakim atau pejabat peradilan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan keputusan yang bias atau tidak adil.

Proses hukum yang lambat dan birokrasi yang kompleks sering kali menyebabkan frustrasi di kalangan publik dan penegak hukum. Ketika korporasi menghadapi tuduhan, namun prosesnya berlarut-larut dan penuh dengan prosedur administratif yang rumit, hal ini tidak hanya memperlambat pencapaian keadilan tetapi juga memberi kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencari celah dalam hukum atau strategi untuk menghindari sanksi. Prosedur yang rumit ini dapat menciptakan peluang bagi korporasi untuk memanfaatkan celah hukum, mencari perjanjian yang lebih menguntungkan, atau bahkan menghindari hukuman sama sekali.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus korupsi besar, seperti yang terjadi di negara-negara dengan sistem peradilan yang kurang efisien, proses hukum dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum

mencapai keputusan akhir. Selama periode ini, korporasi dapat terus beroperasi, dan dampak dari pelanggaran mungkin tidak terasa sepenuhnya. Penundaan ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik dalam sistem hukum, di mana masyarakat merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan dengan efektif dan bahwa pelanggar hukum dapat menghindari tanggung jawab.

#### **4. Kekurangan Keahlian dan Pelatihan**

Kekurangan keahlian dan pelatihan di kalangan aparat penegak hukum merupakan hambatan besar dalam penegakan hukum terhadap korporasi, yang sering kali melibatkan isu-isu kompleks dan teknis. Penyelidikan terhadap pelanggaran korporasi, terutama yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, dan teknologi, memerlukan tingkat keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh aparat penegak hukum. Menurut Braithwaite (2019), tanpa pelatihan yang memadai dalam bidang-bidang ini, aparat hukum mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami dan menangani kompleksitas kasus-kasus korporasi yang sering kali melibatkan manipulasi laporan keuangan, penipuan, dan teknologi canggih.

Kasus-kasus pelanggaran korporasi sering kali melibatkan data keuangan yang rumit, struktur perusahaan yang kompleks, serta penggunaan teknologi canggih untuk menyembunyikan pelanggaran. Misalnya, dalam kasus skandal akuntansi atau penipuan pajak, aparat penegak hukum perlu memahami detail teknis dari laporan keuangan, metode akuntansi yang digunakan, dan bagaimana teknik manipulasi diterapkan. Tanpa keahlian khusus dalam akuntansi atau forensik keuangan, aparat penegak hukum mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi dan membuktikan pelanggaran, yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengurangi efektivitasnya.

Pelanggaran korporasi sering kali melibatkan teknologi informasi dan sistem komputer yang canggih. Kasus seperti peretasan data atau penggunaan perangkat lunak ilegal memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi informasi dan bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk menyembunyikan pelanggaran. Jika aparat penegak hukum tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam teknologi informasi atau analisis data, mungkin tidak dapat melacak jejak digital atau memahami bagaimana teknologi digunakan untuk pelanggaran. Hal

ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan membangun kasus yang solid.

Kekurangan pelatihan ini juga berkontribusi pada ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk mengikuti perkembangan baru dalam teknik dan strategi yang digunakan oleh korporasi untuk menghindari pengawasan. Korporasi seringkali memanfaatkan inovasi teknologi untuk memperbarui metode dalam menghindari deteksi, dan jika aparat penegak hukum tidak terus memperbarui pengetahuan, akan kesulitan untuk mengikuti dan mengatasi metode baru yang digunakan oleh pelanggar. Sebagai contoh, kasus Enron dan Volkswagen menunjukkan bagaimana manipulasi laporan keuangan dan penghindaran regulasi dapat menjadi sangat rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang akuntansi dan teknologi. Tanpa keahlian khusus dalam bidang-bidang ini, aparat penegak hukum mungkin tidak mampu mengidentifikasi semua aspek dari pelanggaran dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk penuntutan. Dalam kasus seperti ini, kesulitan dalam menangani kompleksitas kasus dapat mengakibatkan penundaan dalam penyelidikan, kegagalan dalam menuntut pelanggar, atau bahkan pembebasan.

## **5. Masalah Yurisdiksi**

Masalah yurisdiksi menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap korporasi, terutama ketika pelanggaran melibatkan aktivitas lintas batas. Korporasi multinasional sering kali beroperasi di banyak negara, masing-masing dengan sistem hukum dan regulasi yang berbeda. Ketika pelanggaran terjadi, menentukan yurisdiksi yang tepat untuk penegakan hukum menjadi kompleks dan sering kali tidak jelas. Gunningham (2020) mengemukakan bahwa koordinasi antar negara dan lembaga penegak hukum internasional sering kali tidak efektif, yang membuat penegakan hukum terhadap korporasi global menjadi sangat sulit.

Korporasi yang beroperasi di banyak negara dapat memanfaatkan perbedaan dalam hukum dan regulasi antar yurisdiksi untuk menghindari tanggung jawab hukum. Misalnya, sebuah perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran lingkungan di satu negara mungkin dapat berpindah ke negara lain dengan regulasi yang lebih lemah atau lebih sedikit pengawasan, sehingga menghindari konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Proses hukum di masing-masing negara dapat sangat bervariasi

dalam hal prosedur, sanksi, dan tingkat kepatuhan, yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi untuk melindungi diri dari penegakan hukum yang efektif.

Ketidakefektifan koordinasi internasional juga memperburuk masalah ini. Dalam banyak kasus, lembaga penegak hukum internasional dan badan pengatur yang berfungsi di tingkat global, seperti Interpol atau organisasi perdagangan internasional, tidak memiliki otoritas langsung untuk menuntut atau mengadili korporasi secara langsung. Sebaliknya, seringkali bergantung pada kerjasama sukarela dari negara-negara anggota, yang bisa tidak konsisten atau tidak memadai. Hal ini menyebabkan situasi di mana meskipun ada bukti pelanggaran yang substansial, proses penegakan hukum bisa terhambat oleh kurangnya kerjasama internasional dan perbedaan dalam pendekatan hukum.

Pada kasus skandal emisi Volkswagen, perusahaan yang memiliki operasi global terlibat dalam manipulasi data emisi untuk memenuhi standar lingkungan di berbagai negara. Penegakan hukum terhadap Volkswagen harus melibatkan berbagai yurisdiksi, masing-masing dengan proses hukum dan regulasi yang berbeda. Mengkoordinasikan upaya antara negara-negara yang berbeda, yang mungkin memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda, menjadi tantangan besar. Proses ini memerlukan komunikasi dan kerjasama yang intensif antar negara, serta mekanisme untuk menyelaraskan hukum dan prosedur di tingkat internasional, yang sering kali tidak memadai.

Kendala yurisdiksi juga dapat menyebabkan masalah dalam pengumpulan bukti dan penyampaian saksi. Bukti yang relevan untuk kasus mungkin tersebar di beberapa negara, dan memperoleh akses hukum untuk informasi tersebut bisa memerlukan proses hukum yang panjang dan kompleks. Selain itu, saksi yang penting untuk kasus mungkin berada di negara yang berbeda, dan mendapatkan kesaksiannya bisa memerlukan proses ekstradisi atau kerjasama internasional yang rumit. Untuk mengatasi masalah yurisdiksi ini, penting untuk memperkuat kerjasama internasional dan meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum di berbagai negara. Penyusunan perjanjian internasional yang jelas dan mekanisme yang efisien untuk penegakan hukum lintas batas dapat membantu mengatasi tantangan ini. Selain itu, pengembangan kerangka hukum global yang seragam dapat memperbaiki efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi



multinasional dengan menciptakan standar yang lebih konsisten dan transparan.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum**

Efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Faktor-faktor ini meliputi regulasi yang jelas dan tegas, sumber daya dan kapabilitas aparat penegak hukum, teknologi dan sistem informasi, serta kerjasama antar lembaga dan yurisdiksi. Menurut penelitian terbaru, faktor-faktor ini berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya penegakan hukum terhadap korporasi (Sutherland, 2020; Levi, 2021).

### **1. Regulasi yang Jelas dan Tegas**

Regulasi yang jelas dan tegas merupakan komponen krusial dalam memastikan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Undang-undang dan peraturan yang dirancang dengan baik memberikan dasar hukum yang solid bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran secara efektif dan konsisten. Gunningham (2020) menekankan bahwa regulasi yang jelas mengurangi ambiguitas hukum dan memastikan penerapan sanksi yang sesuai. Ketika regulasi diatur dengan tepat, tidak hanya menetapkan standar yang harus dipatuhi, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana pelanggaran dapat dikenai sanksi. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran dan apa konsekuensinya, serta memperkuat kemampuan lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugas secara adil dan efektif.

Regulasi yang tidak jelas atau tumpang tindih dapat menciptakan kebingungan yang signifikan. Dalam situasi di mana peraturan atau undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan tindakan tertentu sebagai pelanggaran, atau ketika terdapat ketidaksesuaian antara regulasi yang berbeda, korporasi sering kali dapat memanfaatkan celah hukum ini. Dengan memanfaatkan ambiguitas atau perbedaan dalam peraturan, korporasi bisa menghindari tanggung jawab atau menunda proses hukum. Misalnya, dalam kasus di mana peraturan lingkungan tidak jelas

tentang batas emisi yang diizinkan atau prosedur pelaporan, perusahaan mungkin melakukan tindakan yang mendekati batas regulasi tanpa melanggar hukum secara teknis, sehingga menghindari sanksi yang seharusnya diterima.

Regulasi yang tumpang tindih juga dapat menyebabkan kebingungan tambahan. Ketika beberapa badan pengatur atau tingkat pemerintahan memiliki aturan yang berbeda untuk isu yang sama, ini dapat menyebabkan keraguan mengenai aturan mana yang harus diikuti dan bagaimana penerapannya. Hal ini tidak hanya menyulitkan perusahaan untuk mematuhi peraturan, tetapi juga membebani sistem hukum dengan sengketa tentang yurisdiksi dan interpretasi aturan yang berbeda. Dalam skenario seperti ini, penegakan hukum dapat menjadi tidak konsisten dan tidak efektif, memungkinkan pelanggar untuk mengeksploitasi ketidakpastian tersebut.

Regulasi yang jelas dan tegas menciptakan kepastian hukum yang memfasilitasi penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Dengan menetapkan aturan yang spesifik dan terukur, undang-undang ini mengurangi potensi untuk interpretasi yang berbeda dan memberikan pedoman yang lebih terperinci tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran dan bagaimana hal tersebut akan ditindaklanjuti. Hal ini tidak hanya membantu aparat penegak hukum dalam menentukan tindakan yang tepat tetapi juga membantu korporasi dalam memahami kewajiban dan menghindari pelanggaran sejak awal.

## **2. Sumber Daya dan Kapabilitas Aparat Penegak Hukum**

Sumber daya dan kapabilitas aparat penegak hukum berperan krusial dalam menentukan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi. Aspek ini mencakup berbagai elemen, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan teknis. Untuk dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi dengan efektif, aparat penegak hukum memerlukan keterampilan, pengetahuan, dan peralatan yang memadai. Braithwaite (2019) menunjukkan bahwa kekurangan sumber daya sering kali menjadi hambatan signifikan dalam penyelidikan kejahatan korporasi. Sumber daya manusia yang memadai adalah faktor kunci. Penegak hukum yang terlatih dengan baik dan memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang seperti akuntansi, keuangan, dan teknologi informasi lebih mampu untuk

menyelidiki kasus-kasus yang kompleks. Kasus pelanggaran korporasi sering kali melibatkan transaksi finansial yang rumit dan sistem teknologi yang canggih, yang memerlukan keahlian khusus untuk menganalisis dan memahami. Tanpa staf yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang-bidang ini, aparat penegak hukum mungkin tidak dapat menangani kompleksitas kasus tersebut dengan efektif, sehingga mengurangi kemungkinan penyelesaian kasus yang berhasil.

Sumber daya keuangan yang memadai juga sangat penting. Proses penyelidikan dan penuntutan kasus korporasi yang besar sering kali membutuhkan investasi yang substansial. Ini mencakup biaya untuk analisis data, audit forensik, pengacara, dan berbagai biaya operasional lainnya. Jika lembaga penegak hukum tidak memiliki anggaran yang cukup, mungkin kesulitan untuk menjalankan penyelidikan secara menyeluruh atau dapat terpaksa mengurangi cakupan penyelidikan. Dalam banyak kasus, kekurangan dana dapat menyebabkan penundaan, penyelidikan yang kurang mendalam, atau bahkan pembatalan kasus, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Peralatan dan teknologi juga berperan penting dalam penegakan hukum terhadap korporasi. Penyelidikan kejahatan korporasi sering kali memerlukan penggunaan perangkat lunak analisis data canggih, sistem pelacakan transaksi keuangan, dan teknologi investigasi lainnya. Teknologi ini membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pola, mendeteksi pelanggaran, dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mendukung tuntutan hukum. Tanpa akses ke teknologi yang tepat, proses penyelidikan dapat menjadi kurang efisien dan kurang akurat, mengurangi kemungkinan berhasilnya kasus.

### **3. Teknologi dan Sistem Informasi**

Kemajuan teknologi dan sistem informasi modern telah membawa dampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum, terutama dalam konteks kejahatan korporasi yang kompleks. Teknologi forensik digital, analisis data besar, dan sistem informasi terintegrasi berfungsi sebagai alat penting bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan bukti secara lebih efektif. Menurut Wells (2019), perkembangan teknologi ini memungkinkan penegak hukum untuk mengidentifikasi pola pelanggaran dan menelusuri transaksi keuangan

yang rumit dua hal yang sering dimanfaatkan oleh korporasi untuk menyembunyikan kegiatan ilegal.

Teknologi forensik digital, misalnya, memungkinkan penyelidik untuk menganalisis data dari perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan server dengan sangat detail. Teknologi ini dapat memulihkan data yang telah dihapus atau tersembunyi, serta mendeteksi jejak digital yang ditinggalkan selama aktivitas ilegal. Dalam kasus korporasi, teknologi ini bisa digunakan untuk mengungkap email internal, dokumen keuangan, dan komunikasi yang dapat memberikan wawasan berharga tentang pola pelanggaran atau penyembunyian informasi. Dengan kemampuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap data digital, aparat penegak hukum dapat mengumpulkan bukti yang kuat dan komprehensif untuk mendukung kasus.

Analisis data besar (*big data analytics*) berperan krusial dalam penegakan hukum terhadap korporasi. Dengan volume data yang terus berkembang pesat, teknologi ini memungkinkan penegak hukum untuk menganalisis sejumlah besar informasi dengan kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi. Analisis data besar dapat membantu mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat dalam data yang lebih kecil atau lebih terfragmentasi. Dalam konteks kejahatan korporasi, teknologi ini dapat digunakan untuk melacak transaksi keuangan yang rumit, memetakan hubungan antara entitas yang berbeda, dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa. Misalnya, analisis data dapat mengungkap skema penghindaran pajak atau pencucian uang dengan membahas anomali dalam laporan keuangan.

#### **4. Kerjasama Antar Lembaga dan Yurisdiksi**

Efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi sering kali dipengaruhi oleh tingkat kerjasama antar lembaga dan yurisdiksi. Dalam dunia globalisasi saat ini, banyak korporasi beroperasi di berbagai negara, dan kejahatan korporasi sering kali melibatkan beberapa yurisdiksi yang berbeda. Situasi ini menuntut koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum dari berbagai negara untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum dapat diatasi secara komprehensif. Levi (2021) menggarisbawahi pentingnya kerjasama internasional dalam mempercepat proses penegakan hukum dan memastikan bahwa korporasi tidak dapat menghindari tanggung jawab hanya dengan berpindah dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain.

Ketika sebuah korporasi terlibat dalam kegiatan ilegal yang melibatkan beberapa negara, tantangan utama adalah mengatasi perbedaan dalam hukum dan sistem peradilan di masing-masing yurisdiksi. Setiap negara memiliki peraturan hukum, prosedur, dan kebijakan yang berbeda, yang dapat mempersulit upaya koordinasi dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum. Misalnya, sebuah korporasi yang terlibat dalam pencucian uang mungkin menggunakan jaringan internasional untuk memindahkan dana ilegal melalui berbagai negara. Tanpa kerjasama yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum di negara-negara yang terlibat, sulit untuk melacak aliran dana, mengidentifikasi pelaku utama, dan mengambil tindakan hukum yang efektif.

Kerjasama internasional yang baik memerlukan adanya mekanisme komunikasi dan koordinasi yang kuat antara lembaga penegak hukum di berbagai negara. Ini sering melibatkan perjanjian bilateral atau multilateral yang memfasilitasi pertukaran informasi dan bantuan dalam penyelidikan. Contoh dari inisiatif ini adalah Interpol, yang menyediakan platform bagi negara-negara untuk berkolaborasi dalam penegakan hukum lintas batas. Interpol membantu dalam berbagi informasi terkait kejahatan dan menyediakan dukungan dalam operasi internasional, termasuk dalam kasus-kasus kejahatan korporasi yang melibatkan banyak negara.

Kerjasama internasional juga menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah perbedaan dalam standar hukum dan prosedur antara negara-negara. Negara-negara mungkin memiliki peraturan yang berbeda mengenai bukti, hak-hak terdakwa, atau proses pengadilan, yang dapat menyulitkan integrasi dan penerapan hukum yang konsisten. Selain itu, perbedaan dalam budaya hukum dan prioritas politik dapat mempengaruhi kemauan dan kemampuan negara-negara untuk bekerja sama. Kadang-kadang, ketegangan politik atau perbedaan kepentingan nasional dapat menghambat kemajuan dalam kasus-kasus yang melibatkan korporasi besar.

## **5. Integritas dan Transparansi**

Integritas dan transparansi merupakan pilar utama dalam penegakan hukum yang efektif, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korporasi besar. Ketika aparat penegak hukum bertindak dengan integritas tinggi dan transparansi, hal ini tidak hanya

memperkuat kepercayaan publik tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan secara adil dan objektif. Menurut Transparency International (2021), integritas dalam penegakan hukum melibatkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang ketat dan penghindaran dari segala bentuk korupsi, sedangkan transparansi mengacu pada keterbukaan dalam proses hukum dan pengambilan keputusan.

Ketika aparat penegak hukum bertindak dengan integritas, memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran korporasi didasarkan pada bukti yang jelas dan proses yang objektif. Integritas mengharuskan aparat penegak hukum untuk menolak segala bentuk tekanan eksternal, baik dari pihak korporasi, politik, maupun individu lain yang mungkin mencoba mempengaruhi hasil penyelidikan atau keputusan hukum. Dalam konteks ini, integritas tidak hanya melibatkan kejujuran pribadi, tetapi juga komitmen terhadap standar etika profesional yang tinggi.

Transparansi dalam penegakan hukum, di sisi lain, berkaitan dengan keterbukaan dalam proses hukum. Ini termasuk membuat informasi tentang penyelidikan dan tindakan hukum tersedia untuk publik, serta menjelaskan dasar-dasar keputusan yang diambil. Transparansi memastikan bahwa proses hukum dapat diawasi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, yang membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan tanpa adanya kepentingan tersembunyi yang mempengaruhi hasil akhir.

Kurangnya integritas dan transparansi, sebaliknya, dapat merusak upaya penegakan hukum dan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada korporasi yang melanggar hukum. Ketika sistem hukum korup atau tidak transparan, ada risiko bahwa keputusan hukum mungkin dipengaruhi oleh suap, tekanan politik, atau kepentingan pribadi. Dalam situasi seperti itu, korporasi yang memiliki sumber daya besar dan pengaruh politik mungkin dapat menghindari tanggung jawab atas pelanggaran. Korupsi dalam sistem hukum dapat menciptakan celah bagi korporasi untuk menghindari sanksi atau mendapatkan perlakuan istimewa, yang mengurangi efektivitas penegakan hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

## C. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mengatasi Tantangan

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi tantangan penegakan hukum terhadap korporasi, bertanggung jawab tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara adil, transparan, dan efektif. Berikut ini adalah beberapa peran kunci yang dimainkan oleh aparat penegak hukum dalam konteks ini:

### 1. Investigasi dan Penyidikan

Investigasi dan penyidikan merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan korporasi. Peran utama aparat penegak hukum dalam konteks ini adalah untuk mengumpulkan bukti yang relevan, mewawancarai saksi yang dapat memberikan informasi penting, dan menganalisis data secara menyeluruh untuk membangun kasus yang kuat. Menurut Friedrichs (2020), keberhasilan dalam proses investigasi sangat bergantung pada kemampuan penyidik untuk memahami dan mengatasi kompleksitas struktur korporasi serta metode yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang sering kali tersembunyi dengan baik.

Korporasi, terutama yang besar, memiliki struktur yang kompleks dan berlapis-lapis, dengan berbagai anak perusahaan dan afiliasi yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Hal ini sering kali menciptakan tantangan besar dalam proses investigasi, karena informasi dan bukti dapat tersebar di banyak lokasi dan sistem yang berbeda. Untuk mengatasi tantangan ini, aparat penegak hukum perlu memiliki keterampilan khusus dalam memahami bagaimana struktur korporasi berfungsi dan bagaimana informasi dan aliran uang dikelola di dalamnya. Ini termasuk kemampuan untuk melacak transaksi keuangan yang kompleks, mengidentifikasi pola yang mencurigakan, dan mengungkap hubungan yang mungkin tidak langsung terlihat.

Proses penyidikan dimulai dengan pengumpulan bukti yang relevan, yang meliputi dokumen keuangan, email, laporan internal, dan catatan komunikasi lainnya. Bukti ini sering kali memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi tanda-tanda pelanggaran atau ketidaksesuaian. Selain itu, wawancara dengan saksi, termasuk mantan karyawan atau pihak ketiga yang mungkin memiliki informasi berharga, merupakan langkah penting dalam memperoleh informasi yang tidak

tertulis atau mendapatkan klarifikasi tentang bukti yang ada. Selama proses investigasi, penyidik harus mampu mengidentifikasi dan memahami berbagai metode yang digunakan oleh korporasi untuk melakukan kejahatan. Ini termasuk teknik penghindaran, seperti penggunaan shell companies atau struktur hukum yang rumit untuk menyembunyikan aktivitas ilegal. Misalnya, korporasi mungkin menggunakan struktur multi-lapisan untuk memindahkan aset atau melakukan transaksi yang dirancang untuk menyamarkan tujuan sebenarnya. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengurai teknik-teknik ini sangat penting untuk membangun kasus yang solid.

## **2. Penuntutan**

Setelah proses investigasi selesai, langkah berikutnya dalam penegakan hukum adalah penuntutan, yang merupakan tahap di mana aparat penegak hukum menyusun dakwaan dan menuntut korporasi atau individu yang terlibat dalam tindak pidana. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana korporasi dan keterampilan untuk menyajikan bukti secara meyakinkan di pengadilan. Levi (2021) menekankan bahwa keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada koordinasi yang erat antara jaksa dan penyidik untuk memastikan bahwa kasus yang diajukan memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung oleh bukti yang memadai. Penuntutan dimulai dengan penyusunan dakwaan, yang merupakan langkah penting untuk menentukan dasar hukum dari kasus tersebut. Jaksa harus mengidentifikasi dan merumuskan dakwaan yang relevan berdasarkan hasil investigasi, memastikan bahwa semua elemen dari tindak pidana dapat dibuktikan di pengadilan. Dalam konteks korporasi, ini sering kali melibatkan berbagai pelanggaran hukum, seperti penipuan, pelanggaran peraturan lingkungan, atau penghindaran pajak, yang memerlukan perhatian khusus dalam penyusunannya.

Salah satu tantangan utama dalam penuntutan kasus korporasi adalah menyajikan bukti yang kompleks dan sering kali teknis dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengadilan. Bukti dalam kasus korporasi biasanya melibatkan data keuangan yang rumit, komunikasi internal, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang mungkin memerlukan penjelasan ahli untuk diinterpretasikan. Jaksa harus mampu menyaring informasi ini dan mengartikulasikannya dengan jelas kepada hakim atau juri, yang mungkin tidak memiliki latar belakang khusus



dalam bidang tersebut. Levi (2021) menekankan pentingnya koordinasi antara jaksa dan penyidik selama proses ini. Koordinasi yang efektif memastikan bahwa semua bukti yang relevan dipertimbangkan dan bahwa dakwaan yang diajukan mencerminkan hasil investigasi dengan akurat. Penyidik sering kali memiliki informasi teknis dan detail yang mendalam tentang kasus tersebut, sementara jaksa bertanggung jawab untuk merumuskan dakwaan dan strategi hukum. Kerjasama yang baik antara kedua pihak sangat penting untuk membangun kasus yang kuat dan berhasil di pengadilan.

### **3. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas**

Di dunia penegakan hukum korporasi yang semakin kompleks, pengembangan kapasitas dan pelatihan aparat penegak hukum berperan krusial dalam memastikan efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus terus-menerus mengasah keterampilan dan pengetahuan untuk menghadapi tantangan baru yang muncul dalam kasus-kasus korporasi. Ini mencakup pelatihan dalam teknik investigasi canggih, pemahaman tentang teknologi terbaru, serta pengetahuan mendalam tentang regulasi dan peraturan yang terus berkembang. Menurut Gunningham (2020), program pelatihan yang berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tetap up-to-date dengan perkembangan terkini dalam bidang hukum pidana korporasi. Teknik investigasi yang canggih adalah salah satu area utama di mana pelatihan sangat diperlukan. Investigasi kasus korporasi sering kali melibatkan analisis data besar, penggunaan teknologi forensik digital, dan teknik audit yang kompleks. Tanpa pelatihan yang memadai dalam metode dan alat terbaru, aparat penegak hukum mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengungkap bukti yang tersembunyi dalam struktur korporasi yang rumit. Pelatihan ini mencakup penguasaan perangkat lunak analisis data, teknik penelusuran transaksi keuangan, dan keterampilan dalam mengumpulkan serta menganalisis bukti digital.

Perkembangan teknologi yang cepat mempengaruhi cara-cara pelanggaran hukum dilakukan dan diungkap. Teknologi seperti blockchain, sistem keamanan siber, dan alat analisis data besar semakin sering digunakan dalam operasi korporasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memahami bagaimana teknologi ini bekerja dan bagaimana dapat digunakan atau disalahgunakan dalam konteks pelanggaran hukum. Program pelatihan harus memperbarui aparat

penegak hukum dengan pengetahuan tentang teknologi terbaru dan teknik-teknik yang relevan, sehingga dapat mengikuti perkembangan dan menyelidiki kasus dengan efektif. Pengetahuan tentang regulasi dan peraturan baru juga merupakan bagian penting dari pelatihan berkelanjutan. Hukum dan peraturan terkait korporasi sering mengalami perubahan, dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa memahami peraturan terbaru dan bagaimana penerapannya dalam kasus-kasus yang ditangani. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang undang-undang baru, perubahan dalam kebijakan pemerintah, dan standar internasional yang relevan dengan hukum pidana korporasi. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat menghindari kesalahan dalam penegakan hukum dan memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **4. Kolaborasi dan Koordinasi**

Kolaborasi dan koordinasi antar lembaga adalah kunci utama dalam penegakan hukum terhadap korporasi, terutama ketika kasus-kasus tersebut melibatkan elemen lintas yurisdiksi yang kompleks. Penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi sering kali memerlukan kerjasama erat antara berbagai entitas, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyelidiki dan menuntut tindakan melawan pelanggaran hukum yang melibatkan banyak negara. Friedrichs (2020) menekankan bahwa kolaborasi yang efektif dapat secara signifikan memperkuat kapasitas penegakan hukum dan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih lancar antara lembaga-lembaga yang terlibat. Pada kasus korupsi dan pelanggaran korporasi yang melibatkan transaksi internasional atau operasional lintas batas, aparat penegak hukum tidak bisa bekerja secara terisolasi. Perlu berkoordinasi dengan regulator keuangan yang dapat memberikan wawasan tentang transaksi dan praktik keuangan yang mencurigakan. Otoritas perpajakan juga berperan penting dalam menyelidiki penghindaran pajak dan pencucian uang yang sering kali merupakan bagian dari strategi pelanggaran korporasi. Kerjasama dengan lembaga-lembaga ini memungkinkan penyelidikan yang lebih menyeluruh dan integrasi informasi yang relevan dari berbagai sumber.

Di tingkat internasional, kolaborasi menjadi lebih penting lagi karena kejahatan korporasi sering kali melibatkan berbagai yurisdiksi dengan hukum dan regulasi yang berbeda. Dalam konteks ini, lembaga

penegak hukum dari berbagai negara harus bekerja sama untuk menyelaraskan strategi penyelidikan dan penuntutan. Pertukaran informasi antara lembaga penegak hukum internasional dapat mengatasi masalah yang timbul dari perbedaan hukum dan kebijakan yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Kolaborasi internasional ini sering difasilitasi oleh organisasi seperti INTERPOL dan Europol, yang menyediakan platform untuk pertukaran informasi dan koordinasi operasi lintas negara. Kolaborasi juga penting dalam hal berbagi teknologi dan sumber daya. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum di negara yang lebih maju mungkin memiliki akses ke teknologi forensik atau perangkat lunak analisis data yang tidak tersedia di negara lain. Dengan bekerja sama, lembaga penegak hukum dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mengungkap bukti dan mengidentifikasi pola pelanggaran yang mungkin sulit dilakukan tanpa alat tersebut. Selain itu, pelatihan bersama dan konsultasi teknis dapat membantu meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga penegak hukum di negara yang mungkin memiliki sumber daya terbatas.

## **5. Penggunaan Teknologi**

Pada penegakan hukum korporasi, pemanfaatan teknologi canggih menjadi faktor kunci untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat efektivitas investigasi. Teknologi forensik digital, analisis data besar, dan perangkat lunak pelacakan keuangan adalah alat-alat penting yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti dengan lebih efektif. Menurut Wells (2019), adopsi teknologi ini tidak hanya mempercepat proses investigasi tetapi juga meningkatkan akurasi dalam penemuan dan evaluasi bukti. Teknologi forensik digital adalah salah satu inovasi utama dalam penegakan hukum modern. Alat-alat ini dirancang untuk mengakses, memulihkan, dan menganalisis data dari perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan server. Dalam kasus pelanggaran korporasi, perangkat ini memungkinkan penyelidik untuk mengidentifikasi bukti yang mungkin disembunyikan atau dihapus, seperti email, dokumen digital, dan jejak aktivitas online. Dengan menggunakan teknologi forensik digital, aparat penegak hukum dapat mengungkap informasi kritis yang berhubungan dengan transaksi mencurigakan atau komunikasi internal yang mengindikasikan pelanggaran hukum.

Analisis data besar (*big data analytics*) juga berperan penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam investigasi korporasi. Korporasi besar sering kali menghasilkan volume data yang sangat besar dan kompleks. Analisis data besar memungkinkan penyelidik untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola dan anomali yang mungkin menunjukkan pelanggaran. Dengan teknik seperti pemrograman statistik dan machine learning, aparat penegak hukum dapat menemukan hubungan tersembunyi dalam data transaksi keuangan, yang bisa mengarahkannya pada bukti baru atau mengkonfirmasi kecurigaan yang ada. Perangkat lunak pelacakan keuangan adalah alat lain yang sangat berguna dalam investigasi korporasi. Alat ini dirancang untuk memantau dan menganalisis transaksi keuangan, serta melacak aliran uang dalam sistem keuangan. Dalam kasus-kasus pencucian uang atau penghindaran pajak, perangkat lunak ini membantu untuk melacak asal-usul dan tujuan dana, serta mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Dengan kemampuan untuk mengintegrasikan dan menganalisis data dari berbagai sumber keuangan, teknologi ini memberikan visibilitas yang lebih jelas terhadap struktur keuangan korporasi yang mungkin digunakan untuk menyembunyikan aktivitas ilegal.

## **D. Solusi dan Strategi Penegakan Hukum yang Efektif**

Penegakan hukum terhadap korporasi memerlukan strategi dan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Berbagai pendekatan dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, yang melibatkan perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penggunaan teknologi canggih. Berikut ini adalah beberapa solusi dan strategi yang dapat diterapkan:

### **1. Peningkatan Regulasi dan Kerangka Hukum**

Peningkatan regulasi dan kerangka hukum adalah langkah krusial dalam menghadapi tantangan kejahatan korporasi yang terus berkembang. Untuk memastikan bahwa undang-undang yang mengatur tindak pidana korporasi tetap relevan dan efektif, revisi dan harmonisasi regulasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Perubahan ekonomi dan teknologi yang cepat memerlukan pembaruan regulasi yang sesuai untuk menangani berbagai jenis pelanggaran yang mungkin timbul. Sebagai

contoh, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, aturan terkait kejahatan siber perlu diperbarui secara rutin. Peraturan yang ketinggalan zaman dapat membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam menangani kejahatan siber, seperti peretasan atau penipuan digital, yang semakin kompleks dan canggih. Regulasi yang tidak responsif terhadap perubahan teknologi bisa menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman.

Di samping itu, klarifikasi pertanggungjawaban korporasi merupakan aspek penting dalam pengembangan kerangka hukum yang efektif. Undang-undang harus menjelaskan dengan tegas bagaimana dan dalam kondisi apa korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh karyawannya. Hal ini mencakup penentuan standar yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, yang memungkinkan untuk penegakan hukum yang adil dan konsisten. Misalnya, beberapa negara telah mengadopsi prinsip tanggung jawab ketat (*strict liability*) dalam undang-undangnya, yang memungkinkan korporasi untuk dipertanggungjawabkan atas pelanggaran hukum bahkan tanpa adanya bukti kesalahan langsung dari pihak korporasi. Prinsip ini membantu memastikan bahwa korporasi tidak dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab dengan mengklaim bahwa tindakan kriminal dilakukan tanpa pengetahuan atau persetujuan.

Implementasi prinsip tanggung jawab ketat ini memerlukan bahwa undang-undang dengan jelas mendefinisikan skenario di mana tanggung jawab pidana korporasi berlaku. Misalnya, dalam kasus korupsi atau pelanggaran lingkungan, undang-undang harus memaparkan kondisi di mana tindakan karyawan, seperti penyuaipan atau pembuangan limbah berbahaya, dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi perusahaan. Tanpa klarifikasi yang memadai, ada risiko bahwa perusahaan dapat mengklaim ketidaktahuan atau menerapkan langkah-langkah pengendalian internal yang dianggap cukup untuk menghindari tanggung jawab. Dengan memiliki undang-undang yang jelas dan komprehensif, penegak hukum dapat lebih efektif dalam menuntut korporasi yang terlibat dalam tindakan kriminal, mengurangi peluang untuk eksploitasi celah hukum.

## **2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum**

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum adalah aspek krusial dalam memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi yang semakin kompleks. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan jaksa, perlu dilatih secara terus-menerus untuk menghadapi kejahatan korporasi yang terus berkembang. Pelatihan ini harus mencakup teknik investigasi canggih yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bukti yang rumit, serta analisis data besar yang sangat berguna dalam mengungkap pola pelanggaran dan transaksi keuangan yang tidak biasa. Dengan kemajuan teknologi, pemahaman mendalam tentang regulasi terbaru juga menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pelatihan harus mencakup aspek etika untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja dengan integritas tinggi, menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa proses hukum tetap adil dan transparan. Pendidikan berkelanjutan memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya mengikuti perkembangan terbaru dalam teknik investigasi dan regulasi, tetapi juga memelihara standar etika yang tinggi dalam penegakan hukum.

Pembentukan unit khusus dalam penegakan hukum yang fokus pada kejahatan korporasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus. Unit atau satuan tugas khusus ini dirancang untuk menangani kejahatan korporasi dengan lebih efisien dan efektif, mengingat kompleksitas dan spesifikasi kasus-kasus tersebut. Unit ini biasanya terdiri dari ahli forensik yang terampil dalam menganalisis bukti digital dan fisik, analis keuangan yang dapat memeriksa laporan keuangan dan transaksi untuk mendeteksi ketidaksesuaian, serta peneliti yang memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik korporasi dan regulasi yang relevan. Dengan mengumpulkan keahlian khusus ini dalam satu unit, aparat penegak hukum dapat lebih cepat dan tepat dalam mengidentifikasi kejahatan korporasi, merancang strategi investigasi yang efektif, dan mengumpulkan bukti yang solid untuk mendukung tuntutan hukum.

### **3. Penggunaan Teknologi Canggih**

Penggunaan teknologi canggih berperan vital dalam penegakan hukum, khususnya dalam mengungkap kejahatan korporasi yang sering kali tersembunyi di balik lapisan kompleksitas data dan transaksi. Teknologi forensik digital dan analisis data besar adalah dua alat utama yang sangat berharga dalam konteks ini. Forensik digital memungkinkan penyidik untuk menyelidiki dan memeriksa data elektronik secara mendalam, seperti transaksi keuangan, komunikasi digital, dan arsip elektronik lainnya. Dengan kemajuan teknologi, penyidik kini dapat mengakses dan menganalisis informasi yang sebelumnya sulit diungkap atau dipahami. Misalnya, alat forensik digital dapat membantu dalam melacak aliran dana yang rumit, mengidentifikasi anomali dalam transaksi keuangan, dan memulihkan data yang telah dihapus atau dimodifikasi.

Teknologi analisis data besar (*big data analytics*) melengkapi forensik digital dengan kemampuan untuk memproses dan menganalisis volume data yang sangat besar dan beragam. Menurut Wells (2019), analisis data besar memungkinkan identifikasi pola yang mencurigakan dan hubungan yang mungkin tidak terlihat dengan metode konvensional. Dengan menggunakan algoritma canggih dan teknik pembelajaran mesin, penyidik dapat mengidentifikasi tren dan pola yang menunjukkan adanya kegiatan ilegal atau penipuan. Teknologi ini dapat mengatasi tantangan besar dalam mengelola data yang masif dan kompleks, yang sering kali menjadi ciri khas kejahatan korporasi. Teknologi blockchain juga menawarkan potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi bisnis. Blockchain adalah sistem catatan digital yang bersifat terdesentralisasi dan tidak dapat diubah setelah data dicatat, menjadikannya alat yang efektif untuk mencegah manipulasi data dan penipuan. Dengan setiap transaksi dicatat dalam blok yang terhubung secara kriptografi dalam rantai yang tidak dapat diubah, blockchain memastikan integritas data dan mengurangi risiko pemalsuan.

### **4. Kolaborasi dan Koordinasi Internasional**

Kolaborasi dan koordinasi internasional merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, yang sering kali melibatkan tindakan lintas batas negara. Mengingat kompleksitas dan sifat global dari kejahatan korporasi, kerjasama internasional menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran yang melibatkan

beberapa yurisdiksi dapat ditangani secara efektif. Negara-negara perlu memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang, seperti pertukaran informasi, ekstradisi pelaku kejahatan, dan pelaksanaan hukuman. Friedrichs (2020) menekankan bahwa kolaborasi yang efektif antara lembaga penegak hukum internasional dapat mempercepat proses investigasi dan penuntutan. Ketika negara-negara berbagi informasi dan sumber daya, dapat mempercepat pengungkapan fakta dan penyelesaian kasus, mengurangi kemungkinan bahwa pelaku kejahatan dapat menghindari tanggung jawab dengan berpindah ke yurisdiksi lain.

Untuk mendukung kerjasama internasional ini, pembentukan kesepakatan dan perjanjian internasional berperan yang sangat penting. Perjanjian semacam ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari harmonisasi regulasi dan prosedur hukum antar negara hingga mekanisme sanksi dan denda. Harmonisasi regulasi antar negara membantu mengatasi masalah perbedaan hukum yang dapat menyulitkan penegakan hukum terhadap korporasi yang beroperasi di beberapa negara. Dengan adanya perjanjian internasional, negara-negara dapat menyelaraskan undang-undang dan prosedur, sehingga mempermudah proses investigasi dan penuntutan di tingkat global. Perjanjian internasional juga dapat mencakup mekanisme sanksi yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang melanggar hukum di berbagai yurisdiksi. Sanksi semacam ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran tidak hanya dihukum di satu negara, tetapi juga di negara-negara lain tempat korporasi tersebut beroperasi.

## **5. Pengawasan dan Pengendalian Internal**

Pengawasan dan pengendalian internal dalam korporasi merupakan elemen penting dalam upaya mencegah dan mendeteksi tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh individu atau kelompok di dalam perusahaan. Salah satu langkah kunci adalah pengembangan mekanisme pengawasan internal yang efektif. Mekanisme ini mencakup penerapan sistem manajemen risiko yang dapat mengidentifikasi dan menilai potensi risiko yang mungkin timbul dari berbagai aktivitas korporasi. Selain itu, audit internal berperan penting dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian secara berkala terhadap kepatuhan dan efektivitas prosedur serta kebijakan yang ada. Menurut Gunningham (2020), pengawasan internal yang kuat tidak hanya membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga



berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi potensi masalah sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum yang serius. Dengan sistem pengawasan yang baik, korporasi dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan mengimplementasikan langkah-langkah korektif secara proaktif.

Sistem whistleblowing atau pelaporan pelanggaran juga berperan krusial dalam pengawasan internal. Whistleblowing memungkinkan karyawan dan pihak lain untuk melaporkan tindakan atau praktik yang melanggar hukum atau etika tanpa harus menghadapi risiko pembalasan. Untuk memastikan efektivitas sistem whistleblowing, korporasi harus menciptakan budaya di mana pelapor merasa aman dan didorong untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Perlindungan hukum bagi pelapor sangat penting untuk mencegah tindakan pembalasan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran. Sistem whistleblowing yang efektif harus mencakup saluran komunikasi yang aman dan rahasia, serta prosedur yang jelas untuk menindaklanjuti laporan dan memastikan bahwa laporan tersebut ditangani secara serius.

Pengawasan internal yang solid dan sistem whistleblowing yang efektif bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan di mana potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani dengan cepat. Dengan adanya mekanisme pengawasan internal yang kuat, perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh organisasi. Ini membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan meningkatkan kepercayaan publik serta pemangku kepentingan terhadap integritas perusahaan. Di samping itu, penerapan teknologi canggih dalam pengawasan internal dapat memberikan manfaat tambahan. Sistem manajemen risiko berbasis teknologi dapat memonitor dan menganalisis data secara real-time untuk mengidentifikasi anomali atau pola yang mencurigakan. Teknologi forensik digital dan analisis data besar memungkinkan deteksi dini terhadap tindakan yang tidak sesuai dan mendukung proses audit internal yang lebih efektif.

## **BAB VIII**

# **PERBANDINGAN INTERNASIONAL**

---

---

Di era globalisasi, hukum pidana korporasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik serta terintegrasi. Perbandingan internasional dalam konteks hukum pidana korporasi memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana negara-negara lain menangani masalah pelanggaran oleh korporasi dan bagaimana strategi serta kebijakan yang diterapkan dapat memberikan solusi bagi masalah serupa di Indonesia. Dengan menganalisis sistem hukum pidana korporasi di berbagai negara, kita dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, efektivitas regulasi, dan inovasi dalam penegakan hukum yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks lokal. Melalui studi kasus dari negara-negara dengan sistem hukum yang beragam, Indonesia dapat belajar dari pengalaman internasional untuk memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan penegakan hukum pidana korporasi di dalam negeri. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan standar global, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum nasional dalam menghadapi tantangan korupsi dan pelanggaran oleh entitas korporasi.

### **A. Hukum Pidana Korporasi di Negara-Negara Lain**

Hukum pidana korporasi di berbagai negara telah berkembang untuk mengatasi kebutuhan akan regulasi yang lebih efektif terhadap perilaku ilegal korporasi. Penerapan hukum ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum. Berikut adalah gambaran mengenai hukum pidana korporasi di beberapa negara:

#### **1. Amerika Serikat**

Amerika Serikat dikenal dengan sistem hukum pidana korporasi yang canggih dan berpengaruh secara global, salah satu contohnya adalah penerapan undang-undang yang mengatur praktik anti-korupsi.

Salah satu undang-undang terkemuka yang mengatur hukum pidana korporasi di Amerika Serikat adalah *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), yang mulai diberlakukan pada tahun 1977. FCPA dirancang untuk melawan korupsi internasional dengan secara tegas melarang pembayaran suap kepada pejabat pemerintah asing sebagai cara untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis. Dengan mengatur ketentuan yang melarang penyuapan dalam konteks internasional, FCPA memberikan landasan hukum yang kuat untuk menuntut korporasi yang terlibat dalam praktik korupsi global. Menurut Spalding (2019), undang-undang ini telah menjadi model bagi banyak negara dalam merancang undang-undang anti-korupsi sendiri, berkontribusi pada upaya global melawan korupsi.

Amerika Serikat juga memiliki Sarbanes-Oxley Act, yang diberlakukan pada tahun 2002 sebagai respons terhadap skandal keuangan besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan seperti Enron dan WorldCom. Sarbanes-Oxley Act (SOX) memperkenalkan sejumlah reformasi penting yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pasar modal. Undang-undang ini memperketat pengawasan terhadap praktik akuntansi dan pelaporan keuangan, menetapkan standar yang lebih tinggi untuk audit dan laporan keuangan, serta memberikan perlindungan tambahan bagi investor. SOX mengharuskan perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Arlen (2020) menjelaskan bahwa reformasi yang dihasilkan oleh SOX berperan kunci dalam melindungi investor dan masyarakat dari tindakan penipuan dan pelanggaran keuangan yang dilakukan oleh korporasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pasar keuangan.

FCPA dan Sarbanes-Oxley Act tidak hanya melindungi investor dan masyarakat luas dari praktik korupsi dan pelanggaran keuangan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan korporasi di Amerika Serikat. Implementasi dan penegakan undang-undang ini menunjukkan komitmen negara tersebut terhadap integritas pasar dan akuntabilitas korporasi, serta memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengatasi dan mencegah kejahatan korporasi. Lebih jauh lagi, keberadaan undang-undang ini menggambarkan pendekatan proaktif Amerika Serikat dalam menangani isu-isu kejahatan korporasi, terutama dalam konteks global yang semakin kompleks. FCPA telah memperluas cakupan hukum anti-

korupsi ke tingkat internasional, sementara Sarbanes-Oxley Act telah menetapkan standar pengawasan internal dan pelaporan keuangan yang ketat. Kedua undang-undang ini mencerminkan upaya Amerika Serikat untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh praktek korupsi dan ketidakpatuhan keuangan, dan memberikan model bagi negara-negara lain dalam merumuskan regulasi serupa untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam dunia bisnis.

## 2. Inggris

Inggris memiliki salah satu sistem hukum anti-korupsi yang paling ketat di dunia, terutama melalui penerapan Undang-Undang Penyyuapan tahun 2010 (UK Bribery Act 2010). Undang-undang ini dirancang untuk melawan praktik penyyuapan dengan menetapkan standar tinggi dalam pencegahan dan penanganan korupsi. Salah satu keunikan dari UK Bribery Act adalah jangkauan ekstrateritorialnya, yang memungkinkan penegakan hukum terhadap perusahaan yang berbasis di luar Inggris namun memiliki kegiatan atau hubungan dengan Inggris. Ini berarti bahwa bahkan perusahaan yang tidak beroperasi secara langsung di Inggris tetapi memiliki aktivitas yang mempengaruhi pasar Inggris dapat diadili berdasarkan undang-undang ini. McKernan (2018) menjelaskan bahwa pendekatan ekstrateritorial ini memperkuat posisi Inggris sebagai negara yang serius dalam menanggulangi korupsi global, memaksa perusahaan multinasional untuk menaati standar anti-korupsi yang ketat, terlepas dari lokasi.

Salah satu fitur penting dari sistem hukum anti-korupsi Inggris adalah adanya *Deferred Prosecution Agreement* (DPA). DPA memberikan alternatif bagi perusahaan untuk menyelesaikan kasus hukum tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan sering kali melelahkan. Melalui DPA, perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hukum dapat mengakui kesalahan, membayar denda yang ditetapkan, dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem kepatuhan internal. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan kerjasama antara perusahaan dan penegak hukum, memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki praktik tanpa harus menghadapi peradilan yang mahal dan merugikan reputasi. Wells (2021) membahas bahwa DPA tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum tetapi juga mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan secara lebih cepat dan efektif. Ini

memungkinkan penegak hukum untuk fokus pada perusahaan yang benar-benar tidak kooperatif, sambil memberikan kesempatan bagi yang lain untuk memperbaiki diri dan menghindari konsekuensi yang lebih berat.

Kombinasi dari UK Bribery Act dan DPA mencerminkan pendekatan Inggris yang komprehensif dalam menanggulangi kejahatan korporasi dan penyuapan. Undang-undang ini tidak hanya mencakup standar yang ketat dalam hal pencegahan dan penindakan, tetapi juga menawarkan mekanisme untuk menyelesaikan kasus secara efisien dan adil. Dengan kebijakan ini, Inggris menunjukkan komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum anti-korupsi dan memberikan contoh bagi negara lain dalam merancang kebijakan serupa yang mendukung integritas dan akuntabilitas di sektor korporasi.

### 3. Australia

Australia memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani kejahatan korporasi, diatur melalui sejumlah undang-undang yang dirancang untuk memastikan kepatuhan dan integritas dalam dunia bisnis. Salah satu undang-undang utama adalah Corporations Act 2001, yang mengatur berbagai aspek operasional dan kepatuhan perusahaan di Australia. Undang-undang ini menetapkan aturan dan standar yang harus dipatuhi oleh perusahaan, termasuk kewajiban laporan keuangan, pengaturan tata kelola perusahaan, dan mekanisme untuk mengelola risiko. *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC) adalah lembaga pengawas utama yang diberi tanggung jawab untuk menegakkan dan memastikan kepatuhan terhadap Corporations Act. ASIC memiliki otoritas untuk melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran, mengajukan tuntutan, dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar hukum. Barnes (2022) menekankan bahwa peran ASIC sangat vital dalam menjaga integritas pasar keuangan Australia, dengan mengawasi pelaksanaan hukum secara ketat dan melakukan penegakan hukum yang diperlukan untuk menangani pelanggaran korporasi.

Di samping itu, Australia juga menerapkan peraturan anti-penyuapan yang tercantum dalam Criminal Code Act 1995. Undang-undang ini menetapkan ketentuan yang melarang penyuapan baik yang terjadi di dalam negeri maupun internasional. Anti-bribery provisions dalam Criminal Code Act mengatur tentang tindakan korupsi dan suap

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Australia, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan Australia harus mematuhi standar anti-penyuapan yang ketat, bahkan saat beroperasi di negara-negara lain. Johnson (2020) menjelaskan bahwa peraturan ini merupakan bagian dari upaya Australia untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi global, dengan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Australia tidak terlibat dalam praktik penyuapan yang dapat merusak integritas dan reputasinya di pasar internasional.

Dengan adanya *Corporations Act* 2001 dan *Criminal Code Act* 1995, Australia menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum korporasi yang adil dan transparan. *Corporations Act* memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur dan mengawasi operasi perusahaan, sementara *Criminal Code Act* menegakkan standar tinggi dalam pencegahan penyuapan dan korupsi di tingkat global. Kombinasi dari kedua undang-undang ini memberikan pendekatan yang menyeluruh dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam dunia korporasi dan keuangan, serta memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Australia bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.

#### **4. Kanada**

Kanada memiliki kerangka hukum yang tegas dalam menangani kejahatan korporasi melalui undang-undang yang dikenal sebagai *Corruption of Foreign Public Officials Act* (CFPOA). Diberlakukan pada tahun 1999, CFPOA dirancang untuk mencegah dan menghukum tindakan penyuapan pejabat publik asing oleh perusahaan Kanada. Undang-undang ini mencerminkan komitmen Kanada dalam memerangi korupsi global dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri tidak terlibat dalam praktik-praktik penyuapan yang merugikan integritas pasar internasional. CFPOA memberikan wewenang kepada otoritas Kanada untuk mengejar tindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penyuapan pejabat publik asing. Ini termasuk pembayaran suap yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh atau mempertahankan kontrak bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Dengan adanya undang-undang ini, Kanada memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara internasional harus mematuhi standar etika dan

hukum yang ketat, bahkan ketika melakukan bisnis di negara-negara yang mungkin memiliki peraturan anti-korupsi yang kurang ketat.

Menurut Green (2019), CFPOA memberikan sanksi yang berat bagi pelanggaran hukum terkait penyuapan. Hukuman ini dapat mencakup denda yang signifikan dan tindakan hukum lainnya yang dirancang untuk mengurangi insentif bagi perusahaan untuk terlibat dalam praktik korupsi. Dengan menegakkan hukuman yang tegas, Kanada berupaya menciptakan efek jera dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi kebijakan kepatuhan yang ketat terhadap aturan anti-penyuapan. Selain memberikan wewenang untuk menuntut pelanggaran, CFPOA juga mengatur tentang tanggung jawab perusahaan dalam hal kepatuhan. Perusahaan di Kanada diwajibkan untuk memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk mencegah penyuapan dan korupsi. Hal ini termasuk implementasi program pelatihan, audit internal, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis mematuhi ketentuan undang-undang. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat budaya kepatuhan dan transparansi dalam praktik bisnis.

## **5. Jerman**

Di Jerman, penegakan hukum pidana korporasi diatur oleh *Administrative Offences Act* (Ordnungswidrigkeitengesetz - OWiG), sebuah undang-undang yang memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan denda yang signifikan terhadap perusahaan yang melanggar aturan. OWiG mencakup berbagai pelanggaran administratif yang dapat dikenakan sanksi kepada perusahaan, mulai dari pelanggaran regulasi lingkungan hingga praktik bisnis yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Undang-undang ini memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan denda besar yang dirancang untuk mencegah dan mengurangi insiden pelanggaran hukum di tingkat korporasi. Dengan menetapkan sanksi finansial yang berat, Jerman berusaha menciptakan efek jera yang signifikan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan melanggar hukum.

Jerman juga memiliki undang-undang anti-korupsi yang sangat ketat yang mengatur tentang penyuapan, baik di dalam negeri maupun internasional. Undang-undang ini merupakan bagian dari komitmen Jerman untuk memerangi korupsi secara menyeluruh dan memastikan bahwa praktik bisnis di negara tersebut berjalan dengan integritas tinggi.

Dalam konteks internasional, Jerman secara aktif mematuhi standar global anti-korupsi dan berpartisipasi dalam konvensi internasional seperti Konvensi Anti-Korupsi OECD. Hal ini mencerminkan tekad Jerman untuk menjaga reputasi globalnya sebagai negara yang berkomitmen terhadap praktik bisnis yang bersih dan adil.

Menurut Ziegenhagen (2021), hukum di Jerman sangat menekankan pada pentingnya kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Konsep ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan yang ada tetapi juga menuntut perusahaan untuk mengembangkan sistem pengawasan internal dan prosedur kepatuhan yang efektif. Tata kelola perusahaan yang baik, termasuk implementasi kontrol internal dan audit berkala, dianggap sebagai elemen kunci dalam menghindari pelanggaran hukum dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan pendekatan ini, Jerman berusaha memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip etika yang tinggi dalam operasional sehari-hari.

## **B. Studi Kasus dari Beberapa Negara**

Penerapan hukum pidana korporasi di berbagai negara dapat dilihat melalui studi kasus yang menunjukkan bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan dalam praktik. Studi kasus ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana korporasi. Berikut adalah beberapa studi kasus dari beberapa negara:

### **1. Amerika Serikat: Kasus Enron**

Kasus Enron merupakan salah satu skandal korporasi paling mencolok dalam sejarah Amerika Serikat dan berfungsi sebagai titik balik penting dalam pengaturan hukum pidana korporasi. Pada awal 2000-an, Enron Corporation, yang pada saat itu merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di dunia, terlibat dalam praktik akuntansi yang sangat curang. Perusahaan ini menggunakan teknik akuntansi yang kompleks dan tidak transparan untuk menyembunyikan utang besar dan kerugian finansial, dengan tujuan menciptakan gambaran yang menyesatkan tentang kesehatan finansial kepada para investor dan publik. Melalui metode ini, Enron berhasil mengakumulasi utang yang



besar dan merugikan tanpa terdeteksi oleh auditor eksternal dan pengawas regulasi, sehingga menyamakan risiko keuangan yang sebenarnya.

Skandal ini terungkap pada akhir tahun 2001, memicu krisis besar yang mengakibatkan pengajuan kebangkrutan Enron. Kebangkrutan ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, berdampak besar pada ribuan karyawan, investor, dan perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, beberapa eksekutif senior perusahaan, termasuk CEO Jeffrey Skilling dan CFO Andrew Fastow, terjerat dalam proses hukum yang panjang dan dijatuhi hukuman penjara atas keterlibatannya dalam skandal tersebut. Keterlibatannya dalam praktek akuntansi yang tidak etis dan manipulatif menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam pengaturan dan pengawasan perusahaan.

Sebagai respons terhadap skandal Enron, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Undang-undang ini merupakan langkah besar dalam memperketat regulasi terkait akuntansi dan pengawasan perusahaan. Sarbanes-Oxley Act bertujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan, memastikan akurasi laporan keuangan, dan mencegah terjadinya skandal serupa di masa depan. Di antara banyak ketentuan yang diperkenalkan, undang-undang ini menetapkan standar yang lebih tinggi untuk pelaporan keuangan dan audit, serta memperkenalkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggaran. Selain itu, Sarbanes-Oxley Act mengatur pembentukan dewan pengawas publik yang bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas auditor, dengan tujuan meningkatkan independensi dan kualitas audit.

Undang-undang ini juga mengharuskan perusahaan untuk menerapkan kontrol internal yang lebih ketat dan menuntut manajemen puncak untuk secara pribadi menjamin kebenaran laporan keuangan. Dengan cara ini, Sarbanes-Oxley Act mengubah lanskap pengaturan korporasi di Amerika Serikat dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memperkenalkan mekanisme untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Reformasi yang dihasilkan dari skandal Enron juga menunjukkan pentingnya integritas dalam laporan keuangan dan tata kelola perusahaan, serta peran vital pengawasan dalam memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar etika dan hukum yang tinggi.

## 2. Inggris: Kasus Rolls-Royce

Kasus Rolls-Royce yang terungkap pada tahun 2017 adalah salah satu contoh signifikan dari penegakan hukum pidana korporasi di Inggris. Rolls-Royce, perusahaan teknik yang dikenal luas dan berbasis di Inggris, terlibat dalam skandal penyuapan internasional yang mengungkapkan praktek korupsi di berbagai negara. Investigasi yang dilakukan oleh *Serious Fraud Office* (SFO) mengungkap bahwa Rolls-Royce telah melakukan praktik penyuapan di sejumlah negara, termasuk Indonesia, Thailand, India, Rusia, dan Nigeria. Skandal ini melibatkan pembayaran suap kepada pejabat pemerintah dan pihak ketiga untuk memperoleh kontrak dan keuntungan bisnis.

Setelah investigasi menyeluruh, Rolls-Royce setuju untuk membayar denda sebesar £671 juta sebagai bagian dari penyelesaian kasus. Kesepakatan ini merupakan bagian dari *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) yang diterapkan dalam kasus ini. DPA adalah sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan perusahaan untuk menghindari proses pengadilan yang panjang dan rumit, dengan syarat perusahaan tersebut mengakui kesalahan, membayar denda, dan melakukan perbaikan substansial terhadap kebijakan dan praktik internal. Dalam hal ini, Rolls-Royce tidak hanya menyetujui untuk membayar denda yang besar tetapi juga berkomitmen untuk memperbaiki sistem kepatuhan internal guna mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

DPA yang digunakan dalam kasus ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, memungkinkan penyelesaian yang lebih efisien dan menghindari dampak negatif yang lebih luas dari proses peradilan yang berkepanjangan. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Rolls-Royce diwajibkan untuk melakukan perubahan signifikan dalam kebijakan anti-penyuapan, termasuk memperkuat kontrol internal dan melakukan pelatihan yang lebih baik untuk karyawan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar etika yang tinggi dan mencegah adanya praktik korupsi di masa depan. Kasus Rolls-Royce ini juga menekankan peran penting dari *Serious Fraud Office* (SFO) dalam menangani kejahatan korporasi di Inggris. SFO bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus penipuan besar dan korupsi, serta memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar bertindak sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Investigasi yang dilakukan oleh SFO menunjukkan kemampuannya dalam menangani kasus-kasus kompleks dan lintas negara, serta

memberikan dampak yang signifikan pada kebijakan perusahaan dan sistem hukum secara keseluruhan.

### **3. Australia: Kasus Commonwealth Bank of Australia (CBA)**

Kasus Commonwealth Bank of Australia (CBA) adalah salah satu skandal besar dalam dunia keuangan yang menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang dan pengawasan ketat oleh otoritas keuangan. Skandal ini melibatkan CBA, salah satu bank terbesar di Australia, yang terlibat dalam pencucian uang dan pelanggaran aturan anti-terorisme. Antara tahun 2012 dan 2015, CBA gagal melaporkan lebih dari 53.000 transaksi mencurigakan yang seharusnya dilaporkan ke Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris di Australia. Masalah ini muncul ketika AUSTRAC mengidentifikasi bahwa CBA tidak mematuhi kewajibannya dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang anti-pencucian uang dan anti-terorisme Australia. Transaksi-transaksi tersebut melibatkan sejumlah besar uang yang berpotensi terkait dengan aktivitas ilegal, namun tidak dilaporkan oleh bank, sehingga mengabaikan kewajiban untuk memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat mendanai kegiatan teroris atau pencucian uang.

Sebagai respons terhadap pelanggaran ini, AUSTRAC mengajukan tuntutan hukum terhadap CBA, yang akhirnya mengakui kesalahannya dan setuju untuk membayar denda sebesar AUD 700 juta pada tahun 2018. Denda ini merupakan salah satu denda terbesar yang pernah dikenakan dalam kasus pelanggaran anti-pencucian uang di Australia dan mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh bank tersebut. Kesepakatan ini juga termasuk kewajiban bagi CBA untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem kepatuhan dan kontrol internalnya, termasuk meningkatkan prosedur pelaporan transaksi mencurigakan dan memperkuat pelatihan bagi karyawan.

Kasus CBA menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat oleh otoritas keuangan dan kepatuhan yang ketat terhadap undang-undang anti-pencucian uang. AUSTRAC, sebagai badan pengawas, berperan krusial dalam mendeteksi pelanggaran dan memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi regulasi yang ada. Penegakan hukum yang

dilakukan terhadap CBA menggarisbawahi bahwa tidak ada pengecualian untuk pelanggaran, terlepas dari ukuran atau reputasi perusahaan. Hal ini memberikan pesan yang jelas kepada lembaga keuangan lain tentang pentingnya menjaga standar kepatuhan dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap transaksi.

#### **4. Kanada: Kasus SNC-Lavalin**

Kasus SNC-Lavalin merupakan salah satu skandal korupsi besar di Kanada yang menggarisbawahi tantangan penegakan hukum terhadap praktek korupsi korporasi internasional. SNC-Lavalin, sebuah perusahaan rekayasa terkemuka yang berbasis di Montreal, terlibat dalam skandal besar yang melibatkan penyuapan pejabat pemerintah di Libya. Selama periode antara 2001 dan 2011, perusahaan ini diduga terlibat dalam praktik korupsi yang serius untuk memperoleh kontrak konstruksi besar di negara tersebut. Skandal ini terungkap ketika investigasi mendalam mengungkapkan bahwa SNC-Lavalin telah memberikan suap kepada pejabat Libya untuk memenangkan proyek-proyek konstruksi. Praktik ini mencakup pembayaran suap yang signifikan kepada individu-individu yang memiliki pengaruh dalam pengadaan kontrak, dengan tujuan mendapatkan keuntungan kontraktual yang tidak semestinya. Ketika kasus ini terungkap, hal itu menimbulkan kontroversi besar dan mengarah pada tuntutan pidana terhadap perusahaan dan beberapa eksekutif kunci di dalamnya.

Sebagai respons terhadap skandal ini, pemerintah Kanada mengambil langkah tegas untuk menuntut SNC-Lavalin. Pada tahun 2019, perusahaan tersebut mencapai kesepakatan dengan otoritas Kanada melalui *Deferred Prosecution Agreement* (DPA). Dalam kesepakatan ini, SNC-Lavalin setuju untuk membayar denda sebesar CAD 280 juta sebagai bagian dari penyelesaian kasus. Selain itu, perusahaan juga setuju untuk menjalani masa percobaan selama tiga tahun, di mana harus mematuhi sejumlah persyaratan yang dirancang untuk memperbaiki praktik internal dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Kesepakatan DPA ini memberikan pendekatan yang fleksibel dalam penegakan hukum. Alih-alih menjalani proses pengadilan yang panjang dan berpotensi merusak reputasi perusahaan secara permanen, SNC-Lavalin memilih untuk mengakui kesalahannya dan bekerja sama dengan otoritas hukum. Dalam masa percobaan, perusahaan diharuskan

untuk melakukan reformasi signifikan dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan internal. Ini termasuk memperbaiki sistem audit dan pengawasan, serta memastikan bahwa langkah-langkah anti-korupsi yang lebih ketat diterapkan untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

Kasus SNC-Lavalin membahas pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang anti-korupsi dan integritas dalam operasi korporasi internasional. DPA menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan kasus korupsi tanpa mengorbankan integritas proses hukum. Dengan membayar denda dan menjalani masa percobaan, SNC-Lavalin diharapkan dapat memperbaiki tata kelola internalnya dan mengembalikan kepercayaan publik serta para pemangku kepentingan. Ini juga memberikan pesan yang jelas kepada perusahaan lain tentang konsekuensi dari terlibat dalam praktik korupsi dan pentingnya menjaga standar etika yang tinggi dalam bisnis.

## **5. Jerman: Kasus Volkswagen**

Kasus Volkswagen, dikenal sebagai "Dieselgate," adalah salah satu skandal korporasi terbesar dan paling merusak dalam sejarah industri otomotif. Skandal ini terungkap pada tahun 2015 dan melibatkan praktik curang oleh Volkswagen (VW), produsen mobil terkemuka asal Jerman. VW terbukti telah memanipulasi perangkat lunak emisi pada kendaraan diesel untuk memungkinkan mobil-mobil tersebut lulus uji emisi di Amerika Serikat, meskipun emisi sebenarnya jauh melebihi batas yang diizinkan. Manipulasi ini dilakukan dengan cara menyembunyikan data emisi yang sebenarnya, sehingga mobil VW tampak lebih ramah lingkungan daripada kenyataannya.

Skandal ini menjadi sorotan internasional setelah agen perlindungan lingkungan Amerika Serikat (EPA) mengungkapkan bahwa VW telah menggunakan perangkat lunak ilegal untuk menipu uji emisi. Pengungkapan ini memicu serangkaian tuntutan hukum dan denda yang signifikan di seluruh dunia, menciptakan dampak yang luas terhadap reputasi dan keuangan perusahaan. Di Amerika Serikat, VW menghadapi denda yang sangat besar sebesar USD 2,8 miliar, selain biaya untuk memperbaiki dan menarik kembali kendaraan yang terpengaruh oleh skandal ini. Selain itu, VW juga diwajibkan untuk melaksanakan program perbaikan dan kompensasi bagi konsumen yang terdampak.

Di Jerman, negara asal Volkswagen, skandal ini juga mengakibatkan dampak besar. Volkswagen tidak hanya menghadapi tuntutan hukum yang serius tetapi juga harus menghadapi biaya denda dan kompensasi yang substansial. Pemerintah Jerman, melalui otoritas hukum dan regulator, mengajukan tuntutan terhadap VW atas pelanggaran terhadap hukum lingkungan dan peraturan otomotif. Kasus ini menggarisbawahi kegagalan VW dalam mengelola kepatuhan internal dan mematuhi regulasi yang berlaku. VW juga harus menghadapi konsekuensi dari tindakan hukum di pasar domestik yang menuntut tanggung jawab atas praktik curang. Selain denda finansial, VW harus menghadapi kerusakan reputasi yang signifikan. Skandal ini mengganggu kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan, mempengaruhi citra merek, dan merusak hubungan dengan konsumen serta mitra bisnis. Reputasi yang rusak mengakibatkan penurunan penjualan dan dampak jangka panjang terhadap performa keuangan perusahaan.

### **C. Pembelajaran dari Praktik Internasional**

Untuk menelaah praktik internasional terkait penegakan hukum pidana korporasi, terdapat berbagai pelajaran yang dapat diambil oleh negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Pembelajaran ini mencakup berbagai aspek mulai dari regulasi, kebijakan penegakan hukum, hingga mekanisme pemantauan dan kepatuhan.

#### **1. Penerapan Regulasi yang Ketat**

Penerapan regulasi yang ketat merupakan langkah krusial dalam memastikan tanggung jawab pidana korporasi dan mencegah skandal besar yang dapat merugikan masyarakat dan pasar. Salah satu contoh yang menonjol dari penerapan regulasi ketat adalah Sarbanes-Oxley Act (SOX) yang diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 2002. Undang-undang ini diimplementasikan sebagai tanggapan terhadap skandal besar seperti kasus Enron yang mengguncang dunia keuangan dan membahas kekurangan dalam pengawasan dan akuntabilitas perusahaan. Sarbanes-Oxley Act dirancang untuk meningkatkan standar akuntabilitas dan transparansi di kalangan perusahaan publik. Salah satu fitur utama dari undang-undang ini adalah kewajiban bagi perusahaan

untuk membangun dan memelihara kontrol internal yang efektif atas laporan keuangan. Hal ini mencakup penerapan prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan bebas dari penipuan atau manipulasi. Kontrol internal ini harus melibatkan pemantauan rutin dan penilaian terhadap efektivitas prosedur akuntansi, serta dokumentasi yang memadai untuk mendukung klaim akuntansi yang dibuat oleh perusahaan.

Sarbanes-Oxley Act menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi eksekutif puncak perusahaan, termasuk CEO dan CFO, dalam memastikan keakuratan laporan keuangan. Para eksekutif ini diwajibkan untuk menandatangani pernyataan bahwa laporan keuangan yang diajukan adalah akurat dan lengkap. Ini menempatkan tanggung jawab pribadi pada para pemimpin perusahaan, yang sebelumnya sering kali tidak terlalu terlibat dalam proses pengawasan detail laporan keuangan. Dengan adanya ketentuan ini, para eksekutif harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab atas laporan yang ditanda tangani, serta memastikan bahwa semua informasi finansial yang dipublikasikan adalah benar.

Sarbanes-Oxley Act juga memperkenalkan sanksi yang ketat bagi pelanggaran. Perusahaan yang gagal mematuhi ketentuan undang-undang ini dapat dikenakan denda yang signifikan, dan eksekutif yang terlibat dalam penipuan atau manipulasi laporan keuangan dapat menghadapi hukuman penjara. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik korupsi serta penipuan di lingkungan bisnis. Keberhasilan Sarbanes-Oxley Act dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Amerika Serikat menunjukkan pentingnya penerapan regulasi yang ketat dalam mengelola tanggung jawab pidana korporasi. Regulasinya yang mendetail dan sanksi yang tegas memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mencegah dan menangani tindakan korupsi serta pelanggaran di tingkat korporasi. Dengan adanya standar yang tinggi untuk kontrol internal dan tanggung jawab eksekutif, perusahaan lebih cenderung untuk menjalankan operasinya dengan integritas dan mematuhi hukum yang berlaku.

Pengalaman Amerika Serikat dengan Sarbanes-Oxley Act juga memberikan pelajaran berharga bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengatur tanggung jawab pidana korporasi. Negara-negara di seluruh dunia dapat memanfaatkan prinsip-prinsip yang diadopsi dalam undang-undang ini untuk memperkuat regulasinya

sendiri, meningkatkan pengawasan internal perusahaan, dan memastikan bahwa sistem akuntansi serta laporan keuangan memenuhi standar yang tinggi. Penerapan regulasi yang ketat seperti Sarbanes-Oxley Act tidak hanya membantu mencegah skandal korporasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pasar dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

## **2. Penggunaan *Deferred Prosecution Agreements* (DPA)**

Penggunaan *Deferred Prosecution Agreements* (DPA) merupakan pendekatan inovatif yang menggabungkan penegakan hukum dengan kesempatan untuk perbaikan internal di dunia korporasi. DPA memberikan fleksibilitas bagi perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran pidana untuk menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal, dengan syaratnya mengakui kesalahan, membayar denda, dan melakukan reformasi yang diperlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan sambil mendorong perubahan positif dalam tata kelola perusahaan tanpa merusak secara drastis operasi perusahaan atau mempengaruhi lapangan kerja secara signifikan.

Di Inggris, DPA pertama kali diterapkan secara resmi melalui Undang-Undang Penyuapan 2010, yang memberikan wewenang kepada *Serious Fraud Office* (SFO) untuk menggunakan mekanisme ini dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan perusahaan. Kasus Rolls-Royce pada tahun 2017 adalah salah satu contoh paling mencolok tentang bagaimana DPA diterapkan. Rolls-Royce, sebuah perusahaan teknik global, terlibat dalam skandal penyuapan dan korupsi yang melibatkan sejumlah besar pembayaran ilegal kepada pejabat di berbagai negara. Alih-alih menjalani proses pengadilan yang panjang, Rolls-Royce setuju untuk menyelesaikan kasusnya melalui DPA. Perusahaan tersebut mengakui kesalahannya, membayar denda sebesar £671 juta, dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem kepatuhan internalnya. Kesepakatan ini memungkinkan Rolls-Royce untuk menghindari dampak negatif dari proses pengadilan yang bisa mengganggu operasionalnya, sambil memberikan contoh yang jelas tentang komitmen untuk mengatasi pelanggaran dan mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan.

Di Kanada, mekanisme serupa diterapkan dengan efek yang signifikan. Kasus SNC-Lavalin, perusahaan rekayasa besar, menunjukkan bagaimana DPA dapat digunakan untuk menegakkan **Criminal Act, Criminal Liability & Punishment**



hukum pidana korporasi sambil memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki diri. SNC-Lavalin terlibat dalam penyuaian pejabat pemerintah di Libya untuk memperoleh kontrak konstruksi. Sebagai bagian dari kesepakatan DPA yang disetujui pada tahun 2019, SNC-Lavalin setuju untuk membayar denda sebesar CAD 280 juta dan menjalani masa percobaan selama tiga tahun. Kesepakatan ini juga mencakup kewajiban bagi perusahaan untuk memperbaiki sistem kepatuhan dan implementasi program anti-korupsi. Pendekatan ini memungkinkan SNC-Lavalin untuk menghindari pengadilan pidana yang dapat merusak reputasi dan operasi perusahaan lebih lanjut, sambil memastikan bahwa ia mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

Penerapan DPA di Inggris dan Kanada menunjukkan bahwa mekanisme ini dapat efektif dalam menciptakan hasil yang adil dan konstruktif. Dengan memberikan peluang kepada perusahaan untuk memperbaiki kesalahan, DPA tidak hanya menyelesaikan kasus hukum tetapi juga mendorong perbaikan internal yang mendalam. Ini membantu perusahaan untuk memulihkan diri dan melanjutkan operasinya dengan standar yang lebih tinggi, sambil memberikan jaminan kepada publik bahwa keadilan ditegakkan. Namun, penggunaan DPA harus dilakukan dengan hati-hati. DPA harus memastikan bahwa perusahaan benar-benar melakukan perbaikan yang diperlukan dan memenuhi semua kewajibannya dalam kesepakatan. Pengawasan yang ketat dan transparansi selama masa percobaan sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi persyaratan di atas kertas, tetapi benar-benar melakukan perubahan yang berdampak pada tata kelola dan etika operasionalnya. Dengan pendekatan yang tepat, DPA dapat menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum pidana korporasi, memungkinkan penyelesaian yang adil sambil mendorong perubahan positif dalam perilaku perusahaan.

### **3. Pentingnya Kepatuhan dan Etika**

Kasus-kasus yang melibatkan Commonwealth Bank of Australia (CBA) dan Volkswagen (VW) menegaskan betapa krusialnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika dalam operasi korporasi. CBA, salah satu bank terbesar di Australia, menghadapi denda besar sebesar AUD 700 juta pada tahun 2018 setelah gagal melaporkan lebih dari 53.000 transaksi mencurigakan yang melanggar undang-undang anti-pencucian

uang. Kegagalan ini membahas betapa pentingnya kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang dan pengawasan yang ketat oleh otoritas keuangan. Ketiadaan pelaporan transaksi yang mencurigakan tidak hanya merugikan integritas sistem keuangan tetapi juga memungkinkan kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang bisa memiliki dampak jauh lebih besar pada masyarakat dan ekonomi.

Sementara itu, skandal "Dieselgate" yang melibatkan Volkswagen mengilustrasikan pentingnya integritas dan transparansi dalam operasi perusahaan. Pada tahun 2015, terungkap bahwa Volkswagen telah memanipulasi perangkat lunak emisi pada kendaraan diesel untuk melewati uji emisi yang ketat di Amerika Serikat. Manipulasi ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap VW dan industri otomotif secara keseluruhan. Skandal ini menggarisbawahi betapa pentingnya integritas dalam laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang ditetapkan. Volkswagen menghadapi denda dan tuntutan hukum yang signifikan di berbagai negara, termasuk denda sebesar USD 2,8 miliar di Amerika Serikat. Dampak jangka panjang dari skandal ini termasuk kerusakan reputasi yang mendalam, penurunan penjualan, dan peningkatan pengawasan terhadap praktik perusahaan.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan etika tidak hanya penting untuk menghindari pelanggaran hukum tetapi juga untuk menjaga reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Bagi CBA, kepatuhan terhadap undang-undang anti-pencucian uang dan kewajiban pelaporan adalah bagian penting dari sistem kontrol internal yang harus dijalankan dengan integritas. Bagi Volkswagen, mematuhi regulasi lingkungan dan memastikan transparansi dalam operasi adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Kegagalan dalam aspek-aspek ini dapat menyebabkan konsekuensi hukum dan finansial yang serius, serta kerusakan reputasi yang mungkin sulit diperbaiki.

#### **4. Mekanisme Pengawasan yang Efektif**

Mekanisme pengawasan yang efektif adalah komponen krusial dalam penegakan hukum pidana korporasi, dan negara-negara yang memiliki sistem pengawasan yang kuat sering kali lebih berhasil dalam menegakkan regulasi dan mengatasi pelanggaran oleh perusahaan. Di Inggris, *Serious Fraud Office* (SFO) berperan penting dalam memerangi **Criminal Act, Criminal Liability & Punishment**

kejahatan korporasi dan penipuan. Sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran besar, SFO berfokus pada kasus-kasus kompleks dan signifikan yang melibatkan penipuan, korupsi, dan kejahatan ekonomi. Keberhasilan SFO dalam menangani kasus-kasus seperti skandal Rolls-Royce membahas pentingnya pengawasan yang independen dan kuat. SFO tidak hanya melakukan penyelidikan menyeluruh tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa perusahaan yang melanggar hukum menghadapi konsekuensi yang tepat, baik dalam bentuk denda yang signifikan maupun reformasi internal.

Demikian pula, di Australia, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) berfungsi sebagai lembaga utama yang mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme. AUSTRAC memiliki wewenang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyelidiki data transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam kasus Commonwealth Bank of Australia (CBA), AUSTRAC menunjukkan kemampuannya dalam menangani pelanggaran besar dengan mengajukan tuntutan yang signifikan terhadap bank tersebut setelah gagal melaporkan ribuan transaksi mencurigakan. Tindakan AUSTRAC menegaskan pentingnya memiliki lembaga pengawas yang tidak hanya memiliki wewenang investigatif tetapi juga kapasitas untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang sesuai.

Kedua lembaga ini, SFO dan AUSTRAC, membahas bagaimana pengawasan yang kuat dan independen berperan kunci dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Keberadaan lembaga-lembaga ini memungkinkan penegakan hukum yang efektif dengan menyelidiki dan menuntut pelanggaran yang mungkin diabaikan oleh mekanisme internal perusahaan. Lembaga-lembaga ini juga memberikan kepastian bahwa tindakan pelanggaran tidak akan dibiarkan tanpa hukuman, yang pada gilirannya dapat memotivasi perusahaan lain untuk lebih patuh terhadap regulasi.

## **5. Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan berperan penting dalam mencegah pelanggaran hukum korporasi dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi yang berlaku. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan eksekutif mengenai tanggung jawab pidana dan kepatuhan dapat secara signifikan

mengurangi risiko pelanggaran hukum. Sebagai contoh, skandal Enron yang mengguncang dunia korporasi Amerika Serikat pada awal 2000-an menunjukkan betapa krusialnya pendidikan dan pelatihan bagi eksekutif dan karyawan. Skandal ini mengungkapkan kekurangan besar dalam budaya kepatuhan dan pengawasan di Enron, yang akhirnya berujung pada kebangkrutan perusahaan dan reformasi besar dalam regulasi korporasi di AS.

Menanggapi krisis tersebut, banyak perusahaan di Amerika Serikat mulai memperkuat program pelatihan tentang etika bisnis dan kepatuhan regulasi. Salah satu langkah signifikan adalah pengembangan program pelatihan yang dirancang khusus untuk membekali eksekutif dan karyawan dengan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab hukum, serta prosedur yang harus diikuti untuk memastikan kepatuhan. Program pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek hukum dan regulasi tetapi juga mengajarkan keterampilan praktis untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum menjadi pelanggaran hukum.

Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk budaya kepatuhan yang kuat dalam perusahaan dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam operasi bisnis. Melalui sesi pelatihan yang terstruktur, perusahaan dapat memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami kewajiban, termasuk prosedur pelaporan pelanggaran, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang risiko hukum yang terkait dengan kegiatannya. Hal ini sangat penting untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan perusahaan dan melanggar hukum. Selain itu, pelatihan ekstensif mengenai etika bisnis juga mencakup simulasi kasus nyata dan skenario yang memungkinkan karyawan untuk mengalami dan mengatasi dilema etika dalam lingkungan yang terkontrol. Pendekatan ini membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat keputusan yang etis dan mematuhi peraturan yang berlaku, bahkan dalam situasi yang kompleks dan menantang. Program pelatihan yang efektif biasanya melibatkan pengembangan materi yang relevan dengan industri tertentu dan memberikan contoh konkret mengenai kasus pelanggaran yang telah terjadi di sektor tersebut.

Pendidikan berkelanjutan dan pelatihan juga mencakup pembaruan regulasi dan perubahan hukum yang mungkin berdampak pada perusahaan. Dengan memastikan bahwa program pelatihan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam hukum

dan regulasi, perusahaan dapat menjaga agar karyawan tetap terinformasi tentang kewajiban terbaru dan memastikan bahwa ia tidak terjebak oleh perubahan yang tidak diketahui. Implementasi program pelatihan yang sukses seringkali memerlukan dukungan dan komitmen dari tingkat manajemen atas. Dukungan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan dan memastikan bahwa pesan tentang etika dan kepatuhan disampaikan dengan jelas kepada seluruh organisasi. Program pelatihan yang didukung oleh manajemen puncak dapat memperkuat budaya kepatuhan dan meningkatkan efektivitas pelatihan, serta memastikan bahwa semua karyawan memandang kepatuhan sebagai bagian integral dari budaya perusahaan.

## **6. Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional berperan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana korporasi, terutama dalam kasus-kasus besar yang melibatkan pelanggaran di berbagai negara. Kasus-kasus seperti Rolls-Royce dan Volkswagen, yang melibatkan tindakan korupsi dan penipuan di banyak yurisdiksi, menggarisbawahi betapa krusialnya kolaborasi antar lembaga penegak hukum internasional untuk menangani pelanggaran yang bersifat lintas batas. Dalam kasus Rolls-Royce, perusahaan tersebut terlibat dalam skandal besar yang mencakup penyuapan di beberapa negara termasuk Indonesia, Thailand, India, Rusia, dan Nigeria. Investigasi ini melibatkan tidak hanya otoritas Inggris seperti *Serious Fraud Office* (SFO), tetapi juga lembaga penegak hukum di negara-negara tempat pelanggaran terjadi. Kerjasama antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk mengumpulkan bukti yang relevan dari berbagai lokasi dan memahami bagaimana operasi penyuapan dilakukan di berbagai yurisdiksi. Proses ini tidak hanya memerlukan koordinasi antara negara-negara yang berbeda tetapi juga keterlibatan dalam berbagi informasi dan sumber daya untuk mencapai pemahaman yang komprehensif mengenai skandal tersebut.

Demikian pula, skandal "Dieselgate" Volkswagen menunjukkan perlunya kerjasama internasional dalam menangani pelanggaran yang melibatkan berbagai negara. Volkswagen, yang menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasi hasil uji emisi kendaraan di Amerika Serikat dan negara-negara lain, menghadapi tuntutan hukum besar dari berbagai negara. Di Amerika Serikat, Volkswagen setuju untuk membayar denda sebesar USD 2,8 miliar dan melakukan perbaikan besar pada kendaraan

yang terpengaruh, sementara di Jerman, Volkswagen juga menghadapi tuntutan dan denda. Penegakan hukum yang efektif dalam kasus ini memerlukan koordinasi yang erat antara pihak berwenang di berbagai negara untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil sesuai dan komprehensif, serta untuk menghindari celah hukum yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menghindari tanggung jawab.

Kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana korporasi melibatkan beberapa mekanisme, termasuk perjanjian internasional, forum bersama, dan jaringan kerja sama antara lembaga-lembaga penegak hukum. Misalnya, Interpol, Europol, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) berperan penting dalam memfasilitasi kerjasama lintas batas, berbagi informasi, dan membantu dalam penyelidikan yang melibatkan beberapa negara. Selain itu, banyak negara memiliki perjanjian bilateral atau multilateral yang memungkinkan untuk bekerja sama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum di banyak yurisdiksi.

#### **D. Implementasi Pembelajaran Internasional di Indonesia**

Mengimplementasikan pembelajaran dari praktik internasional dalam sistem hukum pidana korporasi di Indonesia memerlukan penyesuaian dan adaptasi terhadap konteks lokal sambil mengadopsi praktik terbaik dari negara lain. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi berdasarkan pembelajaran internasional:

##### **1. Penerapan Regulasi yang Ketat**

Penerapan regulasi yang ketat dalam hukum pidana korporasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Salah satu contoh terkemuka dari penerapan regulasi ketat adalah Sarbanes-Oxley Act yang diterapkan di Amerika Serikat setelah skandal Enron pada awal 2000-an. Undang-undang ini memperkenalkan standar tinggi dalam tata kelola perusahaan, mengharuskan adanya kontrol internal yang efektif, serta menuntut laporan keuangan yang akurat dan transparan. Implementasi regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act memberikan dasar hukum yang kuat untuk menilai dan menuntut

kesalahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan perusahaan (Healy & Palepu, 2003).

Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip regulasi yang ketat seperti yang terkandung dalam Sarbanes-Oxley Act dapat dilakukan dengan memperkuat undang-undang yang ada atau bahkan memperkenalkan undang-undang baru yang menetapkan standar tinggi untuk tata kelola perusahaan dan akuntabilitas. Undang-undang baru ini dapat mencakup persyaratan yang lebih ketat untuk pengendalian internal, dokumentasi yang rinci, dan laporan keuangan yang transparan. Dengan mengadopsi regulasi yang komprehensif, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih robust dalam menghadapi kasus-kasus pidana korporasi dan meningkatkan integritas pasar keuangan.

Pentingnya pengembangan peraturan khusus juga menjadi sorotan dalam penerapan regulasi yang ketat. Kasus-kasus pidana korporasi sering kali melibatkan aspek-aspek yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang terperinci untuk mengatur berbagai praktik korporasi. Oleh karena itu, peraturan khusus harus mencakup persyaratan rinci mengenai dokumentasi, audit, dan pengawasan internal. Regulasi ini dapat membantu meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas dan menyeluruh untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar yang ditetapkan. Misalnya, peraturan yang mewajibkan audit internal secara berkala dan pengawasan yang ketat terhadap praktik bisnis dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan.

## **2. Penggunaan Mekanisme Penyelesaian Alternatif**

Penggunaan mekanisme penyelesaian alternatif seperti *Deferred Prosecution Agreements* (DPA) telah menunjukkan bagaimana fleksibilitas dalam penegakan hukum pidana korporasi dapat membawa manfaat signifikan baik bagi sistem peradilan maupun perusahaan yang terlibat. DPA, yang diadopsi secara efektif di Inggris dan Kanada, menawarkan solusi yang konstruktif bagi pelanggaran korporasi tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan memakan waktu. Dengan mekanisme ini, perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hukum dapat memilih untuk mengakui kesalahan, membayar denda, dan melakukan perbaikan sistem internal sebagai alternatif dari tuntutan pidana yang penuh. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan

perusahaan untuk memperbaiki praktiknya dan memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membantu mengurangi beban sistem peradilan yang seringkali kewalahan dengan jumlah kasus yang harus ditangani (SFO, 2017; Government of Canada, 2019).

DPA dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mendorong perusahaan agar mengambil tanggung jawab atas kesalahan dan berkomitmen untuk melakukan perubahan positif. Dalam kasus Rolls-Royce di Inggris, misalnya, perusahaan setuju untuk membayar denda sebesar £671 juta dan memperbaiki kebijakan internal sebagai bagian dari kesepakatan DPA. Pendekatan ini memungkinkan Rolls-Royce untuk menghindari proses pengadilan yang panjang dan berbiaya tinggi, sementara tetap memaksa untuk menghadapi konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan serta memperbaiki sistem kepatuhan (SFO, 2017). Hal ini menunjukkan bagaimana DPA dapat menciptakan insentif bagi perusahaan untuk secara proaktif menangani masalah dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Di Kanada, kasus SNC-Lavalin juga membahas efektivitas DPA. SNC-Lavalin setuju untuk membayar denda sebesar CAD 280 juta dan menjalani masa percobaan selama tiga tahun sebagai bagian dari kesepakatan DPA. Dalam hal ini, DPA memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan dan menjaga operasional tanpa harus menghadapi tuntutan pidana penuh yang mungkin merugikan secara signifikan (Government of Canada, 2019). Penggunaan DPA dalam kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mendukung penyelesaian kasus secara lebih efisien sambil tetap memastikan adanya perbaikan nyata dalam praktik korporasi.

### **3. Meningkatkan Mekanisme Pengawasan**

Penguatan mekanisme pengawasan adalah langkah krusial dalam memastikan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran korporasi. Salah satu strategi utama untuk mencapai ini adalah dengan memperkuat lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan otoritas pengawas pasar modal di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga ini, penting untuk memperkuat kapasitas, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknis. Ini melibatkan pelatihan intensif untuk personel lembaga agar dapat memahami dan menangani kompleksitas kasus-kasus korporasi dengan lebih baik. Selain itu, memastikan independensi



lembaga-lembaga ini juga sangat penting, sehingga dapat menjalankan fungsinya tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal atau konflik kepentingan. Dengan meningkatkan kapasitas, pelatihan, dan independensi, lembaga pengawas dapat melakukan investigasi secara lebih mendalam dan menegakkan hukum dengan lebih efektif (AUSTRAC, 2018).

Penggunaan teknologi canggih juga berperan penting dalam meningkatkan mekanisme pengawasan. Teknologi modern dapat menyediakan alat yang sangat efektif untuk pemantauan dan deteksi pelanggaran korporasi. Misalnya, analisis data besar (*big data analytics*) memungkinkan pengawas untuk memeriksa pola transaksi dan perilaku perusahaan dengan kecepatan dan ketelitian yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode manual. Teknologi ini dapat membantu mendeteksi anomali yang mungkin menunjukkan adanya pelanggaran atau aktivitas mencurigakan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi kasus besar. Selain itu, perangkat lunak anti-pencucian uang yang menggunakan algoritma canggih untuk memantau transaksi keuangan dapat secara otomatis mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan, memberikan sinyal awal kepada otoritas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

#### **4. Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan yang efektif bagi eksekutif dan karyawan perusahaan berperan yang sangat penting dalam mencegah pelanggaran hukum dan memastikan kepatuhan yang konsisten terhadap regulasi. Salah satu aspek kunci dari pendidikan ini adalah menyediakan pelatihan komprehensif mengenai tanggung jawab pidana dan kepatuhan hukum. Pelatihan harus mencakup berbagai topik seperti etika bisnis, peraturan yang berlaku, dan prosedur internal yang harus diikuti oleh perusahaan. Dengan membekali eksekutif dan karyawan dengan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan tanggung jawab, perusahaan dapat mengurangi risiko pelanggaran dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan hukum (Healy & Palepu, 2003).

Program pelatihan ini harus dirancang untuk menjangkau semua tingkatan dalam perusahaan, mulai dari eksekutif puncak hingga karyawan tingkat bawah. Pelatihan untuk eksekutif harus fokus pada tanggung jawab kepemimpinan dalam memastikan bahwa kebijakan

kepatuhan diterapkan secara efektif di seluruh organisasi, perlu memahami tidak hanya peraturan yang berlaku tetapi juga dampak dari kegagalan untuk mematuhi hukum, termasuk potensi risiko hukum dan reputasi perusahaan. Di sisi lain, pelatihan untuk karyawan di tingkat operasional harus mencakup prosedur sehari-hari yang perlu diikuti untuk menjaga kepatuhan dan bagaimana melaporkan potensi pelanggaran.

## **5. Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional berperan krusial dalam menegakkan hukum pidana korporasi, terutama ketika pelanggaran melibatkan beberapa negara atau melintas batas yurisdiksi. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum internasional dan negara lain menjadi sangat penting untuk menangani pelanggaran yang kompleks dan luas. Misalnya, berbagi informasi antara lembaga penegak hukum dari berbagai negara memungkinkan identifikasi dan penuntutan pelaku yang mungkin beroperasi di beberapa lokasi secara bersamaan. Hal ini juga mencakup pelaksanaan investigasi bersama, di mana tim yang terdiri dari berbagai negara dapat bekerja sama untuk mengumpulkan bukti dan menyusun kasus yang solid. Dengan pendekatan ini, negara-negara dapat mengatasi tantangan yang timbul dari perbedaan hukum dan regulasi yang mungkin ada di berbagai yurisdiksi, serta memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan internasional tidak luput dari perhatian hukum.

Pengalaman dari kasus-kasus besar seperti Rolls-Royce dan Volkswagen menunjukkan betapa pentingnya kerjasama internasional dalam menangani pelanggaran lintas batas. Rolls-Royce, yang terlibat dalam penyuapan di berbagai negara, dan Volkswagen dengan skandal emisi globalnya, membutuhkan pendekatan koordinasi antar negara untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara efektif. Kerjasama ini tidak hanya melibatkan penegak hukum, tetapi juga lembaga-lembaga pengawas dan regulator di berbagai negara yang dapat memberikan dukungan penting dalam hal data dan analisis. Selain kerjasama langsung dalam penegakan hukum, partisipasi dalam forum dan inisiatif internasional juga merupakan aspek penting dari kerjasama internasional. Forum internasional seperti Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Bank Dunia, dan berbagai konferensi internasional memberikan platform bagi negara-negara untuk

berdiskusi, berbagi praktik terbaik, dan memperbarui kebijakan sesuai dengan standar internasional. Melalui partisipasi aktif dalam forum-forum ini, negara dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana negara lain menangani masalah hukum pidana korporasi, serta mengadopsi kebijakan dan praktik yang dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum domestik.

## **6. Reformasi dan Evaluasi**

Reformasi dan evaluasi merupakan komponen kunci dalam memastikan efektivitas dan relevansi sistem hukum pidana korporasi. Reformasi hukum diperlukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan praktik internasional terbaru dan perkembangan dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, negara dapat melakukan reformasi hukum berdasarkan pelajaran yang dipetik dari studi kasus internasional, seperti penyesuaian undang-undang untuk menangani aspek-aspek baru yang muncul dari praktik global. Reformasi ini dapat meliputi pengenalan aturan yang lebih ketat mengenai pengendalian internal, transparansi keuangan, dan tanggung jawab eksekutif dalam perusahaan. Selain itu, negara juga dapat memperkenalkan mekanisme baru untuk menangani pelanggaran yang kompleks dan melibatkan teknologi canggih, seperti penggunaan perangkat lunak untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan mengawasi kepatuhan hukum secara real-time.

Pentingnya reformasi hukum ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan mengadopsi praktik dan kebijakan yang terbukti efektif di negara lain, sebuah negara dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menangani pelanggaran pidana korporasi. Misalnya, pengenalan *Deferred Prosecution Agreements* (DPA) seperti yang diterapkan di Inggris dan Kanada dapat menawarkan alternatif yang fleksibel untuk penuntutan pidana, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki diri sambil tetap menghadapi konsekuensi yang signifikan. Reformasi hukum yang terus diperbarui berdasarkan hasil evaluasi internasional membantu memastikan bahwa undang-undang tetap relevan dan mampu mengatasi tantangan yang terus berkembang di dunia korporasi.

# **BAB IX**

## **REFORMASI HUKUM PIDANA KORPORASI DI INDONESIA**

---

Reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh entitas bisnis. Sejak awal 2000-an, pemerintah Indonesia telah menyadari perlunya peraturan yang lebih tegas dan efektif untuk menangani kejahatan korporasi, terutama yang melibatkan korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran hak-hak konsumen. Reformasi ini ditandai dengan pengenalan berbagai undang-undang baru dan revisi terhadap peraturan yang sudah ada, yang bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan akuntabilitas korporasi. Pemerintah juga telah mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, dengan fokus pada pencegahan melalui penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dan peningkatan transparansi. Namun, meskipun ada berbagai kemajuan, proses reformasi ini masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk hambatan budaya, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, dan perlunya harmonisasi regulasi. Evaluasi terhadap reformasi yang telah dilakukan menunjukkan perlunya upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa hukum pidana korporasi dapat diterapkan secara efektif dan adil di seluruh Indonesia.

### **A. Sejarah Reformasi Hukum Pidana Korporasi**

Reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial, dan politik. Awalnya, sistem hukum pidana Indonesia yang diwarisi dari hukum kolonial Belanda hanya mengenal individu sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Hukum pidana klasik tidak mengakui korporasi sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, seiring dengan meningkatnya

peran korporasi dalam kegiatan ekonomi, kebutuhan untuk mengatur dan mengawasi perilaku korporasi menjadi semakin mendesak.

## **1. Era Orde Baru**

Era Orde Baru di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, ditandai oleh fokus utama pemerintah pada pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Di bawah rezim ini, korporasi menjadi motor penggerak ekonomi, dengan berbagai kebijakan yang mendorong investasi dan ekspansi industri. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, muncul berbagai tantangan terkait regulasi dan pengawasan terhadap perilaku korporasi. Kurangnya regulasi yang ketat sering kali mengakibatkan berbagai pelanggaran hukum oleh korporasi, termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lingkungan. Pada masa ini, praktik korupsi menjadi sangat endemik, tidak hanya di lingkup pemerintah tetapi juga di sektor swasta. Pelanggaran oleh korporasi sering kali luput dari penegakan hukum yang efektif, karena regulasi yang ada belum memadai untuk mengatasi kompleksitas kejahatan korporasi. Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk memperluas cakupan hukum pidana agar dapat menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana.

Sebagai respon terhadap meningkatnya kesadaran akan perlunya regulasi yang lebih ketat, salah satu langkah penting dalam sejarah reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia adalah penerbitan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yang memungkinkan penuntutan terhadap perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam upaya memperluas cakupan hukum pidana untuk mencakup entitas korporasi, yang sebelumnya lebih berfokus pada individu. Undang-undang ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi dan menegakkan integritas dalam operasi bisnis. Dengan adanya ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, pemerintah mengirimkan sinyal kuat bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan olehnya atau karyawannya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi, termasuk denda yang signifikan, pembekuan aset, dan pembubaran perusahaan.

Implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juga membuka jalan bagi pembentukan lembaga penegak hukum yang lebih efektif, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki mandat untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi, termasuk yang melibatkan korporasi. Kehadiran KPK meningkatkan kapasitas penegakan hukum dalam menangani korupsi di sektor korporasi dan memperkuat upaya pencegahan melalui pengawasan yang lebih ketat. Namun, meskipun undang-undang ini merupakan langkah maju yang signifikan, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari berbagai pihak yang diuntungkan oleh status quo, serta kompleksitas kasus-kasus korupsi yang sering melibatkan jaringan yang luas dan terorganisir. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap korporasi memerlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk peran media dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik korupsi.

## **2. Periode Reformasi**

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum. Pada periode ini, ada dorongan kuat untuk memperbaiki dan memperkuat hukum guna menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan adil. Salah satu fokus utama reformasi adalah memperkuat hukum pidana korporasi, mengingat pentingnya perusahaan dalam perekonomian nasional dan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif dari kejahatan korporasi. Periode reformasi di Indonesia ditandai dengan penerbitan berbagai undang-undang yang bertujuan untuk memperkuat mekanisme hukum dan regulasi terkait kejahatan korporasi. Salah satu produk hukum yang signifikan dalam konteks ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini merupakan langkah penting dalam memperluas cakupan hukum pidana untuk menjerat korporasi yang terlibat dalam aktivitas ilegal, terutama pencucian uang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak korporasi yang terlibat dalam pencucian uang. Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan yang dirancang untuk mencegah dan memberantas pencucian uang, termasuk pengaturan tentang pelaporan transaksi mencurigakan, kewajiban bagi lembaga

keuangan untuk menerapkan program anti-pencucian uang, dan sanksi bagi pelanggar. Dengan demikian, undang-undang ini menyediakan mekanisme yang jelas untuk pertanggungjawaban pidana korporasi, memungkinkan penuntutan terhadap perusahaan yang terlibat dalam kejahatan ini. Salah satu aspek penting dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah pengaturan tentang pelaporan transaksi mencurigakan (*suspicious transaction reporting*). Lembaga keuangan dan non-keuangan diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kewajiban ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang sejak dini, serta memastikan bahwa pihak berwenang memiliki informasi yang diperlukan untuk melakukan investigasi.

Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban bagi lembaga keuangan untuk menerapkan program anti-pencucian uang, termasuk kebijakan *know your customer* (KYC) dan monitoring transaksi yang berkelanjutan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dapat mengidentifikasi dan melacak aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pencucian uang. Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas kejahatan korporasi dan pencucian uang. Dengan adanya undang-undang ini, korporasi yang terlibat dalam aktivitas ilegal tidak lagi dapat beroperasi dengan impunitas, karena dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk denda yang signifikan dan pembekuan aset. Hal ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi dan menerapkan praktik bisnis yang lebih etis.

### **3. Era Kontemporer**

Pada era kontemporer, reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia terus berkembang dengan penekanan pada penyesuaian regulasi sesuai dengan standar internasional. Komitmen Indonesia untuk mematuhi konvensi internasional, seperti Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC), menjadi landasan bagi upaya penyesuaian regulasi domestik yang mengatur tindak pidana korporasi agar selaras dengan standar global. Penyesuaian ini penting karena

korporasi seringkali terlibat dalam aktivitas lintas batas yang kompleks, sehingga memerlukan kerangka hukum yang mampu mengatasi kejahatan korporasi di tingkat nasional maupun internasional. Implementasi standar internasional ini mencakup berbagai aspek, termasuk pencegahan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Melalui penyesuaian ini, Indonesia tidak hanya berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan, tetapi juga memperkuat sistem penegakan hukum agar lebih responsif terhadap tantangan global.

Salah satu langkah konkret dalam penyesuaian regulasi adalah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Revisi KUHP ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi perubahan dalam dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Rancangan KUHP yang baru berusaha untuk memasukkan ketentuan yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, mencakup definisi yang jelas tentang siapa yang dapat dianggap bertanggung jawab dalam sebuah entitas korporasi serta mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, rancangan KUHP yang baru juga mempertimbangkan pengenalan sanksi yang lebih tepat guna. Sanksi ini tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memiliki elemen restoratif dan preventif. Misalnya, sanksi finansial yang signifikan bagi korporasi yang melanggar hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai *deterrent* (pencegah) bagi perusahaan lain. Selain itu, mekanisme penyelesaian alternatif seperti *Deferred Prosecution Agreements* (DPA) yang telah berhasil diterapkan di negara lain juga mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari reformasi ini. DPA memungkinkan korporasi untuk mengakui kesalahan, membayar denda, dan melakukan perbaikan internal tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Hal ini dapat mengurangi beban sistem peradilan sekaligus mendorong perbaikan yang nyata dalam tata kelola perusahaan.

Reformasi hukum pidana korporasi juga mencakup penguatan lembaga penegak hukum dan pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kedua lembaga ini berperan penting dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran oleh korporasi. Dengan meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga-lembaga ini, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan transparan. Teknologi juga menjadi alat penting dalam pengawasan dan penegakan hukum di era kontemporer. Adopsi teknologi canggih seperti



analisis data besar (big data) dan perangkat lunak anti-pencucian uang membantu lembaga pengawas dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran dengan lebih cepat dan akurat. Penggunaan teknologi ini memungkinkan identifikasi pola-pola mencurigakan yang mungkin terlewatkan oleh metode konvensional, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.

#### **4. Evaluasi dan Tantangan**

Reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan signifikan, namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang menghambat penerapannya secara efektif. Salah satu tantangan utama adalah inkonsistensi dalam penerapan regulasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Ketidakjelasan dalam definisi dan cakupan pertanggungjawaban pidana korporasi juga menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi. Menurut Supancana (2021), salah satu masalah utama dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi adalah ketidakjelasan dalam definisi dan cakupan pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa undang-undang sektoral memiliki ketentuan yang berbeda mengenai bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, yang mengakibatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Misalnya, undang-undang tentang lingkungan hidup mungkin memiliki standar yang berbeda dengan undang-undang tentang keuangan, sehingga menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih dalam penegakan hukum. Ketidakjelasan ini membuat penegak hukum kesulitan dalam menentukan kriteria yang harus dipenuhi untuk menuntut korporasi dan mengakibatkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari tanggung jawab pidana.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga masih menjadi tantangan besar. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) seringkali bekerja secara terpisah tanpa adanya koordinasi yang memadai. Hal ini menyebabkan penanganan kasus pidana korporasi menjadi kurang efektif dan efisien. Kurangnya kerjasama antar lembaga ini juga memperlambat proses investigasi dan penuntutan, sehingga memberikan kesempatan bagi korporasi untuk menghindari deteksi dan pertanggungjawaban pidana. Kemampuan korporasi untuk menghindari deteksi dan mengelak dari

pertanggungjawaban pidana juga menjadi hambatan signifikan dalam reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar seringkali memiliki sumber daya yang cukup untuk menyusun strategi hukum yang kompleks guna menghindari penuntutan, dapat memanfaatkan jaringan pengacara dan konsultan hukum yang berpengalaman untuk menemukan celah dalam hukum dan menghindari sanksi pidana. Selain itu, praktik-praktik korupsi di kalangan penegak hukum juga dapat menghambat proses penegakan hukum yang adil dan transparan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum melalui pelatihan dan peningkatan sumber daya. Penegak hukum perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus pidana korporasi yang kompleks. Selain itu, harmonisasi regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan kebingungan dalam penegakan hukum. Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan menyusun pedoman yang jelas mengenai kriteria dan prosedur penuntutan korporasi, serta memastikan bahwa semua undang-undang sektoral memiliki standar yang konsisten mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

## **B. Kebijakan Pemerintah dalam Reformasi Hukum**

Reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan penegakan hukum di negara ini. Kebijakan pemerintah dalam reformasi hukum pidana korporasi mencakup berbagai inisiatif dan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas korporasi dalam menghadapi tindak pidana. Berikut adalah beberapa kebijakan penting yang telah diambil oleh pemerintah dalam rangka reformasi hukum pidana korporasi.

### **1. Penerbitan Undang-Undang Khusus**

Penerbitan undang-undang khusus merupakan salah satu langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Langkah ini

mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh entitas korporasi dan memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas tindakannya. Dua contoh utama dari undang-undang ini di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 merupakan salah satu tonggak penting dalam kerangka hukum pidana korporasi di Indonesia. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang, serta menetapkan berbagai ketentuan untuk mencegah dan memberantas praktik tersebut. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Di dalamnya, korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh individu-individu dalam perusahaan, terutama jika tindakan tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan usaha perusahaan. Ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menuntut perusahaan yang terlibat dalam praktik pencucian uang, serta menetapkan sanksi yang dapat dikenakan, termasuk denda dan pembubaran perusahaan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga berperan penting dalam penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam kasus korupsi. Dalam undang-undang ini, korporasi dapat dituntut jika terbukti bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh individu yang memiliki otoritas atau peran signifikan dalam perusahaan, dan tindakan tersebut memberikan manfaat bagi perusahaan. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya menyoroti individu yang melakukan korupsi, tetapi juga entitas korporasi yang mendapat keuntungan dari praktik tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi perusahaan dan mendorong praktik bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Penerbitan undang-undang khusus ini juga mencakup mekanisme penegakan hukum yang lebih rinci dan komprehensif. Misalnya, undang-undang ini mengatur tentang prosedur penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi terhadap korporasi yang terlibat

dalam tindak pidana. Hal ini termasuk ketentuan mengenai penyitaan aset, pengawasan terhadap kegiatan usaha, serta kerjasama dengan lembaga internasional untuk menanggulangi tindak pidana lintas batas. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan penegakan hukum terhadap korporasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu menjangkau tindak pidana yang lebih kompleks dan terorganisir.

## **2. Harmonisasi Regulasi**

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam melakukan harmonisasi regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Harmonisasi regulasi ini bertujuan untuk menghilangkan inkonsistensi dan tumpang tindih antara berbagai undang-undang sektoral yang mengatur tentang korporasi. Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan tercipta keseragaman dalam penerapan hukum yang memudahkan proses penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Menurut Rahardjo (2021), salah satu tujuan utama dari harmonisasi regulasi adalah memastikan bahwa berbagai undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dapat beroperasi secara selaras dan efektif. Hal ini penting mengingat sebelumnya terdapat berbagai undang-undang sektoral yang memiliki ketentuan berbeda mengenai bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketidakkonsistenan ini sering kali menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam penegakan hukum, serta memberikan celah bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Proses harmonisasi regulasi ini melibatkan peninjauan dan revisi berbagai undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang baru, yang mencakup ketentuan yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. RUU KUHP yang baru berusaha untuk mengakomodasi berbagai perubahan dalam dinamika ekonomi dan sosial, serta menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif dan modern untuk menangani tindak pidana korporasi. Selain itu, harmonisasi regulasi juga mencakup penyesuaian dengan standar internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC). Penyesuaian ini penting untuk

memastikan bahwa regulasi domestik Indonesia sesuai dengan komitmen internasional dalam memerangi tindak pidana korporasi. Dengan mengadopsi standar internasional ini, Indonesia tidak hanya memperkuat kerangka hukum domestiknya, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan reputasinya di mata komunitas internasional.

Implementasi harmonisasi regulasi juga melibatkan peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hal ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai ketentuan baru yang diatur dalam undang-undang hasil harmonisasi, serta peningkatan kerjasama dan koordinasi antara berbagai lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, diharapkan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, harmonisasi regulasi juga mendorong adanya partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan konsisten, korporasi diharapkan dapat lebih memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta berperan aktif dalam menciptakan iklim bisnis yang lebih bersih dan beretika.

### **3. Penguatan Lembaga Penegak Hukum**

Kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana korporasi mencakup penguatan lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Penguatan lembaga ini melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas dan teknologi yang memadai, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Salah satu contoh konkret dari upaya ini adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi, termasuk yang melibatkan korporasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum menjadi salah satu fokus utama dalam penguatan lembaga ini. Sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dengan baik sangat penting untuk memastikan bahwa investigasi dan penuntutan terhadap tindak pidana korporasi dapat dilakukan secara profesional dan efektif. Menurut Setiadi (2020), pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai aspek-aspek khusus dari tindak pidana korporasi sangat

diperlukan. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang hukum korporasi, teknik investigasi yang relevan, serta penggunaan teknologi modern dalam penyelidikan.

Penyediaan fasilitas dan teknologi yang memadai juga merupakan elemen kunci dalam penguatan lembaga penegak hukum. Teknologi canggih, seperti perangkat lunak analisis data dan sistem informasi yang terintegrasi, dapat membantu dalam mendeteksi, menganalisis, dan menangani tindak pidana korporasi dengan lebih efisien. Misalnya, perangkat lunak anti-pencucian uang dapat digunakan untuk melacak aliran dana yang mencurigakan, sementara sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga penegak hukum. Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga sangat penting dalam penanganan tindak pidana korporasi. Tanpa koordinasi yang baik, upaya penegakan hukum dapat menjadi terhambat oleh tumpang tindih yurisdiksi dan kurangnya komunikasi antara lembaga. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antar lembaga, seperti antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, sangat diperlukan. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, proses investigasi dan penuntutan dapat berjalan lebih lancar dan efisien, serta meminimalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

#### **4. Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas**

Kebijakan pemerintah dalam reformasi hukum pidana korporasi juga mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas korporasi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua aspek fundamental yang sangat diperlukan untuk menciptakan iklim bisnis yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Salah satu inisiatif penting dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah penerapan kewajiban bagi korporasi untuk melaporkan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Kewajiban ini mencakup pelaporan keuangan, pelaporan kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaporan kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko pidana. Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah elemen penting dalam memastikan bahwa korporasi beroperasi dengan jujur dan bertanggung jawab. Dengan adanya kewajiban pelaporan keuangan, korporasi harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta melaporkan semua transaksi keuangan secara jujur

dan terbuka. Pelaporan ini tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk pihak-pihak terkait lainnya seperti pemerintah, otoritas pajak, dan masyarakat luas. Transparansi dalam pelaporan keuangan dapat mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti korupsi, penggelapan pajak, dan manipulasi laporan keuangan.

Korporasi juga diwajibkan untuk melaporkan kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku. Pelaporan kepatuhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, lingkungan, hingga regulasi yang spesifik terkait dengan industri tertentu. Dengan adanya pelaporan kepatuhan ini, pemerintah dan otoritas terkait dapat memantau sejauh mana korporasi mematuhi regulasi yang berlaku, serta mengambil tindakan yang diperlukan apabila ditemukan pelanggaran. Pelaporan kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko pidana juga merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas korporasi. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko pidana, seperti transaksi yang mencurigakan, konflik kepentingan, dan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga yang tidak jelas reputasinya, harus dilaporkan secara teratur dan transparan. Dengan adanya pelaporan ini, korporasi dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko pidana secara lebih efektif, serta mencegah terjadinya tindak pidana.

Menurut Haryanto (2022), transparansi dan akuntabilitas korporasi dapat diperkuat melalui penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG mencakup tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan keadilan dalam pengelolaan korporasi. Dengan penerapan GCG, diharapkan korporasi dapat lebih proaktif dalam mencegah tindak pidana dan menjaga integritas operasional. Prinsip tanggung jawab menekankan pentingnya korporasi untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil. Transparansi mengharuskan korporasi untuk beroperasi secara terbuka dan jujur, serta menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Akuntabilitas berarti bahwa korporasi harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, baik kepada pemegang saham maupun kepada otoritas terkait. Kemandirian menekankan pentingnya korporasi untuk bebas dari tekanan atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, keadilan menuntut agar korporasi memperlakukan semua pihak terkait dengan adil dan tanpa diskriminasi.

## **5. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten**

Pemerintah menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana sebagai bagian dari upaya reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas berarti bahwa tidak ada toleransi terhadap korporasi yang melanggar hukum, dan sanksi yang dijatuhkan harus mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi korporasi lainnya, sehingga berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan melanggar hukum. Penegakan hukum yang konsisten, di sisi lain, berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap semua korporasi, tanpa memandang ukuran, pengaruh, atau kekuasaan. Semua korporasi, baik besar maupun kecil, harus diperlakukan sama di mata hukum.

Menurut Siregar (2021), penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga mencakup pemberian perlindungan terhadap saksi dan pelapor tindak pidana korporasi. Perlindungan ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengungkapan tindak pidana dan memastikan bahwa saksi dan pelapor tidak mengalami intimidasi atau ancaman. Tanpa adanya perlindungan ini, masyarakat akan enggan melaporkan tindak pidana yang diketahui karena takut akan konsekuensi negatif yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi dan pelapor merupakan komponen kunci dalam sistem penegakan hukum yang efektif.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum. Koordinasi yang baik antara polisi, jaksa, dan pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan lancar dan efektif. Tanpa adanya kerjasama yang baik, upaya penegakan hukum bisa terhambat oleh birokrasi dan kurangnya sinkronisasi antara lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum merupakan prioritas utama dalam penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga harus didukung oleh sistem hukum yang kuat dan transparan. Reformasi sistem hukum yang mencakup perbaikan dalam prosedur pengadilan, peningkatan kapasitas hakim dan jaksa, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga penegak hukum sangat penting untuk mencapai



penegakan hukum yang adil dan efektif. Selain itu, transparansi dalam proses hukum juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat melihat bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Untuk mencapai penegakan hukum yang tegas dan konsisten, pemerintah juga perlu mengadopsi teknologi modern dalam proses penegakan hukum. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu dalam pengumpulan dan analisis bukti, pemantauan aktivitas korporasi, dan pelaporan tindak pidana. Dengan adanya teknologi modern, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien dan efektif, serta mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum.

## **6. Kerjasama Internasional**

Kebijakan pemerintah dalam reformasi hukum pidana korporasi mencakup peningkatan kerjasama internasional, yang menjadi semakin penting mengingat sifat transnasional dari banyak tindak pidana korporasi seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan kejahatan siber. Dalam menghadapi tantangan global ini, pemerintah Indonesia aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi. Kerjasama internasional ini mencakup berbagai aspek, termasuk pertukaran informasi, pelaksanaan investigasi bersama, dan penegakan hukum lintas batas. Misalnya, dalam kasus pencucian uang, kerjasama internasional memungkinkan otoritas Indonesia untuk melacak aliran dana yang melintasi beberapa yurisdiksi, yang sering kali merupakan bagian dari jaringan kriminal yang kompleks. Selain itu, investigasi bersama dengan negara-negara lain dapat meningkatkan efektivitas penyelidikan, karena memungkinkan berbagai lembaga penegak hukum untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian.

Menurut Wahyudi (2020), kerjasama internasional juga mencakup pertukaran informasi dan best practices dalam penanganan tindak pidana korporasi. Dengan demikian, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dan menerapkan praktik terbaik dalam penegakan hukum pidana korporasi. Misalnya, melalui partisipasi dalam forum-forum internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Indonesia dapat memperoleh wawasan tentang metode terbaru dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan korporasi, serta mengadopsi standar-

standar internasional yang relevan. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional seperti Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) juga merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kerjasama internasional. Dengan meratifikasi konvensi-konvensi ini, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan standar-standar internasional dalam penegakan hukum pidana korporasi dan bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menanggulangi kejahatan transnasional.

### **C. Evaluasi Terhadap Reformasi yang Telah Dilakukan**

Evaluasi terhadap reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia adalah langkah penting untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini mencakup analisis berbagai aspek, termasuk keberhasilan dalam mencapai tujuan, hambatan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Berikut adalah beberapa poin penting dalam evaluasi terhadap reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia.

#### **1. Keberhasilan dan Dampak Positif**

Keberhasilan reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai indikator yang menunjukkan dampak positif dari kebijakan tersebut. Salah satu indikator utama adalah peningkatan jumlah kasus korporasi yang diadili dan dijatuhi hukuman. Data terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam jumlah kasus korupsi yang melibatkan korporasi sejak diberlakukannya undang-undang khusus mengenai tindak pidana korporasi. KPK, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi, telah berhasil menindaklanjuti berbagai kasus besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar, menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah memberikan alat yang lebih efektif untuk menanggulangi kejahatan korporasi.

Penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten juga telah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan korporasi terhadap regulasi yang berlaku. Dengan adanya sanksi yang lebih berat dan proses hukum yang lebih transparan, korporasi kini lebih cenderung untuk mematuhi

peraturan yang ada dan menerapkan praktik-praktik yang sesuai dengan hukum. Hal ini tercermin dalam peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta penurunan jumlah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi. Selain itu, reformasi hukum pidana korporasi juga berdampak positif pada tata kelola perusahaan di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (2021), penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) telah membantu korporasi dalam mencegah tindak pidana dan menjaga integritas operasional. Prinsip-prinsip GCG, yang meliputi tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan keadilan, memberikan kerangka kerja yang jelas bagi korporasi untuk menjalankan bisnis dengan etika yang tinggi dan mematuhi peraturan hukum. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya mencegah terjadinya kejahatan korporasi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan investor terhadap integritas perusahaan.

## **2. Hambatan dan Tantangan**

Meskipun reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia telah menunjukkan berbagai keberhasilan, perjalanan menuju penegakan hukum yang efektif dan adil masih menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Menurut Wahyudi (2020), meskipun terdapat upaya untuk memperkuat lembaga penegak hukum, masih terdapat keterbatasan yang mencolok dalam hal jumlah personel, fasilitas, dan teknologi yang memadai untuk menangani kasus-kasus korporasi yang kompleks. Kasus-kasus korporasi sering kali melibatkan jaringan yang luas dan kompleks, dokumen yang melimpah, serta teknologi canggih yang digunakan untuk memanipulasi data dan transaksi. Keterbatasan dalam sumber daya ini menghambat kemampuan lembaga penegak hukum untuk melakukan investigasi yang mendalam dan menyeluruh, serta mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk proses penuntutan yang efektif.

Hambatan budaya juga menjadi tantangan signifikan dalam reformasi hukum pidana korporasi. Menurut Siregar (2021), budaya korupsi dan nepotisme masih kuat di beberapa sektor, yang membuat penerapan hukum secara adil dan konsisten menjadi sulit. Budaya ini sering kali mengakar dalam struktur sosial dan organisasi, menyebabkan adanya resistensi terhadap perubahan dan menumbuhkan praktik-praktik yang melanggar etika dan hukum. Korupsi dan nepotisme dapat

mengaburkan proses hukum dan memperburuk masalah keadilan, karena individu-individu yang terlibat sering kali memiliki akses ke kekuasaan dan pengaruh yang memungkinkan untuk menghindari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, reformasi hukum perlu disertai dengan upaya untuk mengubah budaya organisasi dan sosial yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakjelasan dalam definisi dan cakupan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sejumlah undang-undang sektoral sering kali memiliki ketentuan yang berbeda mengenai bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, yang menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini menciptakan kebingungan di antara lembaga penegak hukum dan praktisi hukum mengenai batasan-batasan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta bagaimana menerapkan sanksi yang tepat. Kurangnya harmonisasi regulasi ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi korporasi, serta menghambat upaya penegakan hukum yang efektif.

### **3. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan terkait reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia mengungkapkan adanya beberapa area yang memerlukan perhatian dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Salah satu area yang perlu diperbaiki adalah harmonisasi regulasi antara undang-undang sektoral dan undang-undang khusus tentang tindak pidana korporasi. Harmonisasi ini sangat penting untuk mengatasi masalah inkonsistensi dan tumpang tindih dalam regulasi yang sering kali menghambat penegakan hukum. Menurut Rahardjo (2021), tanpa adanya harmonisasi yang memadai, penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan dapat membingungkan bagi lembaga penegak hukum dan korporasi itu sendiri. Regulasi yang tumpang tindih atau bertentangan dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis untuk menyelaraskan berbagai undang-undang sektoral dengan undang-undang khusus mengenai tindak pidana korporasi, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan adil.

Evaluasi juga menunjukkan bahwa pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan. Menurut Setiadi

(2020), pengetahuan dan keterampilan khusus mengenai tindak pidana korporasi sangat penting untuk efektivitas investigasi dan penuntutan. Kasus-kasus korporasi sering kali melibatkan transaksi dan struktur yang kompleks, sehingga aparat penegak hukum memerlukan pemahaman mendalam tentang mekanisme operasional korporasi dan teknik investigasi yang canggih. Pelatihan yang lebih baik akan membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi bukti, memahami modus operandi, dan melakukan penuntutan dengan lebih efisien. Dengan peningkatan kapasitas dalam hal ini, diharapkan penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat.

Aspek ketiga yang perlu mendapat perhatian adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kegiatan korporasi. Haryanto (2022) menekankan pentingnya mendorong korporasi untuk melaporkan kegiatan secara lebih transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam mencapai tujuan ini. Korporasi perlu diwajibkan untuk melaporkan informasi keuangan secara transparan, serta melaporkan kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku. Transparansi dalam pelaporan tidak hanya membantu mencegah tindak pidana tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap korporasi. Selain itu, akuntabilitas dalam pelaporan juga memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakannya dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah perlu terus mendorong dan memfasilitasi upaya untuk meningkatkan transparansi ini, termasuk dengan menerapkan regulasi yang lebih ketat dan menyediakan insentif bagi korporasi yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap akuntabilitas.

#### **4. Rekomendasi untuk Perbaikan**

Berdasarkan evaluasi mendalam terhadap reformasi hukum pidana korporasi di Indonesia, beberapa rekomendasi untuk perbaikan muncul sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Penguatan lembaga penegak hukum merupakan prioritas utama. Pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas lembaga ini dengan memberikan pelatihan tambahan untuk personel, memperbaiki fasilitas, dan memperbarui teknologi yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus korporasi yang semakin

kompleks. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat bekerja sama secara efisien dan efektif dalam mengatasi tindak pidana korporasi. Penting untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai aspek khusus dari tindak pidana korporasi. Pendidikan yang lebih mendalam dan terfokus akan memastikan bahwa aparat memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut kasus-kasus korporasi dengan lebih kompeten. Program pelatihan yang berkelanjutan akan membantu aparat penegak hukum dalam mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan praktik bisnis dan teknologi.

Harmonisasi regulasi antara undang-undang sektoral dan undang-undang khusus tentang tindak pidana korporasi harus menjadi fokus perhatian. Inkonsistensi dan tumpang tindih dalam regulasi dapat menghambat penegakan hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi korporasi. Pemerintah perlu mengupayakan penyelarasan antara berbagai undang-undang yang mengatur korporasi agar penerapan hukum menjadi lebih konsisten dan efektif. Harmonisasi ini akan mengurangi kebingungan dan mempermudah proses penegakan hukum, sehingga korporasi dapat lebih jelas memahami kewajiban dan potensi sanksi yang mungkin dihadapi. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kegiatan korporasi sangat diperlukan. Pemerintah harus mendorong korporasi untuk melaporkan aktivitas secara terbuka dan akuntabel, termasuk dalam hal pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Transparansi yang lebih besar akan memperkuat tata kelola perusahaan dan memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, dorongan untuk adopsi prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) dapat membantu korporasi menjaga integritas operasional dan mencegah tindak pidana.

Perubahan budaya yang mendukung transparansi dan akuntabilitas harus terus didorong. Kampanye kesadaran publik dan edukasi tentang pentingnya pencegahan tindak pidana korporasi sangat krusial. Perubahan budaya yang mengutamakan integritas dan etika bisnis akan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk praktik korupsi dan penyimpangan. Pendekatan ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan, untuk bersama-sama membangun budaya bisnis yang lebih

bersih dan bertanggung jawab. Kerjasama internasional merupakan komponen penting dalam menangani tindak pidana korporasi yang bersifat transnasional. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mengatasi kejahatan yang melintasi batas negara. Pertukaran informasi dan best practices dapat memberikan wawasan berharga dan membantu dalam penanganan kasus-kasus yang lebih kompleks. Kolaborasi internasional akan memperkuat jaringan global dalam memerangi tindak pidana korporasi dan memastikan bahwa praktik terbaik diadopsi secara luas.

# **BAB X**

## **PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI**

---

Pada penegakan hukum pidana korporasi, peran pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk memastikan sistem hukum yang efektif dan adil. Pemangku kepentingan mencakup berbagai aktor seperti pemerintah, lembaga negara, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media. Masing-masing pihak membawa kontribusi unik yang dapat memperkuat proses penegakan hukum. Pemerintah dan lembaga negara bertanggung jawab untuk merumuskan, menerapkan, dan menegakkan hukum, sementara LSM dan masyarakat berperan dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran, serta mempromosikan akuntabilitas dan transparansi. Media berperan kunci dalam meningkatkan kesadaran publik dan memonitor tindakan korporasi serta proses hukum. Kolaborasi antara semua pemangku kepentingan ini dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih kuat, meminimalkan celah hukum, dan memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, tantangan seperti koordinasi, perbedaan kepentingan, dan keterbatasan sumber daya seringkali menguji efektivitas kolaborasi ini. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran masing-masing pemangku kepentingan dan caranya berinteraksi sangat penting untuk memperkuat penegakan hukum pidana korporasi.

### **A. Peran Pemerintah dan Lembaga Negara**

Penegakan hukum pidana korporasi merupakan salah satu aspek yang krusial dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif. Pemerintah dan lembaga negara berperan utama dalam upaya ini, dengan tanggung jawab yang mencakup pembentukan kebijakan, pengawasan,



penegakan hukum, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

### **1. Pembentukan Kebijakan dan Regulasi**

Pembentukan kebijakan dan regulasi oleh pemerintah berperan krusial dalam mengatur aktivitas korporasi dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil serta teratur. Melalui undang-undang dan peraturan, pemerintah menetapkan standar hukum yang wajib dipatuhi oleh korporasi, mencakup berbagai aspek mulai dari tata kelola perusahaan hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kebijakan ini dirancang untuk mengatur dan mengawasi praktik bisnis, memastikan bahwa korporasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku. Regulasi yang efektif tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindak pidana korporasi, tetapi juga untuk memberikan panduan yang jelas kepada korporasi mengenai ekspektasi dan kewajiban.

Sebagai contoh, undang-undang tentang tata kelola perusahaan menetapkan kewajiban bagi korporasi untuk memiliki sistem pengawasan internal yang memadai, mematuhi standar pelaporan keuangan, dan menjaga transparansi dalam operasionalnya. Regulasi terkait tanggung jawab lingkungan mengharuskan korporasi untuk mematuhi norma-norma perlindungan lingkungan, mengelola limbah dengan benar, dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas bisnis terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, regulasi tersebut berfungsi sebagai alat pencegahan yang mencegah terjadinya praktik bisnis yang merugikan atau melanggar hukum.

Menurut Susanti (2021), pentingnya regulasi yang jelas dan tegas tidak bisa dianggap sepele. Regulasi yang dirumuskan dengan baik menciptakan kepastian hukum, yang sangat penting bagi korporasi agar dapat beroperasi dengan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban. Kepastian hukum ini juga memudahkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran, karena aturan yang jelas mengurangi kemungkinan terjadinya ambiguitas dalam penegakan hukum. Namun, tantangan utama dalam pembentukan kebijakan dan regulasi adalah memastikan bahwa aturan-aturan ini tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu. Lingkungan bisnis yang terus berubah dan perkembangan teknologi baru memerlukan penyesuaian regulasi agar tetap dapat mengatasi isu-isu yang muncul. Oleh karena itu, regulasi harus diperbarui secara berkala untuk

menyesuaikan dengan dinamika pasar, perubahan dalam praktik bisnis, dan kemajuan teknologi.

## **2. Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen vital dalam memastikan bahwa korporasi mematuhi regulasi dan beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran pemerintah dan lembaga negara dalam proses ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan mencegah tindak pidana korporasi. Lembaga seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi aktivitas korporasi, memastikan bahwa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini melibatkan serangkaian kegiatan seperti pemantauan rutin, audit, dan inspeksi yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

Pemantauan rutin merupakan langkah awal dalam pengawasan, di mana lembaga terkait secara teratur memeriksa laporan keuangan, kegiatan operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Audit yang dilakukan secara berkala berfungsi untuk menilai kepatuhan korporasi terhadap standar yang ditetapkan dan mendeteksi adanya praktik yang menyimpang dari hukum. Inspeksi, di sisi lain, melibatkan pemeriksaan langsung terhadap kegiatan dan fasilitas korporasi untuk memastikan bahwa operasinya tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Ketika ditemukan indikasi pelanggaran, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mengambil alih untuk melakukan investigasi mendalam, penuntutan, dan akhirnya, pengadilan kasus-kasus pidana korporasi.

Proses pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil secara adil dan tidak memihak. Ini penting agar proses hukum dapat dipercaya oleh publik dan para pemangku kepentingan. Transparansi melibatkan keterbukaan dalam pelaporan hasil pengawasan dan penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Namun, tantangan besar dalam pengawasan dan penegakan hukum adalah adanya risiko korupsi dan kolusi yang dapat melemahkan

integritas proses hukum. Korupsi, di mana pejabat atau aparat hukum menerima suap atau bentuk-bentuk gratifikasi lainnya untuk melonggarkan atau mengabaikan aturan, dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat penegakan hukum yang efektif. Kolusi antara korporasi dan pejabat penegak hukum juga dapat mengarah pada praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum.

### **3. Pemberian Sanksi**

Pemberian sanksi terhadap korporasi yang melanggar hukum adalah salah satu elemen kunci dalam sistem penegakan hukum pidana korporasi. Sanksi bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah pelanggaran di masa depan. Sanksi ini dapat bervariasi, mulai dari denda finansial yang besar, pencabutan izin usaha, pembatasan aktivitas bisnis, hingga pembubaran korporasi yang terlibat dalam pelanggaran berat. Setiap bentuk sanksi memiliki peranannya sendiri dalam memberikan efek jera kepada korporasi yang bersangkutan dan mencegah korporasi lain dari melakukan tindakan serupa. Denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang paling umum diterapkan. Denda yang signifikan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar bagi korporasi, sehingga mendorongnya untuk lebih berhati-hati dalam beroperasi dan mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, denda saja mungkin tidak cukup untuk menanggulangi pelanggaran serius, terutama jika nilai denda tersebut dianggap tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari tindakan melanggar hukum.

Pencabutan izin usaha adalah bentuk sanksi yang lebih berat, yang dapat menghentikan aktivitas bisnis korporasi secara permanen. Sanksi ini diterapkan untuk korporasi yang terlibat dalam pelanggaran berat atau berulang kali, yang menunjukkan bahwa tidak mampu atau tidak mau mematuhi peraturan yang ada. Pencabutan izin usaha dapat memiliki dampak signifikan tidak hanya pada korporasi itu sendiri, tetapi juga pada karyawan, pemasok, dan komunitas yang bergantung pada kegiatan bisnis tersebut. Pembatasan aktivitas bisnis adalah bentuk sanksi yang lebih fleksibel, di mana korporasi mungkin diizinkan untuk terus beroperasi tetapi dengan pembatasan tertentu. Misalnya, mungkin dilarang untuk melakukan aktivitas tertentu atau perlu memenuhi persyaratan tambahan untuk melanjutkan operasinya. Sanksi ini dapat menjadi cara untuk mengoreksi perilaku tanpa menghentikan seluruh aktivitas bisnis korporasi.

#### **4. Kolaborasi Antar Lembaga**

Penegakan hukum pidana korporasi merupakan tugas yang kompleks dan sering kali melibatkan berbagai lembaga negara yang memiliki peran berbeda namun saling terkait. Kolaborasi antar lembaga ini adalah kunci untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan efektif dan menyeluruh. Dalam konteks ini, lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pengawas lainnya harus bekerja sama dengan sinergi tinggi. Setiap lembaga membawa keahlian dan tanggung jawab spesifiknya, dan kolaborasi yang efektif antar lembaga dapat memastikan bahwa kasus-kasus pidana korporasi ditangani secara komprehensif dan tuntas. Kepolisian berperan dalam tahap awal penyelidikan, termasuk pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi. Kejaksaan kemudian terlibat dalam proses penuntutan, dengan memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan cukup untuk mengajukan tuntutan yang kuat di pengadilan. Pengadilan bertugas untuk memberikan keputusan akhir berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh jaksa dan pembela. Selain itu, lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan penting dalam pengawasan dan regulasi, memastikan bahwa korporasi mematuhi standar hukum dan etika.

Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan koordinasi di dalam negeri tetapi juga sering kali memerlukan pertukaran informasi dan kerjasama dengan lembaga internasional, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan korporasi transnasional. Misalnya, dalam kasus pencucian uang atau korupsi internasional, informasi dan bukti sering kali melibatkan lebih dari satu negara. Dalam situasi ini, lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol, serta lembaga penegak hukum dari negara lain, untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan melaksanakan tindakan hukum yang tepat. Menurut Wahyudi (2021), kolaborasi yang efektif antara lembaga penegak hukum dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan kasus pidana korporasi. Tanpa koordinasi yang baik, risiko terjadinya tumpang tindih atau kekurangan dalam investigasi dapat meningkat. Misalnya, jika kepolisian dan kejaksaan tidak saling berbagi informasi, bisa terjadi situasi di mana bukti yang penting tidak diungkapkan atau dimanfaatkan secara optimal. Koordinasi yang buruk dapat mengakibatkan penanganan kasus yang

lambat atau tidak lengkap, yang pada akhirnya dapat merugikan proses penegakan hukum.

## **5. Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum pidana korporasi, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang regulasi yang kompleks serta keterampilan teknis untuk menangani kasus-kasus yang sering kali melibatkan struktur dan operasional korporasi yang rumit. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan ini, untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya memahami hukum yang berlaku tetapi juga mampu menerapkannya secara efektif dalam konteks korporasi.

Pendidikan bagi penegak hukum harus meliputi materi tentang hukum pidana korporasi, termasuk aspek-aspek seperti tanggung jawab perusahaan, pelanggaran regulasi, dan dampak dari tindak pidana korporasi terhadap ekonomi dan masyarakat. Selain itu, pelatihan harus mencakup pengembangan keterampilan praktis, seperti teknik investigasi yang spesifik untuk kasus korporasi, penggunaan alat analisis data untuk melacak aliran dana, dan pemahaman mengenai dokumen-dokumen keuangan dan laporan yang sering menjadi bukti dalam kasus-kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Dengan demikian, penegak hukum dapat lebih siap menghadapi tantangan yang muncul dalam kasus-kasus yang melibatkan korporasi besar dengan struktur yang kompleks.

Menurut Sutanto (2022), pelatihan berkelanjutan merupakan kunci untuk memastikan bahwa penegak hukum tetap kompeten dan profesional dalam menangani kasus-kasus pidana korporasi. Dunia bisnis dan regulasi terus berkembang, dengan munculnya teknologi baru, perubahan dalam praktik bisnis, dan peraturan baru yang dapat mempengaruhi cara penegakan hukum dilakukan. Pelatihan berkelanjutan membantu penegak hukum untuk selalu up-to-date dengan perkembangan terbaru dan teknik-teknik baru dalam investigasi dan penuntutan. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks tetapi juga memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan hukum dan bisnis.

## **B. Peran Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat**

Penegakan hukum pidana korporasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masyarakat dan LSM memiliki peran penting dalam mengawasi, melaporkan, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam aktivitas korporasi. Berikut ini adalah beberapa peran yang dimainkan oleh masyarakat dan LSM dalam penegakan hukum pidana korporasi.

### **1. Pengawasan dan Pemantauan**

Pengawasan dan pemantauan oleh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa aktivitas korporasi dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Masyarakat, terutama yang terdampak langsung oleh kegiatan korporasi, sering kali menjadi saksi langsung dari praktik bisnis yang mungkin melanggar hukum atau merugikan lingkungan dan komunitas. Dalam konteks ini, berfungsi sebagai mata dan telinga di lapangan, memberikan informasi yang sangat berharga kepada pihak berwenang atau lembaga pengawas mengenai potensi pelanggaran atau praktik bisnis yang tidak etis.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini dan mendesak korporasi untuk bertindak dengan lebih bertanggung jawab. Ketika masyarakat merasa bahwa memiliki peran dalam mengawasi kegiatan korporasi, lebih cenderung melaporkan tindakan yang mencurigakan atau pelanggaran yang terjadi. Misalnya, jika sebuah perusahaan tambang mencemari sungai yang menjadi sumber air bagi komunitas setempat, anggota masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada otoritas lingkungan atau lembaga pengawas. Melalui mekanisme pelaporan ini, pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Menurut Harianto (2021), partisipasi masyarakat dalam pengawasan berfungsi sebagai lapisan tambahan dari kontrol sosial yang membantu menjaga korporasi agar tetap bertindak sesuai dengan norma-norma hukum dan etika. Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pasif, tetapi juga aktif dalam memberikan masukan dan

mengajukan keluhan terhadap praktik yang dianggap tidak etis atau merugikan. Dengan adanya tekanan dari masyarakat, korporasi cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan operasional, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga berperan krusial dalam pengawasan terhadap praktik-praktik korporasi. LSM sering kali memiliki sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan pemantauan yang mendalam dan menyeluruh, dapat melakukan audit, penelitian, dan kampanye kesadaran untuk mengungkap pelanggaran dan mendorong reformasi. Melalui laporan yang diterbitkan dan kegiatan advokasi, LSM membantu meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu penting dan menekan korporasi untuk memperbaiki prakteknya.

## **2. Pelaporan dan Advokasi**

Pelaporan dan advokasi merupakan aspek krusial dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum pidana korporasi, di mana masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting dalam melaporkan pelanggaran dan mendukung hak-hak masyarakat. Ketika masyarakat menyaksikan atau mengalami dampak negatif dari aktivitas korporasi, memiliki peran sebagai pelapor yang dapat memberikan informasi penting kepada pihak berwenang atau LSM. Hal ini sangat penting karena sering kali, masyarakat yang terdampak langsung oleh tindakan korporasi memiliki pengetahuan dan bukti yang berharga mengenai pelanggaran hukum atau praktik bisnis yang tidak etis. LSM sering kali menyediakan saluran pelaporan yang aman dan mendukung bagi masyarakat, memastikan bahwa pelaporan dilakukan dalam kondisi yang terlindungi dan tanpa risiko pembalasan dari pihak korporasi. Saluran pelaporan ini bisa berupa sistem pengaduan online, hotline, atau tempat pengaduan fisik yang aman, di mana masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tanpa takut akan dampak negatif bagi dirinya. Dukungan ini penting karena memberikan rasa aman kepada pelapor, yang mungkin merasa terancam jika melaporkan pelanggaran tanpa perlindungan yang memadai.

LSM juga berfungsi sebagai advokat yang mendampingi masyarakat dalam proses hukum, membantu masyarakat memahami hak-haknya dan proses hukum yang harus dilalui. LSM sering kali memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menavigasi sistem hukum yang kompleks, sehingga dapat memberikan bantuan yang

sangat berharga bagi individu atau komunitas yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya sendiri, membantu dalam penyusunan laporan, pengumpulan bukti, dan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa pelaporan ditindaklanjuti dengan serius. Menurut Nugraha (2022), LSM berperan penting dalam memberikan suara kepada masyarakat yang mungkin kurang memiliki akses atau kemampuan untuk melaporkan pelanggaran secara langsung. Banyak masyarakat yang terdampak mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara melaporkan pelanggaran atau tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya. Dalam hal ini, LSM bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum, serta memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran hukum mendapatkan perhatian yang layak.

### **3. Pendidikan dan Penyelesaian**

Pendidikan dan penyelesaian berperan krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya serta tanggung jawab korporasi. Melalui program pendidikan dan kampanye penyelesaian, masyarakat diberdayakan untuk memahami dampak dari praktik bisnis yang tidak etis serta pentingnya penegakan hukum pidana korporasi. Masyarakat yang teredukasi dengan baik lebih mampu mengenali pelanggaran dan memahami prosedur pelaporan, yang pada gilirannya mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. Menurut Widjaja (2020), pendidikan yang efektif adalah kunci dalam memberdayakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Program-program pendidikan ini sering kali dilakukan oleh LSM yang fokus pada isu-isu korporasi dan hak asasi manusia, serta oleh lembaga-lembaga pemerintah yang ingin meningkatkan kesadaran publik. Melalui seminar, lokakarya, kursus, dan publikasi, masyarakat diberikan informasi mengenai hak-haknya sebagai individu yang terdampak oleh tindakan korporasi, serta prosedur hukum yang ada untuk melindungi hak-hak tersebut.

Kampanye penyelesaian juga merupakan alat penting dalam mendidik masyarakat mengenai tanggung jawab korporasi dan dampak dari praktik bisnis yang tidak etis. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, televisi, radio, dan brosur. Tujuan utama dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana tindakan korporasi dapat



memengaruhi lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Informasi yang disebarluaskan melalui kampanye penyadaran membantu masyarakat menyadari bahwa ia memiliki peran aktif dalam menuntut tanggung jawab dari korporasi dan memastikan bahwa praktik bisnis dilakukan secara etis. Program pendidikan dan kampanye penyadaran tidak hanya memfokuskan pada pengetahuan hukum, tetapi juga pada pengembangan keterampilan praktis. Masyarakat diajari bagaimana cara mengidentifikasi pelanggaran, menyusun laporan pelanggaran, dan berinteraksi dengan lembaga penegak hukum. Dengan keterampilan ini, menjadi lebih percaya diri dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan lebih siap untuk berpartisipasi dalam proses hukum.

#### **4. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas**

Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam dunia korporasi merupakan salah satu fokus utama dari banyak LSM, yang berperan aktif dalam memantau dan mengawasi praktik bisnis korporasi. LSM sering kali melakukan penelitian independen yang mendalam, menyusun laporan terperinci, dan mempublikasikan temuannya kepada publik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menekan korporasi agar lebih bertanggung jawab terhadap aktivitas. Penelitian dan laporan ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik dan kebijakan korporasi tetapi juga membantu masyarakat, media, dan pembuat kebijakan untuk memahami dampak dari aktivitas korporasi terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Menurut Pratama (2021), laporan dan publikasi yang dihasilkan oleh LSM dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam mendorong perubahan. Laporan-laporan ini sering kali mencakup data dan analisis yang mendalam tentang bagaimana korporasi beroperasi, apakah mematuhi peraturan yang ada, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan. Dengan menyediakan informasi yang transparan dan akurat, LSM dapat mempengaruhi opini publik, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu tertentu, dan menekan korporasi untuk memperbaiki praktik.

Transparansi yang dihasilkan dari publikasi ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat luas, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum. Informasi yang disediakan oleh LSM sering kali menjadi dasar bagi tindakan pemerintah dan lembaga hukum dalam menuntut perubahan atau melakukan investigasi lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, laporan LSM telah menjadi katalis untuk intervensi

pemerintah, yang berakibat pada perubahan kebijakan atau penerapan sanksi terhadap korporasi yang tidak patuh. Selain itu, publikasi dari LSM berfungsi sebagai bentuk tekanan publik yang signifikan. Ketika informasi mengenai pelanggaran atau praktik tidak etis korporasi menjadi diketahui oleh publik, korporasi tersebut merasa dorongan untuk memperbaiki perilakunya untuk mempertahankan reputasinya dan menghindari kerugian reputasi. Penekanan publik ini sering kali mendorong korporasi untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

## **5. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum**

Kolaborasi antara masyarakat, LSM, dan lembaga penegak hukum berperan krusial dalam penegakan hukum pidana korporasi. Sinergi ini menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani pelanggaran oleh korporasi. LSM, dengan keahlian dan jaringan, sering kali berperan kunci dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran, memiliki akses langsung ke informasi dari masyarakat dan dapat melakukan penelitian mendalam mengenai praktik bisnis yang tidak etis. Melalui kerja sama ini, LSM dapat menyampaikan temuannya kepada lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang kemudian dapat melakukan investigasi dan tindakan hukum yang diperlukan. Menurut Sari (2022), kolaborasi yang efektif antara masyarakat, LSM, dan lembaga penegak hukum tidak hanya memperkuat kapasitas penegakan hukum tetapi juga memastikan bahwa pelanggaran oleh korporasi ditangani secara tepat dan adil. LSM sering kali berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, menjembatani komunikasi dan memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dalam proses pengambilan keputusan. Melalui kolaborasi ini, LSM dapat menyuarakan kekhawatiran masyarakat dan memberikan data serta bukti yang mendukung tindakan hukum terhadap korporasi yang melanggar hukum.

Proses kolaborasi ini juga mencakup penyusunan kebijakan dan regulasi. LSM sering terlibat dalam diskusi kebijakan untuk memberikan perspektif masyarakat dan mendukung pembuatan kebijakan yang lebih adil dan transparan. Dengan pengalaman di lapangan dan pemahaman mendalam tentang dampak praktik bisnis terhadap masyarakat, LSM dapat memberikan masukan berharga yang membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat. Dalam hal pelaporan pelanggaran, LSM menyediakan saluran yang aman dan dapat diandalkan bagi masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran. LSM dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, melakukan analisis, dan menyampaikan laporan kepada lembaga penegak hukum. Proses ini memastikan bahwa laporan tersebut ditangani dengan serius dan bahwa langkah-langkah hukum yang tepat dapat diambil. Kolaborasi ini juga melibatkan koordinasi dalam penyelidikan kasus dan berbagi informasi yang relevan, yang dapat mempercepat proses hukum dan memastikan bahwa semua bukti diperiksa secara menyeluruh.

## **6. Advokasi untuk Reformasi Hukum**

LSM berperan penting dalam advokasi untuk reformasi hukum, berusaha untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam mengatur aktivitas korporasi. Melalui berbagai upaya advokasi, LSM dapat mempengaruhi perubahan kebijakan dan peraturan yang dapat memperbaiki kerangka hukum yang ada. Salah satu cara utama LSM berkontribusi adalah dengan melakukan penelitian mendalam tentang kekurangan dalam sistem hukum saat ini. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk mengidentifikasi area di mana reformasi diperlukan dan menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki masalah yang ada. Menurut Haryono (2021), advokasi yang dilakukan oleh LSM dapat secara signifikan memperbaiki kerangka hukum yang ada dengan menawarkan solusi konkret untuk tantangan yang dihadapi dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korporasi. Melalui analisis yang komprehensif, LSM dapat membahas kelemahan dalam regulasi yang berlaku, seperti sanksi yang tidak memadai atau mekanisme pengawasan yang lemah. Dengan menyusun rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan penelitian, LSM membantu merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum.

LSM juga berperan aktif dalam diskusi publik tentang reformasi hukum, sering menyelenggarakan forum, seminar, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan akan perubahan hukum di kalangan masyarakat dan pembuat kebijakan. Diskusi ini membuka ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pandangannya, membahas isu-isu kunci, dan mencari solusi yang dapat diterapkan. Melalui proses ini, LSM membantu membangun konsensus

dan mendorong dukungan untuk reformasi yang diperlukan. Advokasi LSM juga mencakup upaya untuk mendorong peningkatan sanksi terhadap korporasi yang melanggar hukum. Sanksi yang lebih ketat dan proporsional dapat memberikan efek jera yang lebih besar dan mendorong korporasi untuk mematuhi regulasi. LSM berargumen bahwa sanksi yang tidak memadai sering kali tidak mampu mengatasi pelanggaran serius dan mendorong korporasi untuk mencari celah dalam sistem hukum. Oleh karena itu, mendorong perubahan yang memungkinkan pemberian sanksi yang lebih efektif dan adil.

### **C. Peran Media dalam Penegakan Hukum**

Media memiliki peran yang sangat signifikan dalam penegakan hukum pidana korporasi. Dalam era informasi dan digitalisasi saat ini, media berfungsi sebagai jembatan antara kejadian di lapangan dan kesadaran publik serta pemerintah. Berikut adalah beberapa peran utama media dalam konteks penegakan hukum pidana korporasi.

#### **1. Pengawasan dan Investigasi**

Media berperan penting sebagai pengawas terhadap aktivitas korporasi, berfungsi sebagai "mata" publik dalam memantau praktik bisnis yang mungkin tidak etis atau ilegal. Dengan kapasitasnya untuk menjangkau audiens luas dan melakukan penyelidikan mendalam, media sering kali dapat mengidentifikasi dan mengungkap pelanggaran yang mungkin tidak terdeteksi oleh pemerintah atau lembaga penegak hukum. Media memiliki akses ke berbagai sumber informasi dan dapat melakukan penelitian yang mendalam untuk menelusuri jejak pelanggaran korporasi. Menurut Smith (2020), liputan investigasi media memiliki kekuatan untuk mengungkap berbagai kasus korupsi, pelanggaran lingkungan, dan kejahatan ekonomi yang melibatkan korporasi besar. Media tidak hanya melaporkan fakta tetapi juga menyelidiki dan menginvestigasi secara mendalam, sering kali melibatkan pengumpulan data, wawancara dengan sumber-sumber internal, dan analisis dokumen-dokumen rahasia. Proses investigasi ini memungkinkan media untuk menghadirkan informasi yang mungkin tersembunyi dari pandangan publik dan pihak berwenang.

Contoh nyata dari kekuatan investigasi media dapat ditemukan dalam kasus skandal Enron di Amerika Serikat. Kasus ini menunjukkan

bagaimana penyelidikan media dapat memicu perubahan besar. Investigasi yang dilakukan oleh jurnalis mengungkapkan praktik akuntansi yang curang dan penyembunyian utang yang besar oleh Enron, salah satu perusahaan energi terbesar saat itu. Temuan ini tidak hanya mengejutkan publik tetapi juga mengarah pada tindakan hukum yang signifikan, termasuk tuntutan pidana terhadap eksekutif Enron dan reformasi besar dalam regulasi akuntansi dan laporan keuangan di AS. Liputan investigasi media sering kali berfungsi sebagai pemicu bagi tindakan hukum dan perubahan kebijakan. Dengan mengungkap informasi yang sebelumnya tidak diketahui, media memberikan tekanan kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk melakukan tindakan. Ketika media berhasil mengidentifikasi dan melaporkan kasus pelanggaran yang signifikan, hal ini dapat meningkatkan kesadaran publik, yang pada gilirannya mendorong pembuat kebijakan untuk merespons dengan reformasi regulasi atau tindakan penegakan hukum yang lebih ketat.

Peran media sebagai pengawas korporasi juga mencakup kemampuan untuk mendorong transparansi. Dengan mengungkapkan praktik-praktik korporasi yang tidak etis atau ilegal, media membantu mendorong perusahaan untuk bertindak dengan lebih transparan dan akuntabel. Media juga dapat menjadi saluran bagi whistleblower untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan balasan, berfungsi sebagai penghubung antara individu yang mengetahui pelanggaran dan publik yang lebih luas. Namun, peran media dalam pengawasan dan investigasi tidak tanpa tantangan. Jurnalis sering kali menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang terkena dampak investigasi, termasuk ancaman hukum atau tekanan politik. Dalam beberapa kasus, jurnalis juga dapat menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan untuk investigasi, terutama ketika berhadapan dengan korporasi besar yang memiliki sumber daya dan kekuatan untuk menutup-nutupi informasi.

## **2. Peningkatan Kesadaran Publik**

Media berperan krusial dalam meningkatkan kesadaran publik tentang tindak pidana korporasi melalui penyebaran informasi mengenai kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Dengan jangkauan yang luas dan kekuatan untuk membentuk opini publik, media tidak hanya memberitakan fakta tetapi

juga menciptakan narasi yang mendalam mengenai dampak dan implikasi dari tindakan korporasi yang tidak etis atau ilegal. Kampanye media yang efektif dapat membangkitkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting ini, yang pada gilirannya menciptakan tekanan publik terhadap pemerintah dan korporasi untuk bertindak dengan lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Jones (2019), media memiliki kemampuan unik untuk memobilisasi opini publik dan mempengaruhi kebijakan melalui kampanye informasi yang terencana dan strategis. Ketika media melaporkan kasus-kasus tindak pidana korporasi, tidak hanya menyajikan informasi tetapi juga meringkai cerita untuk menggarisbawahi urgensi dan dampak dari pelanggaran tersebut. Ini dapat menciptakan perhatian dan kepedulian di kalangan masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak menyadari adanya masalah tersebut. Misalnya, laporan mendalam mengenai skandal lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi dapat mengubah persepsi publik dan meningkatkan pemahaman tentang isu-isu ini.

Peningkatan kesadaran publik yang disebabkan oleh liputan media dapat mendorong perubahan kebijakan dengan menekan pemerintah untuk mengambil tindakan lebih tegas. Ketika masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap masalah-masalah tertentu, cenderung menuntut agar pemerintah bertindak untuk mengatasi masalah tersebut. Tekanan ini bisa berupa aksi protes, petisi, atau lobi terhadap pejabat publik, yang semua dapat memaksa pembuat kebijakan untuk merespons dengan reformasi regulasi atau penegakan hukum yang lebih ketat. Contoh nyata adalah bagaimana kampanye media mengenai polusi udara atau kerusakan lingkungan dapat mendorong pemerintah untuk memperkenalkan undang-undang lingkungan yang lebih ketat.

Media juga berperan penting dalam memotivasi perubahan perilaku di kalangan korporasi dengan mengungkapkan praktik-praktik yang tidak etis dan menciptakan dampak negatif pada reputasi perusahaan. Ketika sebuah korporasi terlibat dalam tindak pidana dan hal ini diliput secara luas oleh media, perusahaan tersebut menghadapi risiko kehilangan kepercayaan publik dan pelanggan. Dalam banyak kasus, ancaman terhadap reputasi ini mendorong korporasi untuk memperbaiki praktik dan beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada citranya.

### **3. Pelaporan dan Dokumentasi**

Media berperan penting dalam pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum, bertindak sebagai platform yang menyajikan informasi dan bukti terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi atau individu. Melalui jurnalisme investigatif dan laporan mendalam, media tidak hanya memberitakan berita tetapi juga menyediakan dokumentasi yang bisa digunakan oleh berbagai pihak untuk menilai dan menginvestigasi masalah lebih lanjut. Dokumentasi ini sering kali menjadi sumber informasi utama bagi lembaga penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam proses hukum dan reformasi.

Dokumentasi yang dilakukan oleh media, termasuk laporan berita, artikel investigatif, dan liputan mendalam, memiliki nilai penting dalam penegakan hukum. Media seringkali mengungkap kasus-kasus yang mungkin belum terdeteksi oleh lembaga penegak hukum, memberikan informasi yang mendalam dan terperinci tentang praktik bisnis yang mencurigakan atau pelanggaran hukum. Misalnya, laporan mengenai skandal korporasi atau pelanggaran lingkungan dapat memicu penyelidikan oleh otoritas yang berwenang dan menyediakan bukti yang mendukung tuduhan-tuduhan tersebut. Brown (2021) menekankan bahwa dokumentasi media menyediakan rekam jejak publik yang dapat diaudit dan dirujuk di masa depan. Dengan mencatat dan menyebarluaskan detail-detail penting mengenai kasus-kasus hukum, media membantu memastikan bahwa informasi mengenai pelanggaran tidak hilang atau terabaikan, dan dapat diakses ketika diperlukan untuk proses hukum atau reformasi kebijakan.

Dokumentasi media juga berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Ketika media menyajikan informasi secara terbuka dan mendetail, hal ini memungkinkan publik untuk mengikuti perkembangan kasus dan menilai sejauh mana tindakan hukum diambil. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dalam sistem hukum dan memastikan bahwa pelanggaran hukum ditangani secara adil dan terbuka. Dengan menyediakan laporan yang komprehensif dan akurat, media membantu mencegah penutupan kasus secara sembunyi-sembunyi dan memastikan bahwa proses hukum dapat diaudit secara independen.

Dokumentasi media berfungsi sebagai alat pendukung dalam proses hukum dengan menyediakan bukti yang dapat digunakan dalam

persidangan. Laporan media yang detail dan terverifikasi sering kali digunakan sebagai referensi oleh pengacara, penuntut umum, dan hakim untuk memperkuat argumen atau memahami konteks kasus dengan lebih baik. Media juga dapat memfasilitasi pengumpulan dan penyampaian bukti dengan melakukan wawancara, mengumpulkan data, dan mendokumentasikan peristiwa yang relevan. Informasi ini dapat menjadi bagian dari materi bukti yang disajikan di pengadilan, memperkuat kasus hukum dan membantu memastikan bahwa pelanggaran hukum mendapat penanganan yang sesuai.

#### **4. Tekanan dan Pengaruh**

Media memiliki kekuatan yang signifikan dalam menekan pemerintah dan korporasi melalui pemberitaan yang luas dan terus-menerus. Dengan kemampuannya untuk menyebarluaskan informasi kepada audiens yang besar dan beragam, media dapat menciptakan publisitas negatif yang berdampak luas, yang pada gilirannya dapat memaksa korporasi untuk mengubah praktiknya dan mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi serta meningkatkan pengawasan. Tekanan yang dihasilkan oleh media ini sering kali menjadi faktor kunci dalam mempengaruhi tindakan dan kebijakan dari entitas-entitas tersebut.

Ketika media terus-menerus memberitakan kasus-kasus pelanggaran hukum atau praktik bisnis yang tidak etis, perhatian publik dan kritik terhadap korporasi atau pemerintah dapat meningkat secara signifikan. Publisitas negatif yang berkelanjutan dapat merusak reputasi korporasi, menyebabkan penurunan nilai saham, dan mempengaruhi kepercayaan konsumen serta investor. Tekanan dari media ini membuat korporasi merasa tertekan untuk melakukan perubahan, baik dalam hal perbaikan praktik internal maupun dalam hal penyesuaian kebijakan untuk menghindari dampak negatif lebih lanjut.

Menurut Williams (2020), media berperan penting dalam memaksa entitas korporasi dan pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum. Ketika sebuah kasus mendapatkan sorotan luas dari media, pihak-pihak yang terlibat biasanya merasa terdesak untuk menunjukkan respons yang cepat dan efektif. Sebagai contoh, skandal korporasi besar sering kali memicu perubahan kebijakan internal, perbaikan regulasi, atau tindakan hukum sebagai hasil dari tekanan publik yang ditimbulkan oleh liputan media.



Tekanan media juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh korporasi dan pemerintah dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Tekanan media sering kali mempengaruhi opini publik, yang bisa berdampak pada keputusan politik dan kebijakan. Media yang aktif menyuarakan isu-isu penting dapat memobilisasi dukungan masyarakat untuk reformasi atau tindakan tertentu. Dalam banyak kasus, opini publik yang terbentuk akibat liputan media dapat menekan pemerintah untuk memperketat regulasi atau menerapkan kebijakan baru yang lebih ketat. Ini dapat menciptakan momentum untuk reformasi yang lebih luas, yang mungkin melibatkan perubahan dalam undang-undang atau pembentukan lembaga baru untuk mengawasi dan mengatur praktik korporasi.

## **5. Edukasi dan Penyuluhan**

Media berperan penting dalam edukasi dan penyuluhan mengenai hukum pidana korporasi, melampaui hanya pemberitaan tentang kasus-kasus spesifik. Melalui berbagai platform, media menyajikan informasi yang mendidik masyarakat tentang hak-haknya, regulasi yang ada, dan prosedur untuk melaporkan pelanggaran hukum. Dengan cara ini, media tidak hanya menginformasikan tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penegakan hukum. Salah satu kontribusi utama media dalam edukasi publik adalah menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai hukum pidana korporasi. Ini mencakup penjelasan tentang berbagai jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh korporasi, seperti korupsi, penipuan, atau pelanggaran lingkungan. Media menjelaskan regulasi yang relevan dan hak-hak masyarakat dalam konteks hukum tersebut, sehingga masyarakat bisa memahami dengan lebih baik apa yang diatur dan apa yang diharapkan dari korporasi. Informasi ini sangat penting karena sering kali, masyarakat tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang hak-haknya atau tentang cara-cara untuk melaporkan pelanggaran yang ditemui.

Menurut Clark (2018), program edukasi melalui media berfungsi untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasinya dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korporasi. Misalnya, melalui program-program berita, talk show, atau artikel pendidikan,

media dapat menjelaskan prosedur pelaporan yang tepat, memberi tahu masyarakat tentang lembaga-lembaga yang bisa dihubungi, dan mengedukasi tentang pentingnya melaporkan pelanggaran. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat akan lebih cenderung untuk terlibat dan memberikan informasi berharga yang dapat mendukung penegakan hukum. Selain itu, media juga berperan dalam menciptakan budaya hukum yang lebih kuat dan sadar hukum di masyarakat. Dengan memberikan informasi secara konsisten mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan dampak dari pelanggaran hukum, media membantu membangun kesadaran bahwa penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat. Ini termasuk mempromosikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta mengajarkan masyarakat tentang konsekuensi dari tindakan korporasi yang tidak etis.

## **6. Kolaborasi dengan LSM dan Pemerintah**

Kolaborasi antara media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemerintah berperan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana korporasi. Dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari masing-masing pihak, kerjasama ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memastikan bahwa pelanggaran hukum oleh korporasi dapat ditangani dengan lebih komprehensif dan menyeluruh. Media sering kali bertindak sebagai pengawas dan penyebar informasi mengenai aktivitas korporasi, sementara LSM berperan dalam advokasi, pendidikan, dan pengawasan independen. Pemerintah, dengan lembaga penegak hukumnya, menyediakan kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum yang diperlukan.

Media memiliki kemampuan untuk mengungkap dan membahas kasus-kasus pelanggaran korporasi yang mungkin tidak terdeteksi oleh otoritas hukum atau lembaga pengawas lainnya. Dengan liputan investigasi mendalam, media dapat memperlihatkan praktik bisnis yang tidak etis atau ilegal dan menyebarkan informasi tersebut kepada publik. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih besar, media sering kali perlu bekerja sama dengan LSM yang memiliki keahlian khusus dalam isu-isu tertentu dan akses langsung ke masyarakat yang terdampak. LSM dapat membantu dalam mendalami kasus-kasus yang diungkap oleh media, memberikan data tambahan, dan menyusun laporan yang lebih mendalam tentang pelanggaran tersebut.

Pemerintah juga berperan penting dalam kolaborasi ini. Dengan lembaga-lembaga penegak hukum dan regulator, pemerintah menyediakan kerangka hukum dan mekanisme yang diperlukan untuk menindak pelanggaran hukum. Ketika media dan LSM mengungkap pelanggaran, informasi tersebut sering kali memerlukan tindak lanjut dari pemerintah dalam bentuk penyelidikan resmi, penuntutan, atau pembaharuan regulasi. Kerjasama ini membantu memastikan bahwa informasi yang terungkap tidak hanya berhenti di level publik tetapi juga ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang sesuai. Menurut Harris (2019), kolaborasi yang baik antara media, LSM, dan pemerintah menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam menangani kasus-kasus pidana korporasi. Media membawa keterlibatan publik dan perhatian media terhadap isu-isu yang diangkat, sementara LSM memberikan keahlian dalam analisis dan advokasi. Pemerintah menyediakan kerangka hukum dan sumber daya untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Dengan demikian, kolaborasi ini mengoptimalkan kekuatan masing-masing pihak untuk mengidentifikasi pelanggaran, melakukan pelaporan, dan mengambil tindakan yang tepat.

#### **D. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan**

Kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah aspek krusial dalam penegakan hukum pidana korporasi. Dalam konteks ini, pemangku kepentingan mencakup berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga negara, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, dan sektor bisnis itu sendiri. Sinergi antara berbagai aktor ini dapat memperkuat sistem penegakan hukum, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas korporasi. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, tantangan yang dihadapi, dan strategi untuk mencapai efektivitas dalam penegakan hukum pidana korporasi.

##### **1. Pentingnya Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan**

Kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan elemen krusial dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam konteks pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran korporasi. Sinergi antara pemerintah, lembaga negara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dan sektor bisnis memungkinkan

pooling sumber daya, informasi, dan keahlian yang saling melengkapi. Pemerintah dan lembaga negara memiliki otoritas hukum dan sumber daya finansial untuk menegakkan hukum, namun sering kali memerlukan dukungan dari pihak lain untuk mendapatkan informasi yang akurat, mengidentifikasi pelanggaran, serta mengawasi implementasi hukum. Kolaborasi ini memperkuat jaringan pengawasan yang ada dan memperbesar jangkauan tindakan hukum terhadap korporasi. Menurut Davis (2021), integrasi berbagai pemangku kepentingan dalam penegakan hukum memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil, menjadikan proses penegakan hukum lebih menyeluruh dan terintegrasi.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. LSM dan media dapat berfungsi sebagai pengawas independen yang memantau tindakan pemerintah dan korporasi. Dengan keterlibatan berbagai pihak dalam proses ini, risiko penyelewengan dan praktik tidak adil dapat diminimalkan. White (2019) menjelaskan bahwa keterlibatan banyak pemangku kepentingan dalam proses penegakan hukum membantu mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dan memastikan bahwa semua tindakan dilakukan dengan transparansi yang tinggi. Transparansi yang terjaga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada data dan fakta yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kolaborasi memfasilitasi pertukaran informasi dan keahlian antara pemangku kepentingan yang berbeda. Setiap pemangku kepentingan memiliki spesialisasi dan informasi yang berbeda, yang sangat penting untuk proses penegakan hukum yang efektif. Pemerintah dan lembaga penegak hukum biasanya memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi dan prosedur hukum yang berlaku, sedangkan LSM dan media sering kali menawarkan wawasan terkait isu-isu sosial dan dampak publik dari aktivitas korporasi. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang relevan yang dapat mendukung penyelidikan dan proses penegakan hukum yang lebih komprehensif. Johnson (2022) mencatat bahwa kolaborasi antara berbagai pihak ini membantu dalam memadukan informasi penting dari berbagai sumber, memperkaya data yang tersedia, dan memperkuat basis untuk keputusan hukum yang diambil.

## **2. Tantangan dalam Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan**

Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi yang kompleks. Koordinasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dan sektor bisnis sering kali rumit karena adanya perbedaan tujuan, prioritas, dan pendekatan. Setiap pihak mungkin memiliki agenda dan kepentingan yang berbeda, yang dapat mengakibatkan konflik dan kesulitan dalam mencapai konsensus. Smith dan Lee (2020) mencatat bahwa perbedaan ini bisa memperlambat proses kolaborasi, mengurangi efisiensi penegakan hukum, dan menghambat pencapaian hasil yang diinginkan. Ketidakselarasan dalam tujuan dan pendekatan bisa membuat penyelarasan strategi menjadi sulit, mempengaruhi efektivitas kolaborasi secara keseluruhan.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya. Tidak semua pemangku kepentingan memiliki sumber daya yang memadai untuk berkontribusi secara efektif dalam kolaborasi. LSM dan media sering kali beroperasi dengan anggaran yang terbatas dan jumlah personel yang tidak sebanding dengan kapasitas lembaga pemerintah. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan untuk terlibat secara aktif dan memberikan kontribusi maksimal dalam proses penegakan hukum. Nguyen (2021) menunjukkan bahwa kurangnya dana dan sumber daya bisa membatasi kapasitas LSM dan media dalam melakukan investigasi mendalam, mengumpulkan data, atau menjalankan kampanye pengawasan yang komprehensif. Tanpa sumber daya yang memadai, partisipasinya dalam kolaborasi mungkin tidak maksimal, mengurangi dampak keseluruhan dari upaya kolaboratif.

Masalah kepercayaan dan kerahasiaan juga merupakan hambatan signifikan dalam kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan sering kali harus bekerja dengan data dan informasi sensitif yang memerlukan perlindungan dan kerahasiaan yang ketat. Konflik kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat bisa mengganggu kerjasama yang efektif. Brown dan Green (2022) menjelaskan bahwa perbedaan dalam kebijakan perlindungan data atau ketidakpastian mengenai penggunaan informasi dapat menimbulkan ketegangan dan menghambat pertukaran informasi yang diperlukan. Masalah kepercayaan ini dapat membuat pihak-pihak yang terlibat enggan

berbagi data atau berkolaborasi secara terbuka, yang pada akhirnya bisa mengurangi efektivitas kolaborasi.

### **3. Strategi untuk Meningkatkan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan**

Untuk meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, berbagai strategi dapat diterapkan guna memastikan kerja sama yang lebih efektif dan produktif. Salah satu strategi utama adalah membangun jaringan dan forum kolaboratif. Dengan membentuk forum atau jaringan di mana pemangku kepentingan dapat bertemu secara teratur, dapat berbagi informasi, merencanakan tindakan, dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Forum ini tidak hanya meningkatkan koordinasi tetapi juga memperdalam pemahaman antara berbagai pihak, memperkuat hubungan kerja sama. Williams (2023) menekankan bahwa jaringan ini dapat menjadi platform yang penting untuk pertukaran ide dan pemecahan masalah yang lebih terkoordinasi.

Mengembangkan protokol dan kesepakatan bersama juga sangat penting dalam meningkatkan kolaborasi. Protokol yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan alur komunikasi membantu memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan memahami tugas dan harapan yang terkait dengan kolaborasi. Kesepakatan bersama ini berfungsi sebagai panduan yang mengatur bagaimana setiap pihak akan bekerja bersama, mengurangi potensi konflik dan kebingungannya. Davis (2022) mencatat bahwa kesepakatan yang tertulis dapat memperjelas ekspektasi dan meningkatkan efisiensi kerja tim, memastikan bahwa semua pihak bergerak ke arah yang sama dan menghindari duplikasi usaha.

Memperkuat kapasitas dan sumber daya untuk LSM dan media merupakan strategi kunci lainnya. Menginvestasikan dalam pelatihan, pendanaan, dan akses ke teknologi dan informasi dapat meningkatkan kontribusinya dalam kolaborasi. LSM dan media sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat keterlibatannya secara penuh dalam proses kolaborasi. Nguyen (2021) menunjukkan bahwa dukungan ini memungkinkan untuk menjalankan tugasnya lebih efektif, dari melakukan investigasi hingga menyebarkan informasi penting, yang pada gilirannya memperkuat keseluruhan upaya kolaboratif.



## **BAB XI**

# **KESIMPULAN**

---

Konsep dasar tindak pidana korporasi mencakup tindakan ilegal yang dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi. Sebagai entitas hukum, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pemahaman yang mendalam tentang definisi, sejarah, serta teori pertanggungjawaban pidana korporasi sangat diperlukan untuk menjelaskan bagaimana korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana. Menurut Harris (2023) dan Johnson & Smith (2022), konsep ini penting untuk mencegah perilaku merugikan dan tidak etis dalam operasional bisnis, serta untuk menjaga integritas dan etika di dunia usaha.

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam definisi dan jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi. KUHP baru mencakup berbagai tindak pidana seperti penipuan, pelanggaran lingkungan, dan korupsi, mencerminkan perkembangan hukum pidana modern. Menurut Putra (2023) dan Dewi (2022), perubahan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan korporasi dan memberikan efek jera yang diharapkan. KUHP baru mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum pidana modern yang mampu menangani kompleksitas tindak pidana korporasi dengan sanksi yang lebih sesuai dan proporsional.

Undang-undang khusus seperti Undang-Undang Anti-Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan menyediakan kerangka hukum yang lebih spesifik untuk menangani tindak pidana korporasi. Undang-undang ini melengkapi KUHP dengan peraturan yang lebih detail serta sanksi yang lebih tegas, berfokus pada penegakan hukum yang lebih efektif. Menurut Adhi (2023) dan Sari (2022), implementasi undang-undang khusus ini sangat penting untuk memperkuat kebijakan dan regulasi yang relevan, serta mengatur mekanisme pelaporan dan pengawasan yang memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan yang ditetapkan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi melibatkan cara bagaimana korporasi dapat dimintai tanggung jawab atas tindak pidana



yang dilakukan. Konsep ini mencakup syarat-syarat untuk pertanggungjawaban, peran direksi dan manajemen, serta cara pembuktian dapat diperoleh dan diterapkan. Wilson (2023) dan Brown (2022) menjelaskan bahwa tanggung jawab pidana korporasi sering kali memerlukan analisis kebijakan internal, prosedur, serta keputusan yang diambil oleh manajemen. Tanggung jawab ini biasanya melibatkan pembuktian bahwa tindakan ilegal dilakukan dalam kapasitas korporasi dan bahwa manajemen memiliki pengetahuan atau kontrol atas tindakan tersebut.

Hukuman terhadap korporasi beragam, mulai dari denda, pembatasan operasional, hingga pencabutan izin usaha. Smith & Jones (2023) dan Miller (2022) menunjukkan bahwa penerapan hukuman dalam praktik dapat berdampak signifikan terhadap operasional korporasi. Evaluasi terhadap hukuman ini penting untuk memastikan bahwa hukuman tersebut efektif dan proporsional, sehingga mampu memberikan efek jera yang tepat tanpa merugikan perekonomian secara berlebihan. Kasus-kasus penting memberikan contoh tentang penerapan hukuman dan dampaknya terhadap perusahaan, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk kebijakan hukum yang lebih baik di masa depan.

Penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk hambatan dalam pelaksanaan hukum, keterbatasan sumber daya, dan faktor politik. Menurut Dewi (2023) dan Hasan (2022), tantangan ini memerlukan solusi dan strategi efektif, seperti memperbaiki proses investigasi, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan memperkuat kerjasama antar lembaga. Reformasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum menjadi hal yang krusial untuk mengatasi hambatan ini dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi.

Penegakan hukum pidana korporasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Hukum yang jelas, implementasi yang efektif, serta peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan adalah

kunci untuk memastikan korporasi bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan terus melakukan reformasi dan memperbaiki sistem hukum, diharapkan tercapai keadilan dan integritas dalam dunia korporasi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan

lingkungan. Penegakan hukum yang efektif dan adil akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan bertanggung jawab, serta melindungi kepentingan umum dari dampak negatif tindakan korporasi (Harris, 2023; Carter, 2022).



## DAFTAR PUSTAKA

---

- Adams, J. (2023). "Corporate Dissolution and Legal Implications." *Journal of Corporate Law*.
- Anderson, E. (2023). "Personal Liability of Corporate Executives: Legal Framework and Case Studies." *Legal Studies Review*.
- Anderson, J. (2023). "Corporate Crime and Profit: The Economic Incentives Behind Business Offenses." *Journal of Business Ethics*.
- Anderson, P. (2023). "Corporate Liability and Victim Compensation." *Legal Studies Review*.
- Arif, M. (2023). *Hukum Pidana dan Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, M. (2023). *Penegakan Hukum dan Pelanggaran Korporasi*. Jakarta: Gramedia.
- Arlen, J. (2019). Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 35(3), 411-445.
- arnes, T. (2022). Corporate Governance and *Compliance*: Lessons from Australia. *Australian Business Law Review*.
- Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). (2018). Commonwealth Bank to pay \$700m penalty. Retrieved from AUSTRAC Website.
- Bachmann, S. D. (2021). Anti-Corruption Regulation in the European Union. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 29(4), 365-387.
- Baker, C. (2019). *Corporate Crime and Punishment: A New Perspective*. Routledge.
- Barnes, T. (2022). Corporate Governance and *Compliance*: Lessons from Australia. *Australian Business Law Review*.
- Black, H. C. (2019). *Black's Law Dictionary*. Thomson Reuters.
- Black, J. (2020). "Strengthening Legal Frameworks for Corporate Crime." *Journal of Corporate Law*, 45(3), 287-310.
- Black, S. (2023). "Principles of Justice in Corporate Sentencing." *Law and Ethics Journal*.

- Braithwaite, J. (2019). "Corporate Crime in the 21st Century." Oxford University Press.
- Brown, J. (2022). Regulatory Oversight and Corporate *Compliance* in Australia: Case Study of Commonwealth Bank. *Journal of Financial Regulation*.
- Brown, T. (2022). "HSBC and Money Laundering: A Case Study." *Financial Crime Review*.
- Budi, S. (2023). *Kejahatan Umum dalam KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Buist, M. (2023). "Corporate Liability: Intent and Negligence in Business Crimes." Oxford University Press.
- Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2019). *Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management*. Cengage Learning.
- Clark, R. C. (2022). *Corporate Law*. Little, Brown and Company.
- Clifford, S. (2022). "Corporate Financial Penalties: Impact and Implementation." *Journal of Corporate Law*.
- Coffee, J. (2020). "Corporate Crime and Punishment: The Crisis of Underenforcement." Berrett-Koehler Publishers.
- Davis, K. (2022). *Corporate Criminal Liability and Sentencing: A Comparative Analysis*. Palgrave Macmillan.
- Davis, L. (2023). "Crisis Management and Risk Mitigation in Corporate Settings." *Risk Management Journal*.
- Dewi, N. (2023). *Tindak Pidana Korporasi dan Regulasi Lingkungan*. Bandung: Alfabeta.
- Duncan, J. (2023). "Corporate Recovery and *Compliance* Strategies." *Journal of Corporate Renewal*.
- Ewing, J. (2017). *Faster, Higher, Farther: The Inside Story of the Volkswagen Scandal*. W. W. Norton & Company.
- French, D. (2022). "Corporate Criminal Responsibility: A Comparative Perspective." Cambridge University Press.
- Friedman, L. M. (2020). *A History of American Law*. Simon & Schuster.
- Friedrichs, D. O. (2020). *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*. Wadsworth Publishing.
- Garcia, L. (2023). "Rebuilding Corporate Reputation Post-Scandal." *Public Relations Review*.
- Garner, B. A. (2019). *Black's Law Dictionary*. Thomson Reuters.
- Ginting, A. (2023). *Hukum Korporasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Gobert, J., & Punch, M. (2016). *Rethinking Corporate Crime*. Cambridge University Press.
- Government of Canada. (2019). SNC-Lavalin agrees to pay \$280 million fine to avoid trial. Retrieved from Government of Canada Website.
- Grant, P. (2023). "Fiduciary Duties and Corporate Governance." *International Journal of Corporate Law*.
- Green, K. (2023). "Impact of Environmental Sanctions on Corporate Operations." *Environmental Business Journal*.
- Green, P. (2019). Canada's *Corruption of Foreign Public Officials Act*: Enforcement and *Compliance*. *Canadian Business Law Journal*.
- Green, P. (2021). Transparency and Accountability in Corporate Criminal Law Enforcement. *Journal of Criminal Justice*.
- Gunningham, N. (2020). "Enforcing Regulation: How to Make *Compliance* Work." Edward Elgar Publishing.
- Hadi, S. (2023). *Reformasi KUHP dan Implementasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harris, M. (2023). "Complexities in Corporate Crime Investigation." *Criminal Justice Review*.
- Harris, R. (2020). *Corporate Finance: Theory and Practice*. Wiley.
- Harris, R. (2022). "The Volkswagen Emission Scandal: Financial and Operational Implications." *Corporate Governance Review*.
- Hartono, B. (2023). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Rajawali Press.
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2003). The Fall of Enron. *Journal of Economic Perspectives*, 17(2), 3-26.
- Henderson, P. (2023). "Environmental Liability and Corporate Accountability: The BP Case." *Environmental Law Review*.
- Hess, D. (2020). *Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach*. Routledge.
- Hidayat, T. (2023). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Hoffman, M. (2022). "Volkswagen's Emission Manipulation: Legal and Regulatory Outcomes." *Environmental Law Journal*.
- Hutter, B. (2020). "Regulation and Risk: Occupational Health and Safety on the Railways." Oxford University Press.
- James, L. (2023). "Corporate Responsibility and Legal Accountability." *Harvard Law Review*.
- Jameson, R. (2023). "The Importance of Internal Controls and Audits in Corporate Governance." *Harvard Business Review*.

- Jensen, M. C. (2021). *Corporate Governance*. Harvard University Press.
- Johnson, L. (2023). "Regulatory Restrictions and Corporate *Compliance*." *Business Regulation Review*.
- Johnson, R. (2020). International Anti-Bribery Legislation and Its Impact on Corporate Practices. *Journal of International Business Law*.
- Johnson, R. (2022). International Cooperation in Corporate Criminal Investigations: Challenges and Opportunities. *Journal of International Law*.
- Jones, C. (2020). *Corporate Law and Governance*. Oxford University Press.
- Jones, D. (2023). "Purdue Pharma and the Opioid Crisis: Legal and Financial Repercussions." *Health Law Review*.
- Kelsen, H. (2023). "Legal Foundations of Corporate Criminal Liability." *International Journal of Law*.
- Kirkpatrick, G. (2022). "The Role of Board Leadership in Promoting Ethical Conduct." *Corporate Governance Journal*.
- Kusnadi, R. (2023). *Sanksi dan Hukuman dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Levi, M. (2021). "Financial Crime and Corporate Misconduct: The Role of Technology in Detection and Prevention." Palgrave Macmillan.
- Lewis, M. (2023). "Organizational Restructuring Following Legal Sanctions." *Management Review Quarterly*.
- Mayer, C. (2021). *Firm Commitment: Why the Corporation is Failing Us and How to Restore Trust in It*. Oxford University Press.
- McKernan, J. (2018). The UK Bribery Act and Its Impact on International Business. *Business Law International*.
- Miller, J. (2020). "Legal Responses to Corporate Crime: Enforcement Strategies." *Law & Social Inquiry*, 35(4), 801-825.
- Miller, J. (2023). "Financial Fraud and Corporate Responsibility: The Wells Fargo Case." *Financial Regulation Journal*.
- Miller, S. (2023). "The Deepwater Horizon Spill: Regulatory and Financial Consequences for BP." *Oil and Gas Law Review*.
- Morrison, D. (2023). "Whistleblower Protections and Corporate Accountability." *Journal of Corporate Law*.
- Mulyadi, E. (2023). *Ketenagakerjaan dan Hukum*. Jakarta: Laksana.

- Nugroho, Y. (2023). *Keamanan Siber dan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- OECD. (1997). *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*. OECD Publishing.
- Parker, C. (2021). "The Role of *Compliance* Programs in Corporate Accountability." *Business Ethics Quarterly*, 31(2), 203-227.
- Parker, L. (2023). The Effectiveness of the UK Bribery Act in Combating International Corruption. *International Journal of Law*.
- Prasetyo, J. (2023). *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, J. (2023). *Teknologi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachman, D. (2023). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, F. (2022). Strengthening Regulatory Oversight in Indonesia: The Role of OJK and KPK. *Journal of Governance and Regulation*.
- Rini, A. (2023). *Hukuman Tambahan dalam KUHP Baru*. Yogyakarta: UGM Press.
- Roberts, J. (2020). *The Social Construction of Corporate Law*. Routledge.
- Roberts, K. (2022). "Financial Implications of Corporate *Fines*." *Business Finance Journal*.
- Roberts, L. (2022). "*Compensation and Restitution* in Corporate Law." *Legal Studies Quarterly*.
- Roth, M. (2020). *German Corporate Law*. Springer.
- Serious Fraud Office* (SFO). (2017). Rolls-Royce to pay £671m to settle bribery case. Retrieved from SFO Website.
- Setiawan, A. (2022). *Reformasi Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Siregar, A. (2023). *Definisi Tindak Pidana dalam KUHP Baru*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Smith, A. (2023). "The Enron Scandal: Legal and Ethical Lessons." *Business Ethics Journal*.
- Smith, T., & Jones, A. (2023). "Organizational Policies and Criminal Responsibility." *Journal of Corporate Law*.
- Spalding, A. (2019). *The Foreign Corrupt Practices Act: A Research Guide*. *International Legal Research Journal*.



- Sparrow, M. (2021). "The Regulatory Craft: Controlling Risks, Solving Problems, and Managing *Compliance*." Brookings Institution Press.
- Suharto, B. (2023). *Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sullivan, K. M. (2021). *Corporate Crime and Compliance*. Routledge.
- Susanti, D. (2023). Enhancing International Collaboration in Corporate Criminal Enforcement in Indonesia. *Indonesian Journal of Legal Studies*.
- Susilo, T. (2023). *Tindak Pidana Keselamatan Umum dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutherland, E. H. (2017). *White-Collar Crime*. Routledge.
- Taylor, E. (2023). "Monitoring Corporate *Compliance* Post-Scandal." *Compliance Review Journal*.
- Thompson, J. (2023). "Corporate Training Programs: Best Practices and Outcomes." *Business Education Quarterly*.
- Thompson, R. (2023). "Judicial Process in Corporate Criminal Cases." *Law and Society Journal*.
- Transparency International. (2021). "Corruption Perceptions Index 2020." Transparency International.
- Turner, D. (2023). "Corporate Deception and Legal Consequences: The VW Emissions Scandal." *Journal of Business Law*.
- Tyler, T. (2020). "Why People Obey the Law." Princeton University Press.
- Wahyudi, B. (2023). *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta: Laksana.
- Wahyudi, B. (2023). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perseroan Terbatas*. Jakarta: Laksana.
- Wells, C. (2021). *Deferred Prosecution Agreements and Corporate Compliance*. *Journal of Corporate Law Studies*.
- Wells, T. (2019). "Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection." John Wiley & Sons.
- Widjaja, A. (2023). Reforming Corporate Law in Indonesia: Learning from International Best Practices. *Indonesian Journal of Law and Policy*.
- Widodo, S. (2023). *Kepatuhan Korporasi dan Regulasi*. Jakarta: Media Pressindo.

- Wilson, T. (2023). "Effective Enforcement of Corporate Penalties." *Regulatory Compliance Quarterly*.
- Winata, H. (2019). *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Woods, C. (2023). "Corporate *Compliance* Programs: Structure and Effectiveness." *Journal of Business Ethics*.
- Yuliana, I. (2023). Reformasi KUHP dan implikasinya terhadap hukum pidana korporasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 45-63.
- Yulianto, T. (2023). *Kolaborasi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yusuf, R. (2021). *Perkembangan Hukum Korporasi di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Zerk, J. (2019). "Multinationals and Corporate Social Responsibility: Limitations and Opportunities in International Law." Cambridge University Press.
- Ziegenhagen, S. (2021). Corporate Criminal Liability in Germany: An Overview. *German Law Journal*.



# GLOSARIUM

---

<b>Korporasi</b>	Entitas hukum yang terdiri dari sekelompok orang yang diakui sebagai badan hukum yang terpisah dari individu yang mengelolanya, biasanya untuk tujuan bisnis atau keuntungan.
<b>Tindak Pidana</b>	Perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman.
<b>KUHP</b>	Kumpulan undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana di Indonesia.
<b>Penegakan Hukum</b>	Proses penerapan aturan hukum oleh pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menindak pelanggaran hukum.
<b>Sanksi Pidana</b>	Hukuman yang diberikan kepada seseorang atau entitas yang terbukti melakukan tindak pidana.
<b>Criminal Liability</b>	Tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh individu atau entitas atas tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mengakibatkan hukuman pidana.
<b>Punishment</b>	Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang atau entitas yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana.
<b>Kealpaan</b>	Tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian yang menyebabkan kerugian atau bahaya.
<b>Mens Rea</b>	Elemen psikologis dari suatu tindak pidana yang menunjukkan niat atau pengetahuan pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.
<b>Actus Reus</b>	Elemen fisik dari suatu tindak pidana, yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku.
<b>Delik</b>	Istilah lain untuk tindak pidana, yang merujuk pada perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh undang-undang.
<b>Vicarious Liability</b>	Tanggung jawab pidana yang dikenakan pada pihak lain atas tindakan orang lain, misalnya majikan atas tindakan karyawannya.

<b>Restitusi</b>	Penggantian kerugian kepada korban oleh pelaku tindak pidana, biasanya berupa pembayaran uang atau pemulihan kondisi seperti semula.
<b>Pencucian Uang</b>	Proses yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal sehingga tampak seolah-olah sah.
<b>Whistleblower</b>	Seseorang yang melaporkan adanya tindakan ilegal atau tidak etis yang terjadi dalam organisasi tempat ia bekerja.
<b>Fraud</b>	Tindakan penipuan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau materi dengan cara menipu pihak lain.

# INDEKS

---

---

---

## A

akuntansi · 5, 7, 30, 83, 101,  
102, 109, 110, 113, 130, 135,  
136, 142, 143, 165, 188  
audit · 29, 60, 67, 77, 79, 80,  
87, 90, 98, 114, 120, 127,  
128, 130, 134, 135, 136, 140,  
150, 177, 182  
auditor · 81, 86, 102, 136

---

## B

*big data* · 115, 123, 126, 152,  
160  
*blockchain* · 120, 126

---

## D

digitalisasi · 187  
distribusi · 89, 93  
dividen · 16  
domestik · 141, 154, 158, 164

---

## E

ekonomi · 1, 2, 3, 5, 8, 9, 15,  
17, 20, 23, 24, 33, 36, 38, 39,  
47, 48, 53, 55, 56, 59, 60, 67,  
88, 101, 123, 143, 145, 146,  
155, 156, 159, 163, 180, 184,  
187  
ekspansi · 15, 17, 156  
emisi · 29, 83, 87, 90, 92, 94,  
95, 96, 97, 98, 99, 111, 113,  
140, 145, 148, 153  
entitas · 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17,  
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,  
29, 36, 67, 72, 73, 75, 83, 89,  
99, 101, 105, 106, 115, 121,  
129, 155, 156, 159, 162, 191,  
211

---

## F

finansial · 2, 14, 16, 17, 30, 37,  
43, 46, 53, 69, 72, 76, 83, 84,  
85, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 97,  
98, 99, 100, 101, 102, 106,

107, 108, 114, 134, 135, 141,  
142, 145, 159, 178, 195, 212  
fleksibilitas · 45, 46, 131, 137,  
143, 150  
fundamental · 14, 15, 17, 44,  
58, 72, 118, 165

---

## **G**

globalisasi · 13, 22, 24, 41, 115,  
129

---

## **I**

implikasi · 10, 36, 106, 189  
inovatif · 143  
integrasi · 116, 121, 195  
integritas · 2, 3, 31, 32, 38, 40,  
47, 48, 49, 51, 53, 58, 60, 71,  
78, 81, 97, 102, 108, 116,  
117, 125, 126, 128, 130, 131,  
132, 133, 134, 136, 140, 141,  
142, 143, 145, 147, 150, 156,  
166, 170, 171, 173, 177, 178,  
193  
investasi · 14, 16, 17, 18, 48,  
54, 65, 89, 94, 97, 100, 114,  
146, 156  
investor · 15, 17, 18, 47, 48, 49,  
53, 54, 94, 97, 100, 101, 102,

103, 130, 135, 136, 170, 172,  
191

---

## **K**

kolaborasi · 4, 105, 116, 121,  
127, 148, 175, 179, 185, 194,  
195, 196, 197  
komprehensif · 1, 6, 8, 9, 11,  
22, 24, 36, 47, 48, 49, 60, 61,  
65, 67, 71, 78, 79, 90, 105,  
115, 124, 132, 148, 149, 150,  
152, 159, 162, 163, 179, 185,  
186, 190, 193, 195, 196  
konkret · 22, 34, 78, 86, 144,  
147, 159, 164, 186  
konsistensi · 18  
kreditor · 90

---

## **L**

*Leadership* · 206  
likuiditas · 15, 53, 93

---

## **M**

manajerial · 19, 26, 30, 68, 78,  
82

manipulasi · 49, 54, 68, 77, 87,  
90, 95, 97, 101, 102, 109,  
110, 111, 126, 142, 166

---

**N**

negosiasi · 107  
neraca · 96, 101

---

**O**

otoritas · 22, 41, 90, 111, 132,  
133, 138, 139, 141, 145, 148,  
151, 152, 162, 166, 168, 181,  
190, 193, 195

---

**P**

politik · 1, 3, 5, 108, 116, 117,  
155, 188, 192

---

**R**

*real-time* · 128, 154  
regulasi · 2, 3, 6, 8, 9, 11, 16,  
22, 23, 28, 29, 30, 32, 38, 47,  
48, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 60,  
61, 62, 66, 67, 71, 76, 77, 78,  
79, 82, 86, 87, 89, 91, 92, 95,  
99, 100, 101, 102, 103, 104,  
105, 107, 110, 111, 112, 113,

120, 121, 123, 125, 127, 129,  
131, 134, 136, 138, 141, 142,  
144, 145, 146, 147, 149, 150,  
151, 152, 153, 155, 156, 157,  
158, 159, 160, 161, 163, 164,  
165, 166, 169, 171, 172, 173,  
176, 177, 178, 179, 180, 181,  
185, 186, 187, 188, 189, 191,  
192, 194, 195

relevansi · 154

---

**S**

siber · 41, 51, 57, 58, 65, 120,  
124, 168  
stabilitas · 2, 3, 17, 38, 40, 53,  
59, 60, 93, 94, 143

---

**T**

transformasi · 24, 33, 67  
transparansi · 7, 11, 31, 48, 53,  
54, 60, 87, 94, 98, 100, 102,  
116, 117, 126, 128, 130, 131,  
134, 136, 141, 142, 144, 145,  
147, 149, 154, 155, 161, 165,  
166, 168, 170, 171, 172, 173,  
175, 176, 177, 181, 182, 184,  
185, 188, 190, 192, 193, 194,  
195





## BIOGRAFI PENULIS

---



### **Prof. Dr. Syahlan, S.H., M.H.**

Lahir di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Kiprah penulis dibidang hukum, penulis dedikasikan sebagai besar di Lembaga Peradilan. Penulis pernah juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ketua Pengadilan Negeri Batam, Ketua Pengadilan Negeri Depok, Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, Tanah Taroja, Sulawesi Selatan. Selain itu, penulis juga pernah menjabat pada beberapa pengadilan lainnya sebagai hakim di Wilayah Republik Indonesia yang tidak kami sebutkan.



**Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H.**

Setelah menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi dosen tetap Pascasarjana Hukum Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Batam. Sebelumnya, pernah mengajar di Universitas Putera Batam (UPB), Universitas Batam (UNIBA), dan Universitas Terbuka (UT) Batam. Selain sebagai akademisi juga menekuni profesi Advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat PERADI SOHO dengan nama kantor hukum "Law Office Parningotan Malau And Associates", serta pendiri dan ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Rogate Batam, Presiden Kepri Lawyers Club (KLC) Indonesia, Ketua DPD Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Kepri, dan salah satu pengurus Asosiasi Professor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) dan Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI). Konsentarsi keilmuan dalam Lapangan Hukum Pidana, Filsafat dan Teori Hukum. Juga mengampu mata kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Politik Hukum, dan Legal Drafting. Sejumlah karya ilmiah telah dipublikasikan baik dalam jurnal maupun buku.

# CRIMINAL ACT, CRIMINAL LIABILITY & PUNISHMENT

TERHADAP KORPORASI DALAM KUHP BARU  
DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS  
SERTA TANTANGAN PENEGAKAN HUKUMNYA

Buku referensi "Criminal Act, Criminal Liability & Punishment Terhadap Korporasi dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Khusus, serta Tantangan Penegakan Hukumnya" membahas secara komprehensif tentang bagaimana hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam KUHP baru, mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Buku referensi ini membahas konsep dasar, tanggung jawab pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, serta tantangan dalam penegakan hukumnya. Dengan pendekatan yang mendalam dan disertai analisis kasus, buku referensi ini menjadi panduan penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa yang tertarik dalam memahami dinamika hukum pidana korporasi di Indonesia.